



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 153 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 181 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2015, telah diatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, oleh karena itu Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 153 TAHUN 2016

Tanggal 2 Agustus 2016



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2016

KATA PENGANTAR

RKPD Perubahan Tahun 2016 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016 triwulan II dimana dalam tahun berjalan menunjukkan adanya perkembangan situasi dan keadaan yang mengharuskan dokumen ini dilakukan penyesuaian.

Dalam perspektif substansi, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2016 memuat maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan serta gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah. Selain itu, dokumen ini juga memuat Evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD/UKPD sampai dengan Triwulan II, kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dan kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, serta pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Fungsi dokumen Perubahan RKPD adalah sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tahun 2016. Dokumen ini akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-SKPD dan akan dipedomani untuk penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2016 juga disusun sebagai bagian penting dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta. Dokumen ini diharapkan dapat mudah dimengerti oleh SKPD/UKPD dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai *living document*, dokumen ini bersifat dinamis dan terbuka atas masukan guna penyempurnaan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan	I-3
1.3 Landasan Hukum	I-3
1.4 Pertimbangan Perubahan	I-4
1.5 Gambaran Perkembangan Asumsi Ekonomi Makro	I-6
1.5.1 Pertumbuhan Ekonomi Global	I-6
1.5.2 Laju Inflasi	I-13
1.5.3 Nilai Tukar Rupiah	I-19
1.6 Sistematika Dokumen	I-20
BAB II EVALUASI HASIL RKPD	II-1
2.1 Evaluasi Perkembangan Indikator Daerah	II-2
2.1.1 Evaluasi Perkembangan Ekonomi Daerah Triwulan I Tahun 2016	II-2
2.1.2 Evaluasi Perkembangan Indikator Kesejahteraan Masyarakat	II-7
2.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015	II-10
2.2.1 Urusan Pendidikan	II-11
2.2.2 Urusan Kesehatan	II-13
2.2.3 Urusan Pekerjaan Umum	II-15
2.2.4 Urusan Perumahan Rakyat	II-25
2.2.5 Urusan Penataan Ruang	II-22
2.2.6 Urusan Perencanaan Pembangunan	II-23
2.2.7 Urusan Perhubungan	II-24
2.2.8 Urusan Lingkungan Hidup	II-26
2.2.9 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	II-28
2.2.10 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-28
2.2.11 Urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)	II-29
2.2.12 Urusan Sosial	II-29
2.2.13 Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	II-30
2.2.14 Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	II-31
2.2.15 Urusan Penanaman Modal	II-32
2.2.16 Urusan Kebudayaan	II-33
2.2.17 Urusan Pemuda dan Olahraga	II-34
2.2.18 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	II-37

2.2.19	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	II-38
2.2.20	Urusan Ketahanan Pangan	II-45
2.2.21	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-46
2.2.22	Urusan Statistik	II-46
2.2.23	Urusan Kearsipan	II-47
2.2.24	Urusan Komunikasi dan Informatika	II-47
2.2.25	Urusan Perpustakaan	II-48
2.2.26	Urusan Pertanian	II-49
2.2.27	Urusan Kehutanan	II-50
2.2.28	Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral	II-50
2.2.29	Urusan Pariwisata	II-51
2.2.30	Urusan Kelautan Dan Perikanan	II-51
2.2.31	Urusan Perdagangan	II-52
2.2.32	Urusan Perindustrian	II-52
2.3	Evaluasi APBD 2016 Sampai Dengan Triwulan II tahun 2016	II-53
2.3.1	Pendapatan Daerah	II-53
2.3.2	Belanja Daerah	II-60
2.3.3	Pembiayaan Daerah	II-62
2.4	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016	II-64
2.4.1	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Pemerintahan	II-64
2.4.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Tingkat Wilayah	II-66
2.5	Permasalahan dan Tantangan Tahun 2016	II-68
2.6	Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2016	II-71
BAB III	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RKPD 2016	III-1
3.1	Kegiatan yang Mengalami Penambahan Anggaran	III-1
3.2	Kegiatan Baru	III-1
3.3	Kegiatan yang Mengalami Pengurangan Anggaran	III-2
3.4	Kegiatan yang Dimatikan	III-2
BAB IV	PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Outlook Perekonomian Dunia	I-7
Tabel 1.2	Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dari Sisi Pengeluaran	I-12
Tabel 1.3	Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dari sisi Produksi	I-13
Tabel 1.4	Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Nasional tahun 2016	I-14
Tabel 1.5	Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi DKI Jakarta tahun 2016	I-17
Tabel 1.6	Faktor Resiko Inflasi Tahun 2016	I-18
Tabel 1.7	Perubahan Asumsi Ekonomi Makro	I-20
Tabel 2.1	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	II-3
Tabel 2.2	PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	II-4
Tabel 2.3	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 2015	II-7
Tabel 2.4	Realisasi Pendapatan sampai dengan 30 Juni 2016	II-53
Tabel 2.5	Realisasi Belanja Daerah sampai 30 Juni 2016	II-60
Tabel 2.6	Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta APBD Tahun 2016	II-62
Tabel 2.7	Rekap Realisasi Belanja Langsung per Urusan sampai Triwulan II Tahun 2016	II-67
Tabel 2.8	Rekap Realisasi Belanja Langsung per Wilayah sampai Triwulan II Tahun 2015	II-68
Tabel 2.9	Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2016	II-72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan I 2016	I-8
Gambar 1.2	Bauran Kebijakan tahun 2016	I-9
Gambar 1.3	Pertumbuhan Ekonomi dari sisi Pengeluaran (kiri) dan Kontribusi masing – masing sektor (kanan) Triwulan 1 tahun 2016	I-10
Gambar 1.4	Realisasi Belanja Triwulan 1 APBD DKI Jakarta tahun 2016	I-10
Gambar 1.5	Pertumbuhan Ekonomi menurut lapangan usaha (kiri) dan Kontribusi masing – masing sektor (kanan) Triwulan 1 tahun 2016	I-11
Gambar 1.6	Sebaran Inflasi Daerah Triwulan I 2016	I-14
Gambar 1.7	Realisasi Inflasi Nasional Mulai Tahun 2013 Serta Proyeksi Inflasi Perubahan Tahun 2016	I-15
Gambar 1.8	Realisasi Inflasi DKI Jakarta Mulai Tahun 2013 Serta Proyeksi Inflasi Perubahan Tahun 2016	I-19
Gambar 2.1	Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dan Nasional 2011-2015 (Persen)	II-2
Gambar 2.2	Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta	II-6
Gambar 2.3	Investasi PMA dan PMDN Provinsi DKI Jakarta	II-6
Gambar 2.4	Distribusi Pendapatan dan Gini Ratio DKI Jakarta (persen)	II-8
Gambar 2.5	Distribusi Pendapatan dan Gini Ratio DKI Jakarta (persen)	II-9
Gambar 2.6	Tingkat Pengangguran DKI Jakarta	II-10

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Rencana Kegiatan yang Mengalami Penyesuaian Kegiatan yang Mengalami Penambahan Anggaran, Kegiatan Baru, Kegiatan yang Mengalami Pengurangan Anggaran, Kegiatan Dimatikan
- Lampiran II Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 17 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Selanjutnya Pasal 25 ayat (2) Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. Sejalan dengan kedua ketentuan tersebut serta dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka dalam hal penyusunan perubahan APBD tahun 2016 diperlukan perubahan RKPD Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dokumen perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2016.

Amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 3 ayat (2) juga menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan dengan periode 1 (satu) tahunan.

Secara substansi RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Seperti disebutkan sebelumnya, dokumen Perubahan RKPD adalah sebagai dasar dalam penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan. Selanjutnya KUPA dan PPAS Perubahan ini dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Perubahan. RKA SKPD Perubahan ini akan dijadikan dasar untuk penyusunan RAPBD Perubahan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Penetapan APBD dilakukan setiap tahun 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

Namun, jika dalam pelaksanaan APBD tahun berjalan terjadi perubahan situasi dan kondisi dimana situasi dan kondisi tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang tertulis dalam dokumen penetapan APBD maka dapat dilakukan perubahan APBD. Pasal 316 ayat 2 Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Syarat dan kondisi dalam melakukan perubahan APBD yaitu apabila terjadi (a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, (b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, (c) keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, (d) keadaan darurat; dan/atau (e) keadaan luar biasa.

Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan APBD salah satunya adalah Penyusunan dokumen RKPD perubahan. Hal ini diuraikan pada penjelasan pasal 245 ayat (1) Undang - Undang 23 tahun 2014 bahwa untuk evaluasi terhadap rancangan Peraturan daerah tentang perubahan APBD harus dilampiri dengan dokumen perubahan RKPD provinsi. Dengan demikian maka dokumen RKPD perubahan sangat penting dalam proses penetapan perubahan APBD.

Perubahan RKPD memuat pendahuluan yang menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah. Kemudian dokumen ini juga memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD penetapan sampai dengan Triwulan II 2016. Selanjutnya dokumen ini juga menguraikan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD yang pada prinsipnya menguraikan tentang kegiatan lanjutan, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

Perubahan RKPD tahun 2016 secara substansi sama dengan RKPD tahun 2016. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja pemerintah (RKP) tahun 2016 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 dengan Visi sebagai berikut:

"JAKARTA BARU, KOTA MODERN YANG TERTATA RAPI, MENJADI TEMPAT HUNIAN YANG LAYAK DAN MANUSIAWI, MEMILIKI MASYARAKAT YANG BERKEBUDAYAAN, DAN DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK".

Dokumen RKPD perubahan 2016 ini disusun dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan riil rakyat. Selain itu, dokumen RKPD perubahan ini juga mempedomani ketentuan perundangan yang berlaku serta mengakomodasi kebijakan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, dokumen RKPD perubahan ini dapat menjamin konsistensi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan antara Pemerintah Daerah dengan pelaku pembangunan lainnya. Hal yang penting lainnya adalah bahwa RKPD perubahan ini juga diharapkan dapat menjaga kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Perubahan RKPD tahun 2016 adalah membuat pedoman untuk penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P). Selanjutnya, setelah disepakati dokumen PPAS Perubahan digunakan sebagai pedoman penyusunan RKA SKPD yang kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2016.

Sedangkan penyusunan dokumen RKPD perubahan tahun 2016 ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Menyusun pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun 2016 dan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD tahun 2016.
- b. Menyusun pedoman yang akan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2016.
- c. Mewujudkan integrasi visi, misi, dan program pada RPJMD 2013 – 2017.
- d. Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan DKI Jakarta dengan kondisi dan dinamika saat ini.
- e. Menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- f. Menyusun perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah untuk APBD perubahan tahun 2016.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017;
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
24. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016.

1.4. Pertimbangan Perubahan

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Pasal 316 ayat 2 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Kemudian, pada pasal 316 ayat (1) menyebutkan

bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi (a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, (b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, (c) keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, (d) keadaan darurat; dan/atau (e) keadaan luar biasa. Hal yang sama juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. keadaan darurat; dan
5. keadaan luar biasa.

Yang dimaksud dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA meliputi perubahan asumsi makro ekonomi yang mengakibatkan perkembangan kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, perubahan proyeksi belanja yang ternyata menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang. Dengan dasar ini maka harus dilakukan perubahan APBD tahun 2016 dan perubahan ini tentu tetap mendasarkan pada peraturan perundangan.

Sejalan dengan kondisi tersebut di atas, hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2016 menunjukkan indikasi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sekarang termasuk dalam hal ini adalah kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Dengan berdasar pada hal tersebut, maka APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2016 perlu dilakukan perubahan.

Secara rinci indikator yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan APBD antara lain:

1. Asumsi ekonomi makro yang ada pada APBD penetapan telah mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan ekonomi regional dan global. Perkembangan Indikator yang tidak sesuai dengan asumsi KUA pada APBD penetapan antara lain adalah: (a) kondisi ekonomi makro menunjukkan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya tingkat inflasi. (b) dengan adanya perubahan dalam asumsi perekonomian makro daerah maka diduga terjadi perubahan pendapatan daerah dari yang telah ditetapkan pada APBD penetapan. Perubahan pendapatan yang mungkin terjadi pada beberapa pos pendapatan. (c) Adanya kebijakan sektoral dan fungsional dari Pemerintah Pusat yang perlu direspon dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah agar terjadi sinkronisasi dan integrasi.
2. Terkait dengan Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja antara lain adalah :

- a. Adanya pergeseran anggaran antar SKPD/UKPD dalam rangka penyesuaian tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD;
 - b. Adanya pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti dengan kegiatan penting lainnya yang bisa dilaksanakan;
 - c. Adanya pergeseran antar jenis belanja berupa perbaikan kode rekening
3. Dengan adanya perubahan target pendapatan, belanja dan pembiayaan maka diperlukan penyesuaian struktur APBD tahun 2016 pada Perubahan APBD tahun 2016.

1.5. Gambaran Perkembangan Asumsi Ekonomi Makro

1.5.1. Pertumbuhan Ekonomi Global

Dalam beberapa tahun terakhir ini, kinerja perekonomian dunia menunjukkan perlambatan dari 3,4 persen di tahun 2012 menjadi 3,1 persen di tahun 2015. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh kinerja ekonomi dari proses pemulihan di negara-negara maju yang belum optimal sejak dilanda krisis pada tahun 2008 dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang yang juga menunjukkan perlambatan sebagai akibat lemahnya aktivitas perdagangan dunia serta rendahnya harga komoditas. Di samping itu, faktor ketidakpastian juga masih membayangi sektor keuangan global karena sebagian negara maju menerapkan kebijakan stimulus (*quantitative easing*) sedangkan yang lain menerapkan kebijakan ekonomi ketat.

Berdasarkan rilis outlook perekonomian dunia oleh Bank Indonesia per bulan Mei 2016, perekonomian global pada tahun ini diperkirakan tumbuh 3,1 persen atau sama dengan realisasi pada tahun 2015. Meskipun demikian, perkiraan ini masih lebih rendah dibandingkan perkiraan bulan April 2016 oleh *World Economic Outlook (WEO)*, yaitu sebesar 3,2 persen. Untuk perekonomian Amerika Serikat diproyeksikan menurun dari 2,5 persen pada tahun 2015 menjadi 2,0 persen pada tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat ini masih menghadapi sejumlah risiko terkait dengan perkembangan ekonomi global dan domestik. Namun demikian, momentum positif ekonomi Amerika Serikat diperkirakan masih terus berlanjut, dengan didukung perbaikan pada sejumlah indikator ekonomi, antara lain tingkat pengangguran yang menurun, inflasi yang rendah dan indeks manufaktur maupun indeks produksi industri yang menunjukkan tren meningkat.

Sementara itu, sebagaimana dikutip dari Nota Keuangan RAPBN-P tahun 2016, perekonomian kawasan Eropa di tahun 2016 diperkirakan tumbuh sebesar 1,5 persen. Perkembangan positif tersebut tidak lepas dari makin membaiknya kinerja ekonomi negara-negara besar di Eropa seperti Jerman, Perancis, Italia dan Spanyol. Saat ini, kawasan Eropa masih menghadapi risiko deflasi. Selain deflasi, kawasan Eropa masih menghadapi beberapa risiko lain seperti perlambatan pertumbuhan produktivitas dan peningkatan defisit fiskal di tengah rasio utang terhadap PDB yang tinggi dan risiko yang bersumber dari pasar keuangan global yaitu dari kenaikan FFR dan BREXIT dimana berpotensi memperburuk perekonomian Inggris dan Eropa. Lebih lanjut untuk perekonomian Jepang cenderung serupa dengan

Eropa yaitu masih bertumpu pada kebijakan moneter longgar melalui pemberian stimulus (*quantitative easing*) dan penerapan suku bunga negatif. Jepang masih menghadapi sejumlah risiko ekonomi antara lain pertumbuhan produk industri dan pertumbuhan penjualan eceran yang rendah dan tingkat inflasi yang juga rendah. Penerapan suku bunga negatif diharapkan dapat mendorong perekonomian dan mencegah terjadinya deflasi yang berkepanjangan di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi Jepang di tahun 2016 diperkirakan sebesar 0,5 persen.

Dinamika perekonomian yang berkembang di negara maju akan memberikan kontribusi terhadap perekonomian berkembang. Pelemahan ekonomi global telah memukul ekonomi Tiongkok sebagai negara yang bergantung pada ekspor. Ini terlihat dari proyeksi outlook perekonomian Tiongkok Tahun 2016 pada bulan Mei yang sebesar 6,5 persen atau 0,4 persen lebih rendah dibandingkan realisasi tahun lalu. Untuk menyikapi kondisi global yang kurang kondusif, pemerintah Tiongkok mengambil langkah untuk menyeimbangkan sumber pertumbuhan tidak hanya dari investasi dan ekspor, tetap juga konsumsi rumah tangga (*rebalancing*). Rentannya pertumbuhan ekonomi Tiongkok, berpotensi semakin menurunkan pertumbuhan ekonomi global. berikut gambaran proyeksi perekonomian global tahun 2016 terlihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Outlook Perekonomian Dunia

Negara	2014	2015	Proyeksi 2016
			Mei 2016
Dunia	3,4	3,1	3,1
Amerika	2,4	2,5	2,0
Eropa	0,9	1,5	1,5
Jepang	0,0	0,6	0,5
Tiongkok	7,3	6,9	6,5
India	7,3	7,3	7,5

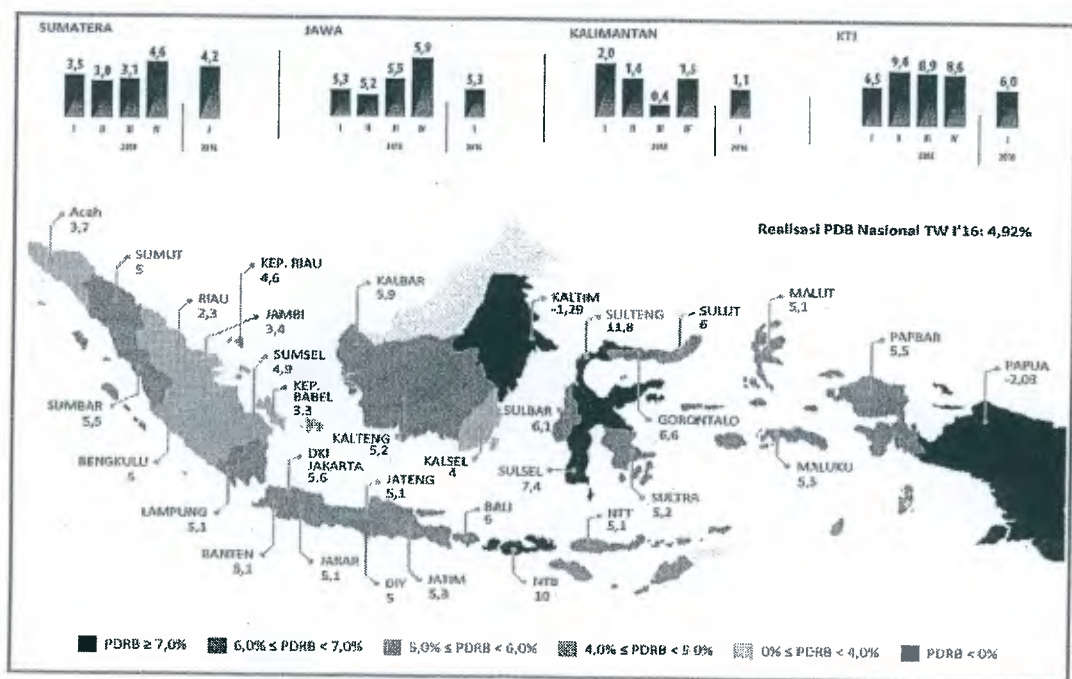
Sumber: Bank Indonesia, 2016

Senada dengan kebijakan Tiongkok, Reserve Bank of India (RBI) juga memangkas suku bunga acuan. Per Maret 2016, suku bunga acuan di India berada di level 6,75 persen, jauh lebih rendah di banding posisi pada akhir 2012 yang tercatat 8 persen. Namun berbeda dengan Tiongkok, perekonomian India pada tahun 2016 diproyeksikan 7,5 persen atau lebih tinggi dari realisasi tahun 2015 yang sebesar 7,3 persen.

Berdasarkan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi DKI Jakarta oleh Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2016 mengalami penurunan/kontraksi sebesar 0,34 persen dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2015 (q on q). Dari sisi produksi, kondisi tersebut disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan usaha. kemudian pada triwulan I 2016, ekonomi nasional tercatat pula tumbuh 4,92% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy). Lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2016 disebabkan oleh terbatasnya pertumbuhan konsumsi

Pemerintah dan investasi. Pelemahan konsumsi Pemerintah dipengaruhi oleh pola musiman belanja Pemerintah pada awal tahun yang masih relatif terbatas. Sementara itu, perilaku investor swasta yang masih cenderung menunggu (*wait and see*) berdampak pada masih lemahnya kegiatan investasi, di tengah upaya untuk mempercepat proyek proyek infrastruktur pemerintah. Konsumsi rumah tangga (RT) masih tumbuh kuat didukung oleh perkembangan harga yang terjaga. Dari sisi eksternal, sejalan dengan kinerja ekspor beberapa komoditas yang mulai menunjukkan perbaikan, kinerja ekspor secara keseluruhan juga mengalami perbaikan, meskipun masih mengalami fase kontraksi.

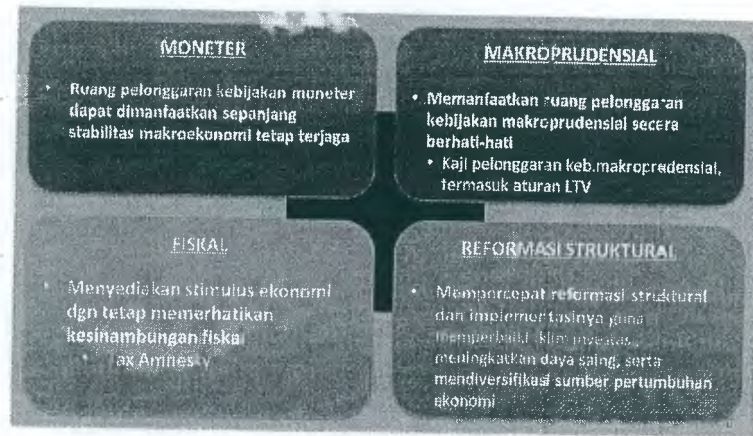
Secara spasial, kinerja ekonomi daerah pada triwulan I 2016 mencatat pertumbuhan yang melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terutama akibat perlambatan ekonomi Jawa. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah jumlah provinsi yang mengalami perlambatan ekonomi semakin banyak dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Masih lemahnya permintaan dunia dan harga komoditas global menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, permintaan domestik juga masih lemah sehingga kinerja sektor industri pengolahan tercatat menurun di hampir seluruh wilayah, kecuali wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Di Jawa, perlambatan juga diakibatkan oleh menurunnya kinerja jasa keuangan dan bangunan. Sementara itu, perlambatan di wilayah Sumatera diakibatkan oleh penurunan kinerja sektor pertanian dan di wilayah Kalimantan serta KTI akibat melemahnya sektor pertambangan. Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara mendalam ditunjukkan pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan I 2016
 Sumber: Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi DKI Jakarta oleh Bank Indonesia, 2016

Secara keseluruhan, perekonomian nasional pada perubahan tahun 2016 masih dalam kondisi cukup stabil diproyeksikan berada kisaran 5,0-5,4 persen, lebih

rendah dengan proyeksi pada penetapan tahun 2016 yang sebesar 5,5 persen. Lebih lanjut, dalam rangka upaya memberikan stimulus perekonomian, maka dirumuskan beberapa paket arah kebijakan diantaranya Koordinasi kebijakan moneter-fiskal-struktural untuk menciptakan "*policy space*" guna meningkatkan permintaan domestik ke depan. Berikut gambaran kebijakan yang perlu dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian.



Gambar 1.2 Bauran Kebijakan tahun 2016

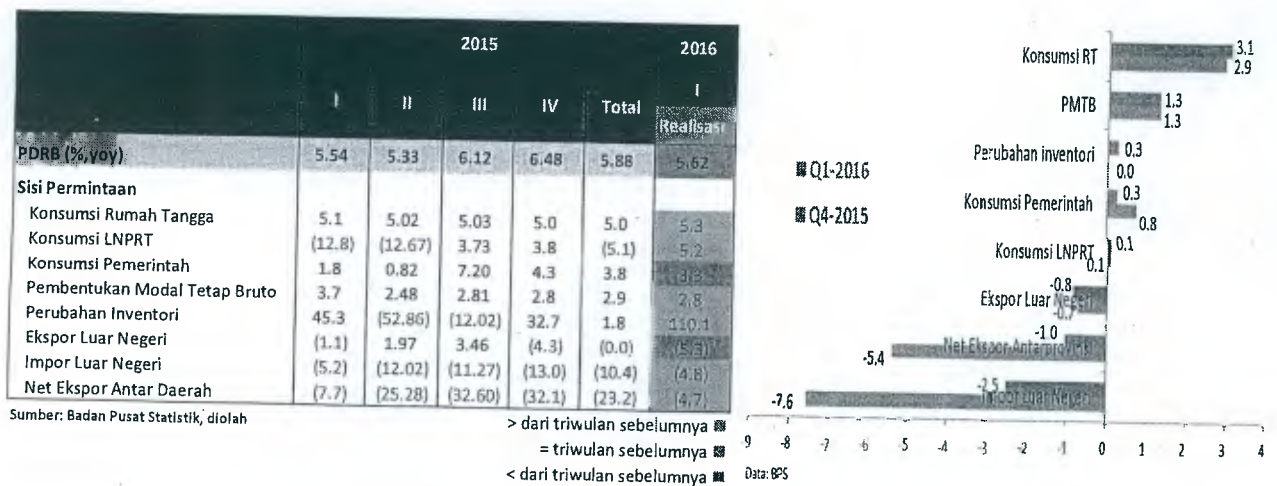
Sumber: Bank Indonesia, 2016

Berdasarkan hasil perkembangan laju perekonomian triwulan I tahun 2016, ditambah dengan rumusan kebijakan perekonomian yang aplikatif, maka Pertumbuhan ekonomi Nasional diperkirakan meningkat. Tentunya upaya ini perlu didukung oleh optimalisasi stimulus fiskal pusat/daerah khususnya terkait percepatan pembangunan proyek infrastruktur, percepatan implementasi paket kebijakan pemerintah, serta pelonggaran kebijakan moneter.

Perekonomian DKI Jakarta dalam perjalanannya hingga pada triwulan I 2016 tumbuh 5,62 persen (yoy) atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yaitu 6,48 persen (yoy). Meskipun demikian, angka pertumbuhan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 5,54 persen (yoy).

Dari sisi pengeluaran, melambatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh rendahnya konsumsi pemerintah. Melemahnya kinerja belanja pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga berkontribusi pada penurunan pertumbuhan konsumsi pemerintah, meskipun serapan belanja APBD DKI Jakarta pada triwulan I 2016 cukup baik. Terbatasnya konsumsi pemerintah pusat memengaruhi kinerja konsumsi di Provinsi DKI Jakarta terkait besarnya kontribusi belanja Kementerian dan Lembaga yang ada di Jakarta.

Selanjutnya beberapa hal yang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta diantaranya optimisme konsumen yang semakin kuat dengan peningkatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan ini. Kondisi tersebut didorong oleh beberapa stimulus antara lain kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta, penurunan *administered prices* berupa harga BBM dan tarif listrik serta penyesuaian batas minimum Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).



Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi dari sisi Pengeluaran (kiri) dan Kontribusi masing – masing sektor (kanan) Triwulan 1 tahun 2016

Sumber: Bank Indonesia, 2016

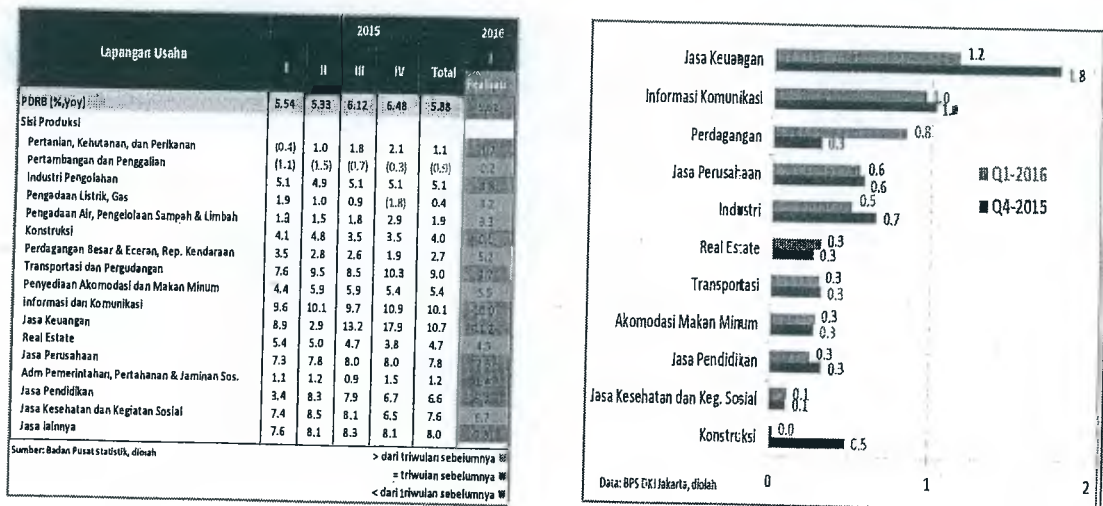
Secara mendalam, Dari sisi APBD, perbaikan kinerja keuangan dan serapan belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada triwulan I 2016 mendorong pertumbuhan komponen konsumsi pemerintah lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Perbaikan tersebut didorong oleh proses pengesahan APBD yang telah dilakukan sejak akhir tahun 2015, sehingga proses lelang proyek-proyek strategis dan belanja pemerintah dapat dimulai lebih dini dan mampu meningkatkan realisasi penyerapan hingga melampaui capaian penyerapan pada triwulan I 2015.



Gambar 1.4 Realisasi Belanja Triwulan 1 APBD DKI Jakarta tahun 2016

Sumber: BPKAD Provinsi DKI Jakarta diolah oleh Bank Indonesia, 2016

Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi (menurut lapangan usaha) teridentifikasi bahwa Struktur perekonomian Jakarta menurut Lapangan Usaha (LU) pada triwulan I 2016 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama, yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; industri pengolahan, konstruksi, dan jasa keuangan. Selanjutnya dari sisi pertumbuhan, diketahui bahwa kinerja beberapa lapangan usaha utama tumbuh lebih rendah, diantaranya sektor industri pengolahan, konstruksi, dan jasa keuangan. Sebaliknya, sektor perdagangan pada triwulan I 2016 tumbuh meningkat sejalan dengan meningkatnya aktivitas konsumsi rumah tangga.



Gambar 1.5 Pertumbuhan Ekonomi menurut lapangan usaha (kiri) dan Kontribusi masing – masing sektor (kanan) Triwulan 1 tahun 2016
 Sumber: Bank Indonesia, 2016

Capaian pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang melemah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya turut berdampak kepada perkembangan stabilitas keuangan daerah, khususnya terhadap kinerja sektor korporasi. Kinerja korporasi mengalami perlambatan yang dicerminkan oleh turunnya nilai saldo bersih tertimbang pada survei kegiatan dunia usaha (SKDU) Bank Indonesia dan beberapa rasio keuangan utama. Pada akhirnya hal ini juga berdampak pada menurunnya penyaluran kredit korporasi, dan menurunnya kualitas kredit yang tercermin dari meningkatnya non-performing loan (NPL).

Sejalan dengan kondisi stabilitas keuangan daerah, perekonomian domestik yang masih belum sepenuhnya pulih menyebabkan peredaran uang kartal di masyarakat tidak setinggi periode sebelumnya. Hal ini membuat transaksi tunai di DKI Jakarta pada triwulan laporan berada pada posisi net inflow, atau dengan kata lain jumlah penyetoran uang tunai lebih banyak dibandingkan dengan penarikan. Relatif tidak adanya hari raya/hari besar keagamaan dan libur panjang pada triwulan laporan menyebabkan kebutuhan uang tunai di masyarakat tidak setinggi periode akhir tahun 2015 yang memiliki banyak hari besar keagamaan dan hari libur/cuti bersama. Hal tersebut juga menyebabkan penurunan transaksi pada sistem kliring nasional (SKN).

Lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2016 juga disebabkan oleh terbatasnya pertumbuhan konsumsi Pemerintah dan investasi. Pelemahan konsumsi Pemerintah dipengaruhi oleh pola musiman belanja Pemerintah pada awal tahun yang masih relatif terbatas. Sementara itu, perilaku investor swasta yang masih cenderung menunggu (wait and see) berdampak pada masih lemahnya kegiatan investasi, di tengah upaya untuk mempercepat proyek proyek infrastruktur pemerintah.

Untuk prospek investasi di tahun 2016, Investasi bangunan terindikasi meningkat sejalan dengan meningkatnya realisasi pembangunan berbagai proyek infrastruktur strategis di Jakarta. Beberapa proyek tersebut di antaranya pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), sarana dan prasarana Asian Games 2018, Fly Over Semanggi, Terminal Peti Kemas Kalibaru (New Priok) dan pembangunan jalan tol di sekitar Jakarta (akses Priok, jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu). Selain itu, investasi bangunan dari swasta mulai meningkat pasca pelonggaran *loan to value* (LTV) sektor properti dan menurunnya suku bunga perbankan. Meningkatnya investasi juga didorong oleh penerapan paket kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat di antaranya kebijakan kemudahan dalam melakukan usaha. Selain dari Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Jakarta juga aktif dalam mendorong kemudahan berinvestasi di Jakarta melalui Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). Kemudahan itu antara lain melalui layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), pembebasan biaya untuk pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan jasa arsitek.

Berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor baik kondisi ekonomi global maupun nasional serta masih terjaganya momentum perbaikan ekonomi ke depan, perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2016 diperkirakan akan tumbuh di kisaran 6,0 - 6,4 persen (yoy). Proyeksi ini lebih tinggi dari proyeksi pada penetapan APBD 2016 yang sebesar 5,4 - 5,8 persen. Dorongan pertumbuhan diperkirakan berasal dari peningkatan permintaan domestik, seiring dengan semakin membaiknya kinerja belanja Pemerintah, kelanjutan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur strategis, beberapa stimulus fiskal yang dapat meningkatkan kemampuan belanja rumah tangga, serta persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Sementara itu, masih lemahnya pemulihan perekonomian global belum dapat meningkatkan andil kinerja ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta. Lebih lanjut, Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh membaik seiring masih meningkatnya ekspektasi konsumen dan dorongan konsumsi. Konsumsi Pemerintah diperkirakan meningkat seiring dengan rencana pemberian THR dan gaji ke-13 untuk PNS. Secara mendalam, berikut terlampir tabel Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dari sisi pengeluaran/pemintaan :

Tabel 1.2 Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dari Sisi Pengeluaran

	2015					2016		
	I	II	III	IV	Total	I	II	Total-p
PDRB (% yoy)	5,5	5,3	6,1	4,5	5,9	5,82	6,0-6,4	6,0-6,4
Sisi Permintaan								
Konsumsi Rumah Tangga	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,3	5,1-5,5	5,1-5,5
Konsumsi LN PRT	(12,8)	(12,7)	3,7	3,8	(5,1)	5,2	5,1-5,5	5,5-5,9
Konsumsi Pemerintah	1,8	0,8	7,2	4,3	3,8	3,3	4,2-4,6	3,9-4,3
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,7	2,5	2,8	2,8	2,9	2,8	2,8-3,2	2,9-3,3
Penambahan Inventori	45,3	(52,9)	(12,0)	32,7	1,8	110,1	5,5-15,5	30,6-40,6
Ekspor Luar Negeri	(1,1)	2,0	3,5	(4,3)	(0,0)	(5,3)	(4,0)-(2,0)	(4,4)-(3,4)
Impor Luar Negeri	(5,2)	(12,0)	(11,3)	(13,0)	(10,4)	(4,8)	(5,3)-(4,3)	(5,1)-(4,1)
Net Ekspor Antar Daerah	(2,7)	(25,3)	(32,6)	(32,1)	(23,2)	(4,7)	(5,0)-(2,0)	(5,1)-(3,1)

Sumber: Bank Indonesia, 2016

Untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi hingga akhir tahun 2016 (menurut lapangan usaha), secara mendalam digambarkan pada tabel realisasi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta dari sisi produksi berikut :

Tabel 1.3 Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dari sisi Produksi

Lapangan Usaha	2015					2016		
	I	II	III	IV	Total	I	II	Total-p
PDRB (% yoy)	5,54	5,33	6,12	6,40	5,58	5,62	6,8-6,4	6,8-6,4
Sisi Produksi								
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(0,4)	1,0	1,0	2,1	1,1	1,7	1,0-1,4	1,1-1,5
Pertambangan dan Pengalihan	(1,1)	(1,5)	(0,7)	(0,3)	(0,9)	0,2	0,0-0,4	(0,1)-0,3
Industri Pengolahan	5,1	4,9	5,1	5,1	5,1	3,1	3,9-4,3	3,9-4,3
Pengadaan Listrik, Gas	1,0	1,0	0,9	(1,0)	3,4	3,2	3,2-3,6	3,2-3,9
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah & Limbah	1,3	1,5	1,8	2,9	1,9	3,3	3,2-3,6	3,6-4,0
Konstruksi	4,1	4,8	3,5	3,5	4,0	0,1	1,7-2,1	2,0-2,4
Perdagangan Besar & Eceran, Rep. Kendaraan	3,5	2,8	2,1	1,9	2,7	5,2	5,3-5,7	5,2-5,6
Transportasi dan Pergudangan	7,6	9,5	8,5	10,3	9,0	9,7	10,6-11,0	10,4-10,8
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,4	5,9	5,9	5,4	5,4	5,9	5,8-6,2	5,7-6,1
Informasi dan Komunikasi	9,6	10,1	9,7	10,9	16,1	10,0	10,7-11,1	10,2-10,6
Jasa Keuangan	8,9	2,9	13,2	17,9	16,7	11,1	10,1-10,5	9,7-10,1
Real Estate	5,4	5,0	4,7	3,8	4,7	4,5	4,8-5,2	5,1-5,5
Jasa Penunahan	7,2	7,8	8,0	8,0	7,8	7,5	7,7-8,1	7,8-8,2
Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sos.	1,1	1,2	0,9	1,5	1,2	1,4	2,9-3,3	2,0-2,4
Jasa Pendidikan	3,4	8,3	7,9	6,7	6,6	3,2	5,7-6,1	6,0-6,4
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,4	8,5	8,1	6,5	7,6	6,7	7,0-7,4	7,0-7,4
Jasa lainnya	7,6	8,1	8,3	8,1	8,0	7,8	7,9-8,3	8,1-8,5

Sumber: Bank Indonesia, 2016

Berdasarkan tabel di atas, proyeksi pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi hingga akhir tahun 2016 (menurut lapangan usaha) dapat dideskripsikan sebagai berikut :

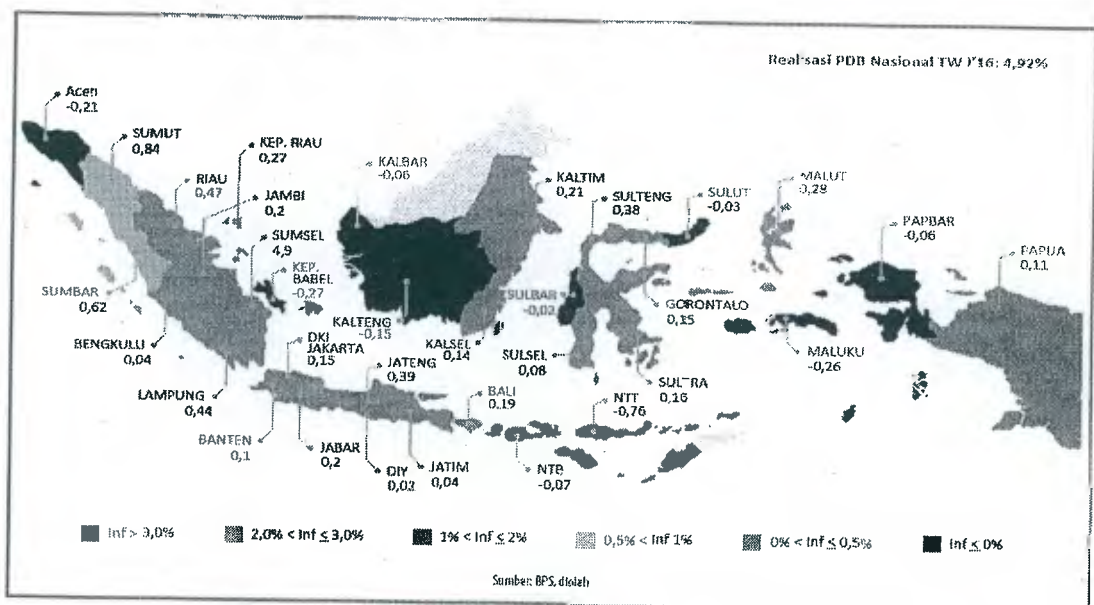
- Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran akan tumbuh lebih tinggi, didorong oleh membaiknya daya beli masyarakat dan aktivitas konsumsi pada bulan puasa;
- Lapangan usaha konstruksi diperkirakan tumbuh lebih tinggi, seiring membaiknya realisasi pembangunan proyek infrastruktur pemerintah dan pembangunan properti oleh swasta;
- Pertumbuhan Lapangan usaha industri juga tumbuh membaik terutama sublapangan usaha yang memproduksi barang konsumsi;
- Kinerja Lapangan usaha transportasi dan pergudangan terutama transportasi udara terindikasi terus meningkat, seiring bertambahnya maskapai penerbangan yang beroperasi dari Bandara Halim Perdana Kusuma; kemudian
- Lapangan usaha Jasa Keuangan diprakirakan tumbuh terbatas, seiring dengan masih lemahnya pertumbuhan kredit.

1.5.2. Laju Inflasi

Hingga akhir tahun 2015, laju inflasi nasional mencapai 3,35 persen. Relatif rendah dan stabilnya inflasi tersebut didukung oleh rendahnya inflasi komponen Inti (*Core inflation*) serta terjaganya komponen Harga Diatur Pemerintah (*Administered Prices*) dan inflasi komponen Bergejolak pada level yang terkendali. Pelemahan kondisi perekonomian global turut mendukung rendahnya laju inflasi

komponen Inti pada tahun 2015 berada pada level 3,95 persen (yoy), lebih rendah dari tahun 2014 yang mencapai 4,93 persen (yoy).

Secara spasial, kinerja ekonomi daerah pada triwulan I 2016 mencatat pertumbuhan yang melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terutama akibat perlambatan ekonomi Jawa. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah jumlah provinsi yang mengalami perlambatan ekonomi semakin banyak dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Masih lemahnya permintaan dunia dan harga komoditas global menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, permintaan domestik juga masih lemah sehingga kinerja sektor industri pengolahan tercatat menurun di hampir seluruh wilayah, kecuali wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Di Jawa, perlambatan juga diakibatkan oleh menurunnya kinerja jasa keuangan dan bangunan.



Gambar 1.6 Sebaran Inflasi Daerah Triwulan I 2016

Sumber: Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi DKI Jakarta oleh Bank Indonesia, 2016

Inflasi yang relatif rendah dan stabil di tahun 2015 menjadi salah satu modal dalam pengendalian laju inflasi di tahun 2016. Hingga bulan Mei tahun 2016, laju inflasi mencapai 0,24 persen (mtm) atau 3,33 persen (yoy), masih lebih rendah dibandingkan dengan historis rata-rata lima tahun terakhir yang sebesar 1,02 persen (ytd) atau 5,48 persen (yoy).

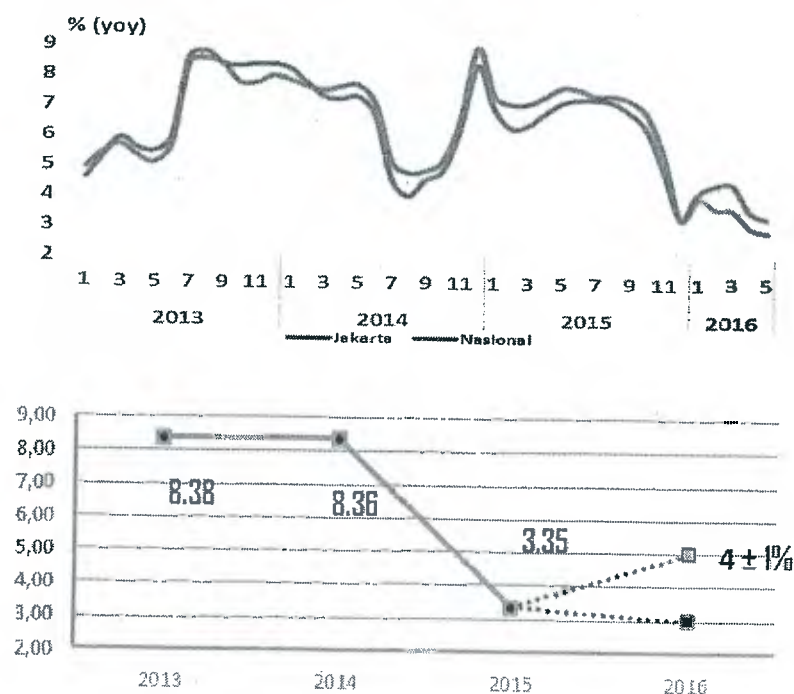
Tabel 1.4. Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Nasional tahun 2016

No	Kelompok Pengeluaran	Inflasi hingga Mei 2016 (m to m)	Laju Inflasi (q to q)	Laju Inflasi (y on y)
1	Bahan makanan	-0,30	1,64	7,75
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	0,58	2,45	6,13
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas, & Bahan Bakar	0,02	-0,11	1,26

No	Kelompok Pengeluaran	Inflasi hingga Mei 2016 (m to m)	Laju Inflasi (q to q)	Laju Inflasi (y on y)
4	Sandang	0,44	2,13	3,80
5	Kesehatan	0,27	1,51	4,37
6	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	0,03	0,29	3,63
7	Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,21	-2,84	-1,50
Umum		0,24	0,40	3,33

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Laju inflasi sampai dengan Mei 2016 masih terkendali dan di akhir tahun diperkirakan masih terjaga pada kisaran yang ditargetkan. Kondisi tersebut sebagaimana diketahui terutama disumbang *volatile foods* dan *administered prices*. Laju inflasi sepanjang tahun 2016 akan terpengaruh oleh perkembangan ekonomi global dan tren pelemahan harga komoditas terutama energi. Sementara itu, dari sisi domestik, pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur akan menjadi tumpuan dalam upaya peningkatan produksi serta dukungan konektivitas dan kelancaran arus distribusi. Sehingga laju inflasi Nasional sepanjang tahun 2016 diperkirakan sebesar 4,0 persen, sesuai dengan sasaran inflasi $4,0 \pm 1$ persen, lebih rendah dibandingkan asumsi dalam APBN tahun 2016 yang ditetapkan sebesar 4,7 persen. Lebih lanjut realisasi inflasi nasional mulai tahun 2013 serta proyeksi inflasi perubahan tahun 2016 adalah sebagai berikut.



Gambar 1.7 Realisasi Inflasi Nasional Mulai Tahun 2013 Serta Proyeksi Inflasi Perubahan Tahun 2016

Sumber: Bank Indonesia, 2016

Berlanjut ke tingkat provinsi, untuk DKI Jakarta pada bulan Mei tahun 2016 tercatat mengalami inflasi. Perkembangan harga-harga pada bulan Mei 2016

membawa Jakarta mengalami inflasi sebesar 0,19 persen (mtm), setelah pada bulan April 2016 mengalami deflasi. Inflasi DKI Jakarta pada bulan Mei 2016 dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat akan beberapa komoditas pangan dan makanan jadi. Pencapaian inflasi Jakarta pada Mei 2016 sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pada 5 tahun yang sebesar 0,12 persen (mtm).

Inflasi Jakarta hingga bulan Mei 2016 tercatat sebesar 2,90 persen (yoy), lebih rendah dari rata-rata inflasi pada periode yang sama selama lima tahun terakhir sebesar 6,13 persen (yoy) dan lebih rendah dibandingkan dengan capaian inflasi nasional sebesar 4,45 persen (yoy). Beberapa hal yang berkontribusi terhadap rendahnya capaian inflasi DKI Jakarta meliputi kebijakan pemerintah di bidang energi melalui penurunan harga komoditas energi, sebagai respons terhadap perkembangan harga minyak internasional yang masih rendah, tren pergerakan inflasi serta nilai tukar rupiah yang lebih terkendali turut berperan terhadap rendahnya tekanan inflasi Jakarta hingga triwulan I 2016. Pada periode laporan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, dan tarif listrik. Dampak dari kebijakan tersebut terlihat dari penurunan indeks harga bensin, tarif listrik dan transportasi yang cukup signifikan.

Fenomena banjir yang kerap terjadi pada awal tahun telah diantisipasi melalui berbagai program normalisasi sungai dan pengerukan sungai yang dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai hasilnya, genangan air menjadi cepat kembali surut dan mengurangi permasalahan banjir pada musim hujan pada sebagian besar wilayah di DKI Jakarta. Dengan demikian permasalahan distribusi pangan kala musim hujan triwulan I 2016 umumnya dapat diatasi. Dengan berbagai perkembangan yang ada, inflasi Jakarta triwulan I 2016 dapat tetap terkendali.

Selain perbaikan infrastruktur, relatif rendahnya inflasi pada triwulan I juga didukung oleh perbaikan manajemen stok pangan. Salah satu upaya untuk menjaga pasokan pangan, Pemprov DKI melibatkan BUMD yang bergerak di bidang pangan. Terkait pengamanan pasokan beras, PT Food Station Tjipinang Jaya dan Bulog melakukan kerja sama dalam penyediaan *standby stock* beras sebanyak 75.000 ton yang telah dilakukan sejak tahun sebelumnya. Sebagai dampak dari pengamanan pasokan tersebut, persediaan beras di Jakarta tetap aman, meski pasokan dari daerah sentra beras pada awal triwulan lapcran berkurang karena bergesernya masa panen. Pada awal tahun 2016 kerjasama tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan (*memorandum of understanding/MoU*) yang kedua, untuk melakukan penambahan *standby stock* beras menjadi sebanyak 200.000 ton. Hal ini berpengaruh besar terhadap kestabilan harga beras di Jakarta, yang umumnya sering mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada awal tahun. Rincian lebih lanjut tentang sumbangan kelompok pengeluaran terhadap inflasi DKI Jakarta dapat dilihat pada Tabel 1.5 Berikut.

Tabel 1.5 Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi DKI Jakarta tahun 2016

No	Kelompok Pengeluaran	Inflasi hingga Mei 2016 (m to m)	Laju Inflasi	Laju Inflasi (y on y)
1	Bahan makanan	1,08	2,90	8,62
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	0,20	1,38	5,51
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas, & Bahan Bakar	0,04	-0,47	1,25
4	Sandang	0,12	2,81	5,40
5	Kesehatan	0,20	1,95	4,54
6	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	0,00	0,11	4,01
7	Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,19	-2,91	-2,48
Umum		0,19	0,24	2,90

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2016

Selanjutnya untuk *tracking* perkembangan inflasi Juni 2016, Inflasi diperkirakan akan meningkat meskipun masih relatif terkendali. Kondisi didorong oleh meningkatnya permintaan akan komoditas pangan dan makanan jadi sehingga mengakibatkan peningkatan harga. Kemudian disisi lain, tarif listrik yang naik pada awal Juni 2016 juga akan menyumbang kenaikan atas inflasi. *Tracking* secara lebih rinci ditunjukkan asesmen berikut ini :

- Inflasi dipicu oleh kenaikan harga pangan dan makanan jadi;
- Komoditas pangan yang naik cukup tinggi adalah daging ayam ras serta telur ayam ras seiring kenaikan permintaan;
- Produksi kue yang meningkat sebagai persiapan Idul Fitri juga menjadi penyebab naiknya harga gula;
- Harga beras cenderung stabil seiring masih dalam masa panen raya;
- Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan tarif listrik pada 12 golongan non subsidi akan turut meningkatkan laju inflasi;
- Harga bumbu-bumbuan relatif stabil dengan kecenderungan menurun.

Kemudian untuk *tracking* inflasi hingga triwulan 2 tahun 2016 diperkirakan pada kisaran 2,50 – 3,00 persen (batas atas) dengan rincian asesmen sebagai berikut :

- Harga emas perhiasan cenderung naik sampai Idul Fitri 2016 seiring meningkatnya permintaan, dan juga harga emas dunia yang masih tinggi;
- Harga bahan pangan cenderung meningkat karena faktor musiman, seiring masuknya bulan puasa dan persiapan Idul Fitri 2016;
- Tarif transportasi juga akan meningkat, utamanya angkutan udara dan antarkota, seiring masa mudik dan libur sekolah;
- Penurunan harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi akan menahan laju inflasi administered prices dan inflasi secara keseluruhan;
- Beras masih dalam masa panen sehingga pasokan mencukupi sampai dengan hari raya Idul Fitri.

Secara menyeluruh untuk faktor resiko inflasi pada tahun 2016, terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian dan akan mempengaruhi harga yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

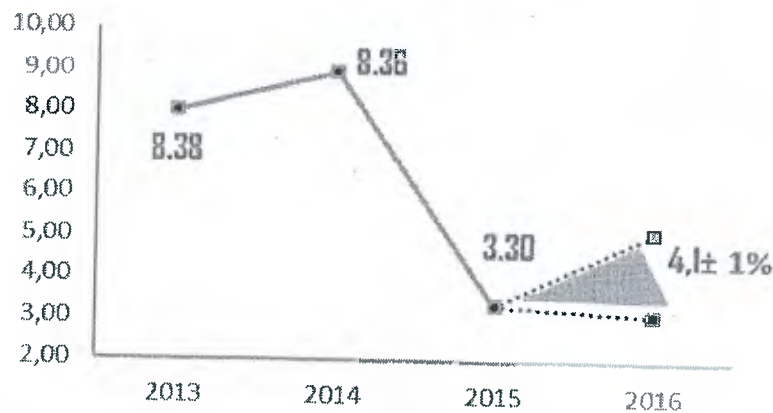
Tabel 1.6 Faktor Resiko Inflasi Tahun 2016

JENIS	FAKTOR RESIKO TAHUN 2016	POTENSI DAMPAK TERHADAP IHK
<i>Volatile Food</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potensi meningkatnya curah hujan yang berkepanjangan akibat La-Nina masih harus tetap diwaspadai karena akan berdampak pada produksi pangan kelompok bumbu-bumbuan ▪ Pergeseran musim tanam berdampak pada pergeseran panen dan berujung pada meningkatnya stok setelah triwulan I 2016 ▪ Harga daging sapi yang stabil tinggi semenjak akhir tahun lalu akan diantisipasi dengan menambah pasokan melalui jalur impor. ▪ Harga beras cenderung lebih stabil sebagai dampak dari panen raya pada triwulan II 2016 serta MoU standby stock beras antara PT Food Station Tjipinang Jaya dengan Bulog Divre Jakarta sebanyak 200.000 ton. 	RENDAH
<i>Adm. Prices</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Harga minyak internasional diperkirakan masih berada di level yang rendah. ▪ Penyesuaian harga komoditas energi dan transportasi 	RENDAH
<i>Core</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelemahan Rupiah yang terjadi pada tahun 2015 tidak sepenuhnya ditransmisikan kedalam harga barang dan jasa yang memiliki konten impor. ▪ Aktivitas ekonomi yang lebih tinggi dari triwulan sebelumnya akan meningkatkan daya beli masyarakat yang berujung pada meningkatnya tingkat permintaan. ▪ Fluktuasi harga emas internasional yang berpengaruh pada harga emas perhiasan. 	RENDAH

Sumber: Bank Indonesia, 2016

Berdasarkan hasil analisa realisasi Inflasi DKI Jakarta hingga bulan Mei 2016, maka proyeksi **Inflasi DKI Jakarta** pada perubahan tahun 2016 diperkirakan akan terjaga yaitu pada kisaran **4,1 ± 1%** atau relatif lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi pada penetapan 2016 yang sebesar 4,5 – 4,9 persen. Perkiraan inflasi tersebut tetap akan mendukung target pencapaian sasaran inflasi nasional yang berada pada kisaran 4% ± 1% (yoy).

Sejumlah risiko yang berpotensi memberikan tekanan pada inflasi tetap perlu mendapat perhatian, terutama bersumber dari kelompok *volatile food*. Fenomena El-Nino yang mulai terjadi pada tahun 2015 berdampak pada pergeseran masa tanam dan panen, sehingga menimbulkan risiko berkurangnya pasokan bahan pangan domestik. Namun, harga komoditas internasional serta harga minyak dunia yang diperkirakan masih bertahan di level yang cukup rendah berpotensi menurunkan tekanan inflasi dari berbagai komoditas seperti BBM dan tarif tenaga listrik (TTL) yang menjadi faktor penahan laju inflasi tahun 2016.



Gambar 1.8 Realisasi Inflasi DKI Jakarta Mulai Tahun 2013 Serta Proyeksi Inflasi Perubahan Tahun 2016

Sumber: Bank Indonesia, 2016

1.5.3. Nilai Tukar Rupiah

Pada tahun 2015 nilai tukar rupiah terdepresiasi ke level rata-rata Rp13.392 per dolar AS. Dari sisi eksternal, isu kebijakan kenaikan suku bunga *the Fed* serta devaluasi yuan oleh Pemerintah Tiongkok menjadi penyebab utama yang berpengaruh terhadap aliran modal yang masuk ke negara-negara *emerging market* termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan tekanan terhadap nilai tukar menjadi semakin besar. Dari sisi domestik, beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan terhadap rupiah diantaranya terkait dengan upaya perbaikan kinerja dari transaksi berjalan, serta tren penurunan pertumbuhan ekonomi sebagai imbas perlambatan ekonomi dunia turut memberi tekanan. Di awal tahun 2016, dinamika rupiah dipengaruhi oleh sentimen pasar terkait dengan suku bunga acuan *the Fed*, kebijakan suku bunga negatif ECB dan BoJ, relatif rendahnya tingkat inflasi, serta meningkatnya minat investor seiring dengan membaiknya proyeksi perekonomian domestik.

Sementara itu, faktor positif lain dari sisi domestik seperti penurunan suku bunga acuan BI, perbaikan kinerja transaksi berjalan, inflasi yang rendah serta membaiknya perekonomian diharapkan mampu menjaga stabilisasi dan meredam depresiasi nilai tukar rupiah. Namun demikian, pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2016 masih menghadapi beberapa risiko eksternal seperti potensi kenaikan suku bunga *the Fed* pada semester kedua, pelonggaran likuiditas di kawasan Eropa dan Jepang, serta pengaruh moderasi pasar keuangan Tiongkok. Dengan mempertimbangkan kondisi terkini dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan, maka **nilai tukar rupiah terhadap dolar AS** pada perubahan tahun

2016 diperkirakan bergerak pada kisaran **Rp 13.500 per dolar AS**, lebih rendah dibandingkan asumsi nilai tukar dalam APBN tahun 2016 yang ditetapkan sebesar Rp13.900 per dolar AS.

Perbandingan asumsi ekonomi makro penetapan dan perubahan APBD tahun 2016 antara DKI Jakarta dengan APBN dapat dilihat pada Tabel 1.5 sebagai berikut:

Tabel 1.7. Perubahan Asumsi Ekonomi Makro

	2016	
	Penetapan	Rencana Perubahan
Pertumbuhan Ekonomi		
DKI Jakarta	5,4 - 5,8	6,0 - 6,4
Nasional	5,6	5,0 - 5,4
Inflasi		
DKI Jakarta	4,5 - 4,9	4,1±1,0
Nasional	4,4	4,0±1,0
Nilai Tukar Rupiah		
	13.400	13.500

Sumber: Bank Indonesia, 2016

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas, maka secara umum asumsi dasar ekonomi makro DKI Jakarta tahun 2016 mengalami perubahan, seperti terlihat pada Tabel di atas, ya tu:

- Pertumbuhan Ekonomi yang semula ditetapkan sebesar 5,4 - 5,8 persen, berubah menjadi 6,0 - 6,4 persen;
- Inflasi yang semula ditetapkan sebesar 4,5 - 4,9 persen, berubah menjadi 4,1±1,0;
- Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika yang semula ditetapkan sebesar Rp. 13.400,00 menjadi Rp. 13.500,00 per Dollar Amerika.

1.6. Sistematika Dokumen

Dokumen Perubahan RKPd tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan
- (1) Latar Belakang
 - (2) Maksud dan Tujuan
 - (3) Landasan Hukum
 - (4) Pertimbangan Perubahan
 - (5) Gambaran Perkembangan Asumsi Ekonomi Makro

- BAB II Evaluasi Hasil RKPD
(1) Evaluasi Perkembangan Indikator Daerah;
(2) Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015\
(3) Evaluasi APBD 2016 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2016
(4) Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016
- BAB III Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan
RKPD
(1) Kegiatan yang mengalami Penambahan Anggaran;
(2) Kegiatan Baru;
(3) Kegiatan yang Mengalami Pengurangan Anggaran; dan
(4) Kegiatan yang Dimatikan.
- BAB IV Penutup.

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD

Evaluasi pada dasarnya adalah suatu penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Evaluasi penting karena hasil dari suatu evaluasi akan dijadikan dasar dan input untuk proses selanjutnya. Jadi evaluasi pelaksanaan RKPD penetapan tahun 2016 secara prinsip merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun tahun 2016 dan sebagian telah dilaksanakan pada semester I tahun 2016. Proses ini sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar - benar akuntabel dan berkualitas. Hasil dari evaluasi ini akan dijadikan masukan dalam proses perencanaan pada perubahan RKPD tahun 2016.

Secara substansi bahwa RKPD Perubahan ini merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Oleh karena itu perlu disusun secara profesional agar hasilnya berkualitas dan akuntabel. RKPD Perubahan ini disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, *top down*, *bottom up* dan partisipatif dengan demikian RKPD perubahan ini dapat menjadi dokumen Rencana Kerja yang dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Pelaksanaan pembangunan di Jakarta merupakan proses yang melibatkan multi pemangku kepentingan baik dari dunia usaha, pemerintah, masyarakat maupun akademisi. Dengan proses seperti ini semua pihak dapat berkontribusi dalam pembangunan Jakarta secara proporsional. Dengan demikian maka diharapkan pembangunan yang dilakukan di DKI Jakarta benar - benar memenuhi prinsip keterbukaan, demokratis, transparansi, akuntabilitas, efisien, efektif, serta memenuhi azas kepatutan dan kewajaran.

Evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 dapat terwujud. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi. Dengan demikian akan dapat dilihat bahwa beberapa bagian dari RKPD penetapan tahun 2016 perlu dilakukan perubahan.

Selanjutnya, pada bab ini akan disajikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Penetapan tahun 2016. Fokus evaluasi dalam hal ini adalah perkembangan ekonomi makro, evaluasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah termasuk dalam hal ini adalah program dan kegiatan yang telah diuraikan pada RKPD penetapan tahun 2016.

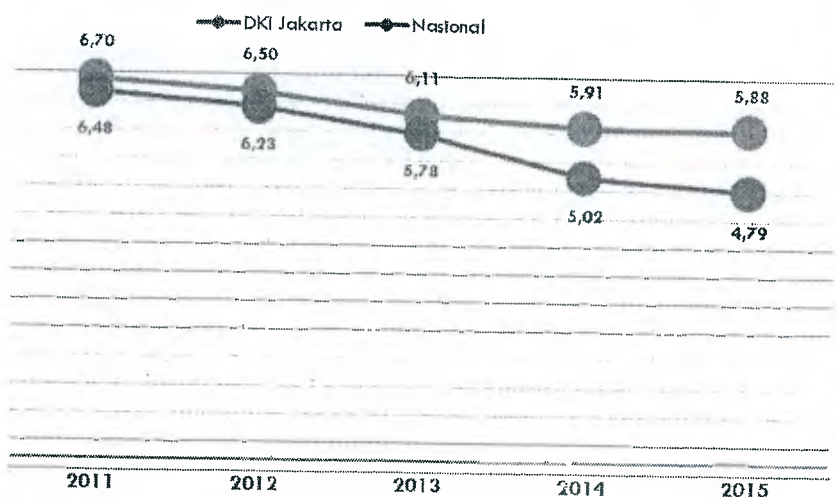
2.1. Evaluasi Perkembangan Indikator Daerah

2.1.1. Evaluasi Perkembangan Ekonomi Daerah Triwulan I Tahun 2016

Pada bagian ini akan dijabarkan analisis fokus pemerataan ekonomi dalam lingkup pembangunan di Provinsi DKI Jakarta yang dilihat dari indikator laju pertumbuhan ekonomi, PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku, laju inflasi, dan investasi. Analisis sebagaimana disebutkan disajikan dalam bentuk narasi, gambar atau tabel sesuai dengan kebutuhan.

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data empirik bahwa perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Jakarta pada tahun 2015 sebagaimana yang ditunjukkan Gambar 2.1 adalah sebesar 5,88 persen, melambat dibanding tahun 2014 yang sebesar 5,91 persen. Perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2015 tumbuh sebesar 5,88 persen atau lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2014 yang sebesar 5,95 persen. Lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi 2015 tersebut seiring dengan masih lemahnya pemulihan perekonomian global dan nasional sehingga berpengaruh pada masih terbatasnya kinerja ekspor ke luar negeri dan kinerja perdagangan antardaerah. Ditengah lemahnya pemulihan perekonomian tersebut, terdapat beberapa faktor positif yang mendorong pertumbuhan yaitu dorongan konsumsi terkait Pilkada serentak, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, serta meningkatnya belanja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur strategis.



Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dan Nasional 2011-2015 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2016

Selanjutnya dapat juga dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 terjadi pada seluruh lapangan usaha. Jasa keuangan merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,72 persen, diikuti oleh informasi dan komunikasi sebesar 10,07 persen dan transportasi pergudangan sebesar 8,99 persen.

Perekonomian Jakarta pada triwulan I-2016 tumbuh 5,62 persen apabila dibandingkan dengan triwulan I-2015 (y on y) dimana dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 11,15 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen konsumsi rumah tangga sebesar 5,26 persen.

Selanjutnya Perekonomian Jakarta triwulan I-2016 apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q to q) mengalami kontraksi sebesar 0,61 persen. Dari sisi lapangan usaha pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa perusahaan (1,46 persen), dan dari sisi komponen pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh pengeluaran konsumsi LNPRT (1,03 persen). Kontraksi yang dialami oleh ekonomi Jakarta salah satunya dipicu dari terkontraksinya kategori konstruksi yaitu sebesar minus 0,64 persen.

B. PDRB atas dasar harga berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 mencapai Rp.1.983,42 Triliun meningkat Rp.223, 20 Triliun dibandingkan tahun 2014 yang sebesar Rp.1.760,21 Triliun. Sedangkan sampai dengan triwulan I tahun 2016, PDRB atas dasar harga berlaku telah mencapai Rp.518,96 Triliun.

C. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku

Struktur perekonomian Jakarta menurut lapangan usaha tahun 2015 didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor (16,65 persen); industri pengolahan (13,84 persen), konstruksi (13,16 persen) dan jasa keuangan dan asuransi (10,35 persen). Secara lengkap, struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2014	Distribusi 2014	2015	Distribusi 2015	TW I 2016	Distribusi TW I 2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.711	0,10%	1.867	0,09%	487	0,09%
Pertambangan dan Penggalian	4.541	0,26%	5.023	0,25%	1.263	0,24%
Industri Pengolahan	239.597	13,60%	274.492	13,84%	71.848	13,84%
Pengadaan Listrik dan Gas	5.580	0,32%	6.027	0,30%	1.152	0,30%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang	705	0,04%	747,85	0,04%	192	0,04%
Konstruksi	234.184	13,30%	261.073	13,16%	66.561	12,83%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	304.655	17,30%	330.319	16,65%	86.710	16,71%
Transportasi dan	54.848	3,11%	65.120	3,28%	17.316	3,34%

Lapangan Usaha	2014	Distribusi 2014	2015	Distribusi 2015	TW I 2016	Distribusi TW I 2016
Pergudangan						
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	92.374	5,24%	105.882	5,34%	27.361	5,27%
Informasi dan Komunikasi	128.385	7,29%	141.788	7,15%	37.425	7,21%
Jasa Keuangan dan Asuransi	178.998	10,16%	205.312	10,35%	54.952	10,59%
Real Estate	111.672	6,34%	122.622	6,18%	31.972	6,16%
Jasa Perusahaan	122.924	6,98%	141.772	7,15%	37.894	7,30%
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	98.085	5,57%	107.011	5,40%	26.756	5,16%
Jasa Pendidikan	92.477	5,25%	109.694	5,53%	28.749	5,54%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	28.887	1,64%	32.931	1,66%	8.657	1,67%
jasa lainnya	61.783	3,51%	71.723	3,62%	19.255	3,71%
total	1.761.406	100%	1.983.420	100%	518.957	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2016

Sedangkan pada triwulan I tahun 2016, distribusi PDRB DKI Jakarta tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana masih didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (16,71 persen); Industri Pengolahan (13,84 persen); Konstruksi (12,83 persen); dan Jasa Keuangan dan Asuransi (10,59 persen).

D. PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Belaku

Dari sisi PDRB menurut pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku, empat komponen mengalami pertumbuhan positif dan tiga komponen mengalami kontraksi. Pertumbuhan terbesar terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 5,04 persen, diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 3,82 persen, selanjutnya Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 2,93 persen, dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,85 persen.

Struktur ekonomi DKI Jakarta tahun 2015 menurut pengeluaran didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (58,38 persen), diikuti pembentukan modal tetap bruto (40,77 persen), dan net ekspor antar daerah (18,03 persen). secara lebih lanjut dijelaskan pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)

Komponen	2014	Proporsi 2014	2015	Proporsi 2015	Triwulan I 2016	Proporsi Tw I 2016
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.069.514	60,72%	1.157.939	58,38	303.739	58,53
Pengeluaran Konsumsi	35.404	2,01%	35.718	1,80	9.390	1,81

Komponen	2014	Proporsi 2014	2015	Proporsi 2015	Triwulan I 2016	Proporsi Tw I 2016
LNPRT						
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	220.735	12,53%	240.119	12,11	37.291	7,19
Pembentukan Modal Tetap Bruto	725.064	41,16%	808.551	40,77	211.336	40,72
Perubahan Inventori	3.489	0,20%	5.556	0,28	2.924	0,56
Ekspor Barang dan Jasa	298.308	16,94%	329.760	16,63	76.713	14,78
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1.164.992	66,14%	951.755	47,99	227.130	43,77
Net Ekspor Antar Daerah	573.886	32,58%	357.529	18,03	104.692	20,17
PDRB	1.761.408	100%	1.983.420	100%	518.957	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2016

Selanjutnya untuk Distribusi PDRB menurut pengeluaran pada Triwulan I tahun 2016 masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 58,38 persen yang kemudian diikuti oleh komponen Modal Tetap Bruto sebesar 40,77 persen. Sedangkan untuk komponen dengan nilai terendah masih dimiliki oleh komponen Perubahan Inventori sebesar 0,28 persen.

E. PDRB per Kapita

Perkembangan nilai PDRB perkapita menunjukkan proporsi nilai tambah yang dihasilkan dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk. Data BPS menunjukkan bahwa PDRB perkapita DKI Jakarta berdasarkan harga konstan tahun 2010 meningkat dari Rp155,15 juta pada tahun 2013 menjadi Rp194,87 juta pada tahun 2015.

Rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita cenderung menurun dari 5,34 persen pada tahun 2012 menjadi 4,84 persen pada tahun 2014. Kondisi ini menyiratkan bahwa laju pertumbuhan penduduk terutama migrasi dari luar daerah lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, permasalahan yang harus diatasi pada tahun 2016 adalah mendorong perluasan kegiatan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan angkatan kerja baru; dan sekaligus mengembangkan kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya dalam mencegah perpindahan penduduk ke DKI Jakarta.

F. Laju Inflasi

Berdasarkan data empirik bahwa laju inflasi Jakarta selama 5 tahun terakhir terus mengalami fluktuasi. Selanjutnya laju inflasi ditunjukkan juga pada Gambar 2.2. Pada tahun 2011 inflasi DKI Jakarta adalah sebesar sebesar 3,97 persen. Tahun 2012 inflasi sedikit mengalami peningkatan menjadi 4,52 persen, tahun 2013 inflasi kembali meningkat signifikan menjadi 8,00 persen, sedangkan inflasi tahun 2014 kembali meningkat menjadi 8,95 persen dan kemudian pada tahun 2015 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi sebesar 3,35 persen.

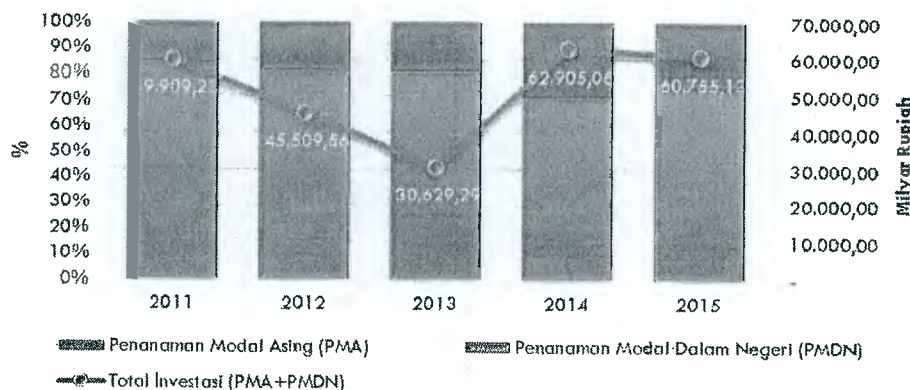


Gambar 2.2 Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta
 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2016

Berdasarkan hasil kajian mengenai Indeks Harga Konsumen dan Inflasi DKI Jakarta 2015 yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta, dapat diinformasikan bahwa pada tahun 2015 di bulan Januari, Pemerintah mengeluarkan kebijakan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) setelah akhir tahun 2015 sempat menaikkan harga BBM. Kemudian masih di bulan yang sama tepatnya pada tanggal 19 Januari 2015, pemerintah kembali menurunkan harga BBM. Pertimbangan dari penurunan harga BBM tersebut utamanya karena masih anjloknya harga minyak dunia di angka US\$ 48,33/Barrel (WTI) dan US\$ 49,75/Barrel (Brent), diambil dari update tanggal 19 Januari 2015 milik Bloomberg. Hal ini mengakibatkan pada bulan Januari mengalami deflasi yang cukup tinggi mencapai -0,41 persen dan merupakan salah satu penyebab inflasi pada tahun 2015 menurun secara signifikan dibandingkan tahun 2014.

G. Investasi

Realisasi investasi PMA (Penanaman Modal Asing) di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 adalah sebesar 45,24 Triliun rupiah. Sedangkan realisasi investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 adalah sebesar 15,51 Triliun rupiah.



Gambar 2.3 Investasi PMA dan PMDN Provinsi DKI Jakarta
 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2016

Selanjutnya untuk realisasi PMA DKI Jakarta hingga triwulan 1 2016 dengan patokan kurs US\$ sebesar Rp. 13.900 saat ini mencapai Rp. 7,66 Triliun. Kemudian untuk realisasi PMDN DKI Jakarta triwulan 1 2016 saat ini mencapai Rp. 2,8 Triliun. Lebih lanjut, kegiatan investasi memerlukan perhatian semua pemangku kepentingan agar di masa yang akan datang investasi di DKI Jakarta dapat lebih baik dan dapat mendukung kinerja perekonomian Jakarta.

2.1.2. Evaluasi Perkembangan Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Pada bagian ini akan dijabarkan analisis fokus kesejahteraan masyarakat dalam lingkup pembangunan di Provinsi DKI Jakarta yang di lihat terhadap indikator Indeks Pembangunan Manusia, Koefisien Gini, Jumlah keluarga Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS), dan Kebutuhan Hidup Cukup (KHC). Analisis sebagaimana disebutkan disajikan dalam bentuk narasi, gambar atau tabel sesuai dengan kebutuhan.

A. Indeks Pembangunan Manusia

Pengukuran keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya ditandai oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, namun juga mencakup kualitas manusianya. Oleh karena itu, konsep pengukuran keberhasilan pembangunan harus berorientasi kepada manusia atau masyarakatnya, yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kualitas masyarakat sebagai manusia. Pembangunan manusia yang mencakup tiga dimensi pokok yaitu kesehatan (umur panjang), pendidikan (pengetahuan) dan daya beli (standar kehidupan layak) dapat dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu wilayah. Mulai tahun 2014, IPM dihitung menggunakan metode baru, mengikuti rekomendasi dari United Nations Development Programme (UNDP). Perubahan metode tersebut adalah pada penggunaan variabel rata-rata lama sekolah serta indeksnya dihitung dengan rata-rata geometrik. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2012 s.d. 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 2015

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015
1.	IPM DKI Jakarta	78,33	78,59	78,39	78,99
2.	IPM Nasional	67,70	68,31	68,90	N/A

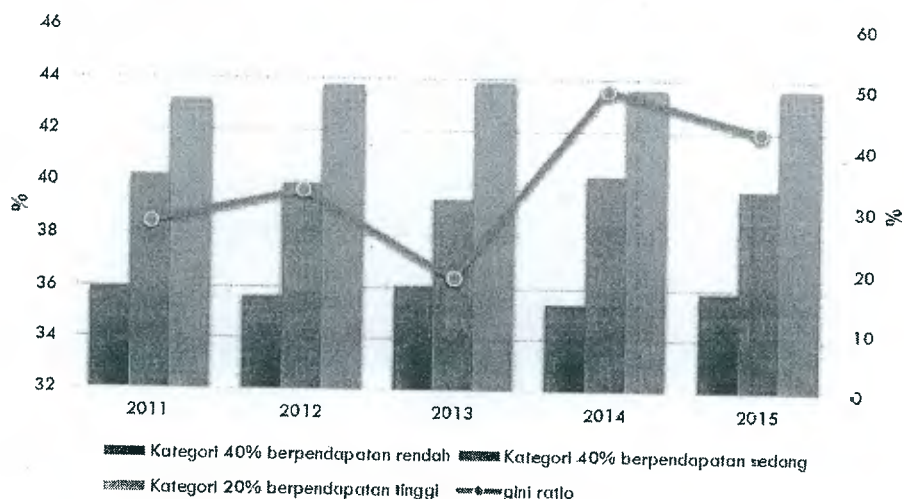
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2016

Data BPS menunjukkan bahwa nilai IPM DKI Jakarta lebih tinggi dari rata-rata nasional. Nilai IPM DKI Jakarta pada tahun 2014 tercatat sebesar 78,39, lebih tinggi dari rata-rata IPM nasional sebesar 68,90. Perbandingan antarprovinsi membuktikan bahwa nilai IPM DKI Jakarta tertinggi dibanding provinsi lainnya.

B. Koefisien Gini

Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah koefisien Gini (Gini Ratio). Koefisien Gini di DKI Jakarta dalam lima tahun terakhir cukup berfluktuasi. Hal ini ditunjukkan dengan angka gini ratio pada tahun 2011

sebesar 38,5 persen (0,381), tahun 2013 sebesar 36,4 persen (0,385) dan tahun 2014 sebesar 43,6 persen (0,436) yang kemudian mengalami sedikit perbaikan pada tahun 2015 berdasarkan data BPS DKI Jakarta bulan Mei 2016 yaitu sebesar 42,0 persen (0,42).



Gambar 2.4 Distribusi Pendapatan dan Gini Ratio DKI Jakarta (persen)

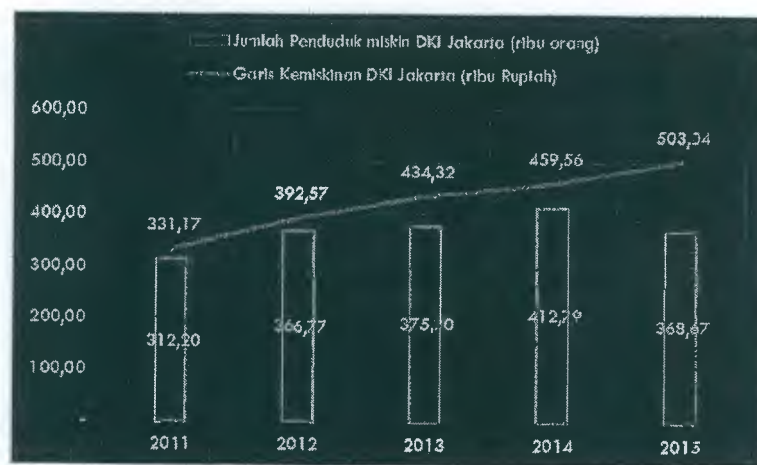
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2016

Menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan visi pembangunan DKI Jakarta. Kesejahteraan yang dinikmati oleh semua orang adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai. Salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempersempit ketimpangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin, adalah dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan penduduk khususnya penduduk miskin melalui berbagai program antara lain PPMK, UKM dan Koperasi serta upaya mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin dengan pemberian Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar.

C. Jumlah keluarga Miskin

Secara makro, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK), yaitu sejumlah rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal makanan dan non makanan yang merupakan rata-rata pengeluaran perbulan perkapita. Metode penghitungan penduduk miskin melalui metode ini dilakukan dengan menghitung komponen Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Berdasarkan data kemiskinan yang dikeluarkan BPS DKI Jakarta pada bulan September 2015 jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta tercatat sebesar 368,67 ribu orang (3,61 persen). Dibandingkan dengan Maret 2015 (398,92 ribu orang atau 3,93 persen), jumlah penduduk miskin menurun sebesar 30,25 ribu orang atau minus 0,32 persen. Sedangkan dibandingkan dengan September 2014 (yoy) dengan jumlah penduduk miskin sebesar 412,79 ribu orang (4,09 persen), jumlah penduduk miskin meningkat 44,12 ribu orang atau menurun 0,48 poin. Garis Kemiskinan (GK) bulan September 2015 sebesar Rp503.038,00 per kapita per bulan, lebih tinggi dari Garis Kemiskinan Maret 2015 sebesar Rp487.388,00 per kapita per bulan dan dari Garis Kemiskinan September 2014 (yoy) sebesar Rp459.560,00 per kapita per bulan.



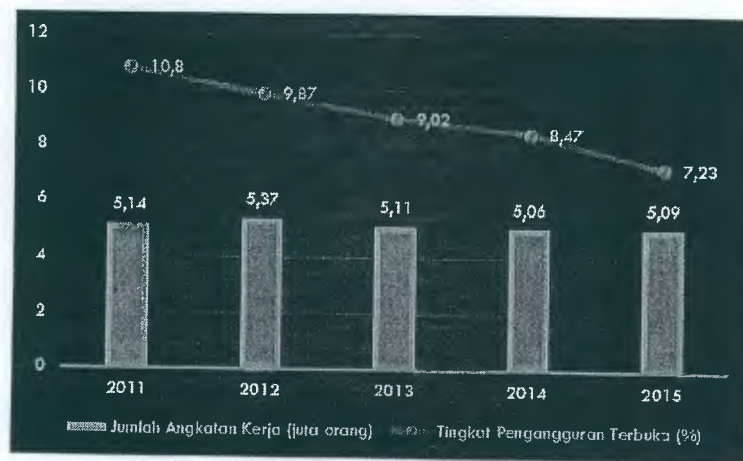
Gambar 2.5 Distribusi Pendapatan dan Gini Ratio DKI Jakarta (persen)
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2016

Penduduk miskin umumnya tinggal di kawasan kumuh, berusaha di sektor informal dan rentan terhadap perubahan lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, permasalahan yang harus diatasi pada tahun 2016 adalah penataan permukiman kumuh, penyediaan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan dan air bersih secara terjangkau, penyediaan tempat usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Sebagaimana diketahui, Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan September 2015 sebesar 65,14 persen (Rp327.678,00), sedangkan sumbangan Garis Kemiskinan Non Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 34,86 persen (Rp175.361,00).

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang menggambarkan persentase angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha, atau mereka yang tergolong angkatan kerja namun tidak terserap dalam pasar kerja.

Berdasarkan data BPS per Agustus 2015, selama periode Agustus 2014 - Agustus 2015 (yoy), tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 8,47 persen menjadi 7,23 persen atau terjadi penurunan sebesar 1,24 persen. Secara absolut, jumlah penganggur mengalami penurunan sebanyak 60,92 ribu orang yaitu dari 429,11 ribu orang pada Agustus 2014 menjadi 368,19 ribu orang pada Agustus 2015. Sementara untuk jumlah angkatan kerja pada Agustus 2015 mencapai 5,092 juta orang, meningkat sebanyak 28,74 ribu orang dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja Agustus 2014 yaitu 5,063 juta orang.



Gambar 2.6 Tingkat Pengangguran DKI Jakarta
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2016

Tingkat pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan selama periode Agustus 2014-2015 telah mengalami perubahan. Pada tingkat pendidikan SD kebawah dan SLTP tingkat pengangguran cenderung mengalami penurunan, sedangkan untuk tingkat pendidikan SMA Umum, SMA Kejuruan dan Diploma & Universitas mengalami kenaikan. Tingkat pengangguran terbuka pada tingkat pendidikan SLTP ke bawah mengalami penurunan sebesar 10,47 persen, yaitu dari 20,16 persen pada Agustus 2014 menjadi 9,69 persen pada Agustus 2015. Pada tingkat pendidikan SMA Umum dan kejuruan, tingkat pengangguran mengalami kenaikan sebesar 2,56 persen, yaitu dari 17,61 persen pada Agustus 2014 menjadi 20,17 persen pada Agustus 2015. Dan pada jenjang pendidikan Diploma dan Universitas mengalami peningkatan sebesar 0,15 persen, yaitu dari 5,46 persen pada Agustus 2015 menjadi 5,31 persen pada Agustus 2014.

Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2014, secara umum jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2015 mengalami peningkatan. Dan jika dilihat berdasarkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Sektor Utama, ada beberapa sektor yang mengalami kenaikan jumlah pekerja seperti sektor Manufaktur dan Jasa yang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 21,11 ribu orang dan 75,58 ribu orang. Sedangkan sektor Pertanian mengalami penurunan sebesar 7,03 ribu orang.

2.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.

Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksana pembangunan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya. Evaluasi terhadap status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan

Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta pada aspek perencanaan antara lain didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 84 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015. Selanjutnya untuk pencapaian sampai tahun 2015, diuraikan berdasarkan masing – masing urusan sebagai berikut:

2.2.1. Urusan Pendidikan

Untuk urusan pendidikan, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp11.107.143.458.283,00 dengan total penyerapan sebesar Rp9.134.727.798.153,00 atau 82,24%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

b. Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun

- a) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) bagi peserta didik TKN, SDN/MIN, SMPN/MTsN, SMAN/MAN, SMKN dan SLBN sebesar Rp1.504.560.739.554,00 untuk 1.017.193 peserta didik terdiri dari :

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TKN dan SLBN bagi 1.927 peserta didik dengan total anggaran Rp4.519.609.617,00 yang terdiri dari BOP TKN sejumlah 622 peserta didik dengan anggaran Rp549.160.000,00 dan BOP SLBN sejumlah 1.305 peserta didik dengan anggaran Rp3.970.449.617,00, dengan rincian :

- TKLBN sejumlah 87 peserta didik dengan anggaran Rp138.272.900,00
- SDLBN sejumlah 697 peserta didik dengan anggaran Rp1.867.820.408,00
- SMPLBN sejumlah 285 peserta didik dengan anggaran Rp841.275.541,00
- SMALBN sejumlah 236 peserta didik dengan anggaran Rp1.123.080.768,00

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) jenjang SDN/MIN, SMPN/MTsN dan SMAN/SMKN/MAN bagi 1.015.266 peserta didik dengan total anggaran Rp1.500.041.129.937,00 terdiri dari:

- SDN sejumlah 686.646 peserta didik dengan anggaran Rp 481.415.058.311,00
- SMPN sejumlah 219.964 peserta didik dengan anggaran Rp 321.584.150.440,00
- SMAN/MAN sejumlah 90.052 peserta didik dengan anggaran Rp 449.876.235.529,00
- SMKN sejumlah 18.604 peserta didik dengan anggaran Rp 247.165.685.657,00

- b) Pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu sebanyak 561.408 peserta didik dengan total anggaran Rp2.079.621.450.000,00 dengan rincian:

- tingkat SD/MI dengan anggaran Rp870.453.540.000,00 untuk 314.695 peserta didik terdiri dari 236.966 peserta didik SD/MI Negeri dan 77.729 peserta didik SD/MI Swasta.
- tingkat SMP/MTs dengan anggaran Rp532.831.680.000,00 untuk 136.897 peserta didik terdiri dari 67.536 peserta didik SMP/MTs Negeri dan 69.361 peserta didik SMP/MTs Swasta.
- tingkat SMA/SMK/MA dengan anggaran Rp675.206.010.000,00 untuk 109.275 peserta didik terdiri dari 23.532 peserta didik SMA/SMK/MA Negeri dan 85.743 peserta didik SMA/SMK/MA Swasta.
- PKBM dengan anggaran Rp1.130.220.000,00 untuk 541 peserta didik terdiri dari 149 peserta didik PKBM Negeri dan 392 peserta didik PKBM Swasta.

c. Program Pendidikan Non Formal dan Informal

Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal.

d. Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi

e. Program Peningkatan Mutu Pendidikan

- a) Penyelenggaraan rangkaian Ujian Nasional dan Ujian Sekolah pada jenjang pendidikan : UNPK Paket A/Ula, Paket B/Wustha dan Paket C dengan peserta sebanyak 16.557 peserta didik.
- b) Penyelenggaraan rangkaian Ujian Nasional dan Ujian Sekolah pada jenjang pendidikan : SD, SMP, SMA dan SMK.
- c) Sosialisasi dan Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) SMP, Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah (US/M-BD) SD Tingkat Kota, Tryout dan Ujian Sekolah (US) SD serta Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
- d) Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Peserta Didik antara lain berupa Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional, Pemusatan Latihan Peserta Lomba Siswa Pendidikan Khusus/Layanan Khusus (PK/LK) Pendidikan Dasar dan Menengah Tingkat Nasional, Pembinaan Olimpiade Sains SD Menuju Lomba Tingkat Nasional, Pembinaan Indonesia Sains Festival (ISF) menuju Tingkat Nasional, Pembinaan Dokter Kecil Siswa SD Tingkat Provinsi dan Pembinaan Kader Kesehatan Remaja (KKR) Bagi Pelajar SMA dengan volume total sebesar 145.623 peserta didik.
- e) Pembinaan Kompetensi Guru antara lain berupa kegiatan Bimtek Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Ujian Nasional SMP, Workshop Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Ujian Nasional SMA Program Matematika, IPA, Bahasa dan Program Sosial, Peningkatan Pertama dalam Jabatan Guru, Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pamong Belajar dan Penilik dengan volume total sebesar 4.100 Guru.
- f) Bimtek Penguatan Implementasi Kurikulum 2013 Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk mata pelajaran tingkat SMP dan SMA dengan volume total sebesar 1.440 Guru.
- g) Penyelenggaraan dan Partisipasi Lomba Pendidikan yang melibatkan 431 peserta didik antara lain melalui Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Tingkat Provinsi menuju Tingkat Nasional.

- h) Penyelenggaraan dan Partisipasi Event Pendidikan yang melibatkan 2.850 siswa antara lain melalui Kegiatan FLS2N dan Olimpiade Olahraga Siswa (O2SN) SMK.
- i) Seleksi dan Pemusatan Latihan Olimpiade Tingkat Nasional yang melibatkan 2.240 peserta didik tingkat SMP/MTs dan SMA/MA antara lain melalui Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP/MTs pada 4 Mata Pelajaran (Matematika, Fisika, Biologi, Ilmu Pengetahuan Sosial), OSN SMA/MA pada 9 Mata Pelajaran (Matematika, Fisika, Biologi, Kimia, Komputer, Astronomi, Ekonomi, Kebumihan dan Geografi), dan Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Jenjang SMA.
- j) Pembinaan dan pengiriman peserta Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing Siswa SMK Tingkat Nasional dengan jumlah peserta sebanyak 14 peserta didik yang terdiri dari 3 orang Bahasa Indonesia, 3 orang Bahasa Inggris, 2 orang Bahasa Mandarin, 2 orang Bahasa Jepang, 2 orang Bahasa Jerman dan 2 orang Bahasa Perancis.
- k) Pengadaan raport siswa SD dan SMP dengan total 400.000 buku yang terdiri dari 300.000 buku raport SD dan 100.000 buku raport SMP.
- f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan**
 - a) Penyelesaian rehabilitasi total gedung sekolah sebanyak 51 Sekolah yang terdiri dari 32 SDN, 16 SMPN, 2 SMAN dan 1 SMKN, serta Rehab/Perawatan Berat sebanyak 207 gedung sekolah terdiri dari 56 gedung sekolah di Jakarta Pusat, 24 gedung sekolah di Jakarta Utara, 61 gedung sekolah di Jakarta Barat, 25 gedung sekolah di Jakarta Selatan dan 41 gedung sekolah di Jakarta Timur.
 - b) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sebanyak 4 Sekolah yang terdiri dari 2 SMPN, 1 SMAN dan 1 SMKN
 - c) Penyelesaian Pembangunan Sarana Penunjang SMKN Terpadu Bambu Apus, Asrama SMKN 61 Kep. Seribu dan Sekolah Terpadu Rusun Marunda
- g. Program Peningkatan Tata Kelola Layanan Pendidikan**
 - a) Penyediaan Biaya Operasional Dewan Pendidikan
 - b) Pendistribusian dan Penghapusan Blanko Ijazah dan SKHUN

2.2.2. Urusan Kesehatan

Untuk urusan kesehatan, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp6.705.666.390.381,00 dengan total penyerapan sebesar Rp5.150.693.467.222,00 atau 76,81%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Program Pembinaan Upaya Kesehatan**
 - a) Pelaksanaan pembinaan upaya pelayanan kesehatan melalui Pembinaan Akreditasi Rumah Sakit, Pelaksanaan Sistem Rujukan Puskesmas dan Evaluasi Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Komprehensif (PONEK).
 - b) Promosi kesehatan dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) melalui Pembinaan tenaga penyuluh kesehatan, Penilaian pelaksanaan PHBS dan posyandu, Promosi kesehatan melalui media cetak, elektronik dan pameran serta Peningkatan Pengetahuan tentang HIV/AIDS dalam rangka menunjang kelurahan siaga aktif.

b. Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak

Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan pengembangan gizi masyarakat, melalui :

- a) Bimtek PONEB bagi tenaga kesehatan
- b) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi
- c) Peningkatan wawasan petugas kesehatan tentang manajemen terpadu balita sakit (MTBS) dan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK)
- d) Bimtek dan Monev Perawatan Balita Gizi Buruk
- e) Pembinaan Petugas Klinik Gizi
- f) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut dan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
- g) Supervisi dan Monev Terkait Program Gizi
- h) Pelaksanaan PONEK dan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
- i) Senam Ibu Hamil

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

- a) Penyelesaian 4 Puskesmas Rawat Inap Selain RB yaitu Puskesmas Kecamatan Pulogadung, Matraman, Cakung dan Makasar.
- b) Penyelesaian rehab Total 5 Puskesmas Kelurahan yaitu Puskesmas Kelurahan Rawa Bunga, Penggilingan PIK, Jati I, Halim II dan Kampung Dukuh.
- c) Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- d) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di 15 RSUD Kecamatan.
- e) Pengadaan alat kamar operasi di 15 RSUD Kecamatan berupa Electro Cauter, Lampu Operasi, Major Set Surgery, Meja Operasi, Mesin Anestesi, Minor Set Surgery, Patient Monitor, Ventilator dan Suction.

d. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

- a) Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah sebesar Rp807.450.000.000,00 untuk 2.871.565 peserta
- b) Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diluar kuota dan benefit Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp300.000.000.000,00
- c) Sosialisasi dan Promosi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
- d) Validasi Data Kepesertaan

e. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

- a) Pengendalian Penyakit antara lain melalui penatalaksanaan imunisasi, pencegahan dan penanggulangan penyakit DBD dan TB serta peningkatan kesehatan anak.
- b) Pengendalian dan Penyehatan Lingkungan antara lain melalui peningkatan kualitas program surveilans, penyehatan kualitas air bersih/air minum, pembinaan tempat umum, tempat penjual makanan, rumah sehat dan lingkungan sekolah sehat serta pengelolaan limbah medis

f. Program Kefarmasian, Alat kesehatan dan Makanan & Minuman

- a) Pengadaan Obat, Alat dan Bahan Laboratorium serta Pemeliharaan Alat Uji Laboratorium dan Kalibrasi Alat Pengukuran
- b) Pengadaan Bahan Reagen, Alat dan Bahan Kesehatan Pakai Habis, Obat-obatan, Alat Kedokteran Gigi dan Alat Kesehatan
- c) Pengadaan Alat Kesehatan, Medis, Non Medis dan Farmasi
- d) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai dan Pemeliharaan Alat Kesehatan

- e) Penyediaan Obat Buffer
- f) Pengadaan Alat Kedokteran, Alat Kesehatan dan Farmasi
- g. Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan**
Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, melalui :
 - a) Peningkatan dan penilaian kompetensi serta kualitas sumber daya manusia Kesehatan
 - b) Sertifikasi tenaga kesehatan dan penyusunan standar kompetensi tenaga kesehatan
 - c) Pembinaan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan
 - d) Penelitian dan Pengembangan di Bidang Kesehatan
 - e) Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dan Puskesmas Berprestasi Tk Provinsi
 - f) Penyusunan Standar Kompetensi Bidan di Puskesmas
 - g) Penyusunan Standar Kompetensi Dokter Umum di Puskesmas
 - h) Kesesuaian Penerapan Akreditasi ISO 17025
 - i) Peningkatan Mutu Layanan Rumah Sakit
- h. Program Antisipasi dan Penanggulangan Kesehatan Terkait Bencana**
 - a) Pelayanan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dan Dukungan Kesehatan untuk Event Nasional dan Internasional
 - b) Kepesertaan Pelatihan Antisipasi Penanggulangan Bencana dan Kegawatdaruratan Medik

2.2.3. Urusan Pekerjaan Umum

Untuk urusan pekerjaan umum, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp9.697.960.178.858,00 dengan total penyerapan sebesar Rp5.346.638.598.165,00 atau 55,13%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan**
 - a) Pembangunan Jalan dan Saluran Pengaman Sejajar BKT (segmen Marunda-Raya Bekasi) seluas 1.078 m² dengan panjang jalan ≤ 90 m (pada sisi timur dan barat)
 - b) Pembangunan Jalan dan Saluran Pengaman Sejajar BKT (Segmen Raya Bekasi - Cipinang) seluas 8.460 m² dengan panjang jalan 355 m (pada sisi timur dan barat)
 - c) Pembangunan Akses Terminal Pulo Gebang berupa 1 *Fly Over* (FO Ramp Masuk dan Ramp Keluar Terminal Pulo Gebang) dan 4 Jembatan (2 Jembatan Ramp BKT sisi Timur dan 2 Jembatan Ramp BKT sisi Barat)
 - d) Pembangunan/Peningkatan Pedestrian di Provinsi DKI Jakarta, meliputi:
 - Jl Diponegoro Sisi Utara/Depan RSCM dan Jl Salemba Raya Sisi Timur depan RS Carolus seluas 2.570 m² dengan panjang 430 m
 - Kawasan Kota Tua seluas 1.703 m² dengan panjang 490 m
 - Kawasan Waduk Setiabudi dan sekitarnya seluas 2.065 m² dengan panjang 590 m
 - Jl. Sejajar Cengkareng Drain seluas 267 m² dengan panjang 267 m
 - e) Peningkatan Jalan, meliputi:

- Perkerasan Aspal Jalur Cepat seluas 34.860 m² dengan panjang 4.648 m dan Jalur Lambat seluas 4.883 m² dengan panjang 683 m di Jl. Suprpto,
 - Perkerasan Aspal seluas 27.508 m² dengan panjang 3.838 m di Jl Cempaka Putih,
 - Pembangunan Median dan Trotoar Jalan seluas 3.000 m² dengan panjang 1500 m' dan Marka Jalan seluas 1.250 m² di Jl. Suprpto dan Jl Cempaka Putih,
 - Pekerjaan Aspal seluas 162.700 m² dengan panjang 13.016 m di Jalan Pemuda-Pramuka,
 - Pekerjaan Cold Mix Recycling Foam Bitumen (CMRFB) seluas 29.979,56 m² dengan panjang 1.394 m, Aspal seluas 76.781 m² dengan panjang 3.571 m, Trotoar seluas 1.734 m² dengan panjang 652 m serta Marka Jalan seluas 1.872 m² di Jalan Caringin-Tomang-Biak
- f) Pembangunan/Peningkatan Jalan-jalan strategis di Provinsi DKI Jakarta, meliputi:
- Jl. Daan Mogot Cs seluas 160.262 m² dengan panjang 8.903 m
 - Jl Pluit Samudera, Jl Lodan seluas 18.600 m² dengan panjang 2.240 m
 - Jl Cideng-Tomang-Biak, CMRFB seluas 36.998 m² dengan panjang 2.055 m
 - Jl Tembus Asia Afrika, Jl. Dwikora seluas 2.213 m²
 - Jl DI Panjaitan/Ahmad Yani seluas 49.022 m² dengan panjang 6.787 m
 - Akses Rusun Daan Mogot berupa CMRFB seluas 11.200 m² dengan panjang 700 m dan Perkerasan Aspal seluas 10.228 m² dengan panjang 730,64 m
 - Jl Setiabudi dan Jl Casablanka seluas 11.256 m² dengan panjang 1.608 m
 - Jl Fachruddin CS seluas 13.534 m² dengan panjang 966,77 m
 - Jl Casablanka Sisi Selatan seluas 2.790 m² dengan panjang 465 m
 - Jl Arafuru seluas 6.230 m² dengan panjang 890 m
 - Pekerjaan Marka Jalan 8.988 m
- g) Pembangunan Fly Over Kuningan Sisi Selatan sebanyak 1 Unit Fly Over seluas 681m x 9m = 6.129 m²
- h) Pembangunan Simpang Tidak Sebidang Permata Hijau sebanyak 1 Unit Fly Over seluas 600 m x 10 m = 6.000 m²
- i) Pembangunan Jalan Layang Busway Kapten Tendean - Blok M – Cileduk target selesai tahun 2016 melalui Program Multiyears progress sampai dengan akhir Bulan Desember 2015 sebesar 43,42% dari target rencana sebesar 38,12%,
- j) Peningkatan Jalur Busway seluas 23.957 m² dengan panjang 7,98 Km dengan Beton Speed Creete pada Koridor 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, serta Separator Busway sepanjang 20.604 m' pada koridor 6, 8, 9
- k) Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan dan Trotoar di Seluruh Koridor Busway seluas 4.784,56 m² dengan panjang 1,60 Km menggunakan Beton Speed Creete di lokasi Simpang Kebon Nanas dan Coca-Cola, serta seluas 49.345,40 m² dengan panjang 16,45 Km menggunakan Aspal di Lokasi Jl. Senen Raya, Gn. Sahari dan Jl. Soepono-Kebayoran
- l) Perencanaan Simpang Tak Sebidang di Jalan Cakung (Rel KA) dan Pulogadung (Pertigaan)

- m) Perencanaan DED Penyempurnaan (x-1) Simpang Sebidang dan Simpang Tak Sebidang serta Jalan Sejajar Sungai dan Rel Kereta Api di DKI Jakarta
- n) Perencanaan DED Jalan Tembus Jl. Panjang - Jl. Kapuk Raya sebanyak 1 Dokumen
- o) Pembangunan/Peningkatan Prasarana Jembatan di Prov. DKI Jakarta, meliputi:
 - Peningkatan Jembatan Teluk Gong seluas 197 m²
 - Pekerjaan Speed Creete seluas 467,93 m² dengan lokasi: Jembatan Mangga Dua Square, Pintu Air Mangga Dua, Jl. Samanhudi, Bermis, Halte Halimun, dan Jl. Zainal Arifin
- p) Pemeliharaan Jalan di 5 wilayah Kota Admin strasi, meliputi:
Pekerjaan Aspal seluas 215.926 m² dengan panjang 19.712,93 m dengan Lokasi: Jl. Kramat Raya, Jl. Salemba Raya, Jl. Danau Sunter Utara dan Selatan, Jl. Puri Indah, Jl. Panjang, Jl. Kembangan Murni Barat dan Jl. Puri Kembangan Barat, Jl. Mampang Prapatan, Jl. Rasuna Said, Jl. Bekasi Timur dan Jl. I Gusti Ngurah Rai

b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- a) Pemeliharaan Jalan di 5 wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur
- b) Pemeliharaan simpang sebidang dan jalan tak sebidang di Prov. DKI Jakarta
- c) Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Jembatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

- a) Pengadaan Alat - Alat Berat Penunjang Perbaikan Jalan sebanyak 36 unit, terdiri dari Bulldozer (2 unit), Escavator (5 unit), Crane (2 unit), Tyre Roller (1 unit), Cold Milling (1 unit), Tandem Roller (1 unit), Asphalt Finisher (2 unit), Self Loader (2 unit), Shovel Loader (1 unit) dan alat Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) (19 unit).
- b) Perawatan Rutin Prasarana Jalan dan Jembatan di Prov. DKI Jakarta berupa Pekerjaan Aspal dengan volume seluas 196.989,88 m² dan panjang 25.545,54 m pada lokasi : Kawasan Hotel Grand Melia, Kawasan Gedung KPK, Jl. Galunggung, Jl. Halimun, Jl. Sultan Agung, Jl. Latuharhari, Jl. Soepono, Jl. Saharjo, Jl. Cikini Raya, Jl. Surabaya, Jl. Diponegoro, Jl. Percetakan Negara, Jl. Meruya Utara, Jl. Moch. Mansyur, Jl. Pesanggrahan, Jl. Boulevard Barat, Jl. Mas Mansyur, Jembatan Kemayoran, Cakung Drain (Jl. Cilincing) dan Jembatan Galur
- c) Pengadaan Alat Berat Tata Air berupa amphi excavator ukuran besar (8 unit), amphi excavator ukuran kecil (5 unit), watermaster (2 unit), trailler dolly (3 unit), self loader (2 unit), mobile crane (1 unit)
- d) Pengadaan Sarana Prasarana Pengelola Data & Informasi berupa penambahan Stasiun Telemetri sebanyak 5 lokasi di Waduk Pluit, Yos Sudarso, Karet, Cideng dan Pintu Air Marina
- e) Pengadaan Peralatan CCTV sebanyak 7 unit dengan lokasi di jaringan Cempaka Mas – Pedongkelan (2 Unit), Jaringan Balaikota - Robinson (2 Unit), Jaringan Balaikota – Pantai Mutiara (2 Unit) dan Gedung Dinas Tata Air (1 unit)
- f) Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan melalui Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) sebanyak 176 unit terdiri dari 53 unit alat berat, 117 unit angkutan sampah dan 6 unit Mobile Toilet.

- g) Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Kebersihan berupa Compactor SPA Sunter, Kendaraan Typer Sampah (3 unit), Instalasi Air, Genset dan Area Hopper SPA Sunter, Bus Toilet (6 unit) dan Toilet Container (4 unit)
- h) Perbaikan Sarana Kebersihan berupa Compact Container (4 unit), Kendaraan Arm Roll (4 unit) dan rekondisi Container SPA Sunter (6 unit)
- i) Pengadaan alat angkut kebersihan sebanyak 1.255 unit terdiri dari Dump Truck Besar (435 unit), Dump Truck Kecil (341 unit), Truk Arm Roll Besar + bak kontainer (65 unit), Truk Arm Roll Kecil + bak kontainer (63 unit), Dump Truck Tronton (29 unit), Kendaraan Pergangkut alat berat (1 unit), Kendaraan Derek (4 unit), Dump Pick-up Angkutan Sampah (40 unit), Kendaraan Operasional Lintas (77 unit) dan Gerobak Motor (200 unit)
- j) Pengadaan Alat Berat Kebersihan sebanyak 47 unit terdiri dari Wheel Loader (39 unit), Excavator (1 unit), Spider Excavator (1 unit) dan Road Sweeper (6 unit)
- k) Pengadaan Container Sampah sebanyak 20 unit terdiri dari Container Sampah Besar (10 unit) dan Container Sampah Kecil (10 unit)
- l) Pengadaan Mobile Toilet sebanyak 11 unit

d. Program Pengembangan Sistem Drainase

- a) Pembangunan Sistem Telemetry Sumur Pantau berupa pengadaan alat telemetry AWLR Sumur Pantau sebanyak 20 buah di 8 titik lokasi yaitu Cipayung (Jl. Bina Marga No. 2), Pluit (Kantor Kel. Pluit Jl. Karang Permai), Pegadungan (di RM. Suku Dinas Kebersihan Jl. Bambu Larangan), Pasar Minggu (Jl. Ragunan Raya No. 29), Pulo Gebang (Jl. Raya Pu.o Gebang No. 2), Rusun Pesakih (Jl. Daan Mogot),...Semanan (Kantor Lurah) dan kantor Walikota Jakarta Utara
- b) Pengadaan dan pemasangan meter air sebanyak 865 buah yang terdiri dari:
 - Pengadaan meter air sebanyak 733 unit terdiri dari 1 inch sebanyak 443 unit, 1,5 inch sebanyak 50 unit, 2 semi baling-baling sebanyak 200 unit, dan 3 semi baling-baling sebanyak 40 unit
 - Pemasangan meter air sebanyak 132 unit terdiri dari Pemasangan baru sebanyak 25 unit dan Pergantian unit rusak sebanyak 107 unit
- c) Pengadaan Remote Hydrographic Survey berupa pengadaan 1 (satu) unit perahu remote control untuk kebutuhan pengukuran kontur dan endapan di bawah air pada waduk/sungai.
- d) Pengadaan Perlengkapan Pendukung pengukuran kontur dan endapan berupa Handy Talkie sebanyak 7 Unit dan Bak Ukur Geodesi sebanyak 20 unit.
- e) Pengadaan Alat Ukur GPS Geodetik sebanyak 3 unit untuk melakukan pengukuran elevasi dan koordinat di lokasi yang sulit cjangkau dan memerlukan ketelitian tinggi.
- f) Pengadaan Alat Geodesi sebanyak 11 unit terdiri dari 10 unit Digital Level dan 1 unit Total Station
- g) Pengadaan Alat Test Debit Air untuk melakukan pengetesan debit air pada kali/sungai/saluran phb sebanyak 3 unit
- h) Perencanaan dasar pembangunan sistem pompa dar long storage sunter hilir
- i) Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) Dredging and Embankment of Sentiong-Sunter Drain, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan &

Waduk Sunter Timur III Sub-projects ICB Package No. JUFMP-4 dengan total volume pengerukan sebesar 270.000 m³ serta perbaikan tanggul sepanjang 151.998 m'

- j) Pendampingan Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) Project (Administrasi & Lelang) menghasilkan Kontrak JEDI Paket 4 (Sentiong-Sunter Drain, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan & Waduk Sunter Timur III) & Paket 7 (Grogol-Sekretaris Drain, Pakin-Kali Besar-Jelangkeng Drain, Krukut Cideng Drain & Krukut Lama)
 - k) Pendampingan appraisal bidang sumber daya air guna menentukan harga tanah untuk waduk, situ, embung, kali, dan saluran menghasilkan sebanyak 20 lokasi dengan luas sekitar ± 652.431 m²
 - l) Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah terhadap pemilik ijin sebanyak 253 ijin terdiri dari:
 - Surat Ijin Bor (SIB) sebanyak 46 ijin
 - Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) Bor Baru sebanyak 18 ijin
 - Pantek Baru sebanyak 18 ijin
 - Bor Perpanjangan sebanyak 126 ijin
 - Pantek Perpanjangan sebanyak 35 ijin
 - *Dewatering* sebanyak 9 ijin
 - Pengembalian Berkas sebanyak 1 ijin
 - m) Normalisasi Sungai/Kali di Provinsi DKI Jakarta berupa pemasangan sheet pile sepanjang 1.826 m' terdiri dari :
 - Aliran Barat: Lokasi di Kali Sekretaris (Mulai dari Sedetan Grogol sekretaris sampai Tanjung Duren) sepanjang 708 m.
 - Aliran Tengah : Lokasi Kali Ciliwung lama sepanjang 1.118 m
- e. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya**
- a) Perencanaan Tata Air antara lain : Perencanaan Sodetan Kampung Melayu-KBT, Perencanaan x-1 Aliran Timur dan Tengah, Studi perluasan Waduk Kelapa Dua Wetan kearah selatan serta Study Potensi Waduk Ciracas Jakarta Timur
 - b) Refungsi Sungai/ Kali Sistem Aliran Timur, Tengah dan Barat
 - c) Pengerukan Kali/Saluran/Waduk/Situ Aliran Timur, Tengah dan Barat Provinsi DKI Jakarta
- f. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir**
- a) Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) Dredging and Embankment of Ciliwung-Gunung Sahari Drain & Waduk Melati Sub Project ICB Package No JUFMP-1 meliputi :
 - Pengerukan saluran dengan volume lumpur yang dikeruk 80.220,62 m³
 - Pembangunan pompa dengan kapasitas sebesar 4 m³/detik
 - b) Pekerjaan di Waduk Melati :
 - Pemancangan *sheet pile* CCSP type W450 L 12 m : sepanjang 11.508 m
 - Pemancangan *sheet pile* CCSP type W450 L 10 m : sepanjang 2.690 m
 - Pengerukan waduk dengan volume lumpur yang dikeruk 80.220,62 m³
 - Pembangunan pompa dengan kapasitas sebesar 4 m³/detik
 - c) Pekerjaan di Kali Ciliwung Gunung Sahari :
 - Pemancangan *sheet pile* CCSP type W450 L 17 m : 3.995 m
 - Pemancangan *sheet pile* CCSP type W450 L 14 m : 812 m
 - Pemancangan *sheet pile* CCSP type W450 L 12 m : 17.244 m

- Pengerukan sungai dengan volume lumpur yang dikeruk 171.630,97 m³
 - Pembuatan saluran gendong sejajar kali dengan Uditch uk. (1.00 x 1.00 x 1.20) m sepanjang 2.184 m'
 - Pembangunan konstruksi jalan orang / pedestrian dengan *paving block* seluas 4.548,34 m² lebar 1,60 m
 - Pembuatan dan pemasangan pintu air dengan ukuran (b : 1.00 x h : 2.00 x h : 3,60) m sebanyak 2 unit dan ukuran (b : 1.00 x h : 2.00 x h : 4,05) m sebanyak 2 unit
- c) Pembangunan Tanggul A sepanjang 1950 m' di Muara Baru Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara untuk mendukung NCICD berupa tanggul di pinggir pantai.
- d) Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) Dredging and Embankment of Grogol-Sekretaris Drain, Pakin-Kali Besar-Jelangkeng Drain, Krukut Cideng Drain & Krukut Lama Drain Sub-Project ICB Package No JUFMP-7, meliputi:
- Pemancangan sheet pile sepanjang 6.204 m' di Kali Krukut Cideng, Kali Jelangkeng dan Kali Grogol Sekretaris
 - Pengerukan lumpur sebesar 5.253,3 m³ di Kali Besar, Kali Jelangkeng dan Kali Grogol Sekretaris
- e) Pembangunan Parkir Air (Reservoir Air), Sumur Resapan, Imbuan dan Pengisian (Recharge) Air Tanah berupa sumur resapan sebanyak 1243 titik yang berlokasi di DAS Mampang Timur sebanyak 593 Titik dan DAS Mampang Barat sebanyak 650 titik
- g. Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir dan Drainase**
- a) Optimalisasi Penggunaan Kendaraan dan Alat-alat berat untuk mendukung Peningkatan kapasitas waduk/kali/saluran
 - b) Pemeliharaan *Reservoir Osmosis* (RO) Tahun 2015
 - c) Pemeliharaan Peralatan Pengukuran
 - d) Pelaksanaan Pengukuran dan Pengujian Laboratorium
 - e) Pemeliharaan Rutin dan infrastruktur di Kanal Banjir Timur (KBT)
 - f) Monitoring evaluasi pemeliharaan dan Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah/*Automatic Water Level Recorder* (AWLR)
 - g) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Drainase Aliran Timur, Tengah dan Barat
 - h) Pembangunan, Penggantian, Peningkatan dan Perbaikan Sistem Pompa Pengendali Banjir, Pintu Air dan Kelengkapannya untuk Aliran Timur, Tengah dan Barat
 - i) Pengadaan Bahan Bakar Minyak dan Minyak Pelumas untuk pompa, pintu air dan saringan sampah di Aliran Timur, Tengah dan Barat
 - j) Pembangunan Sarana dan Prasarana pengendali banjir yang telah dibebaskan/ditertibkan pada Aliran Tengah dan Barat
 - k) Pemeliharaan dan pengelolaan pompa stasioner, pompa mobile, Pintu Air dan kelengkapannya untuk Aliran Timur, Tengah dan Barat
 - l) Peninggian Gardu dan Perbaikan Rumah Pompa Aliran Timur, Tengah dan Barat
 - m) Pelaksanaan kegiatan Karya Bakti pada Sistem Aliran Tengah
- h. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan**

- a) Penanganan sampah Pesisir dan Pantai Utara Jakarta, muara 13 sungai di Teluk Jakarta dan Pantai Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu oleh 241 petugas
- b) Penanganan sampah Badan Air, Taman dan Jalur Hijau di 5 wilayah Kota Administrasi oleh 4.316 petugas
- c) Pengelolaan Sampah TPST Bantar Gebang dengan volume rata-rata 6.411 ton/hari
- d) Penyusunan Regulasi Masterplan Pengelolaan Sampah 1 dokumen
- i. Program Pengurangan Timbunan Sampah di Sumber**
 - a) Pelayanan Kebersihan Lingkungan, Saluran, Taman dan Makam di 5 wilayah kota dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kebersihan (UPK) Badan Air Dinas Kebersihan
 - b) Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kebersihan Jakarta melalui Kampanye Gerakan Tidak Buang Sampah Sembarangan di Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB)
 - c) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) dan Bank Sampah di 5 Wilayah Kota
 - d) Pengelolaan Sampah di 5 Wilayah Kota melalui Gerakan Pungut Sampah setiap hari Jum'at
- j. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah**
 - a) Pemilihan dan Persiapan Pembangunan IPAL Domestik Komunal Permukiman Percontohan di Provinsi DKI Jakarta
 - b) Peningkatan Kompetensi Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - c) Pembangunan sarana sanitasi pengelolaan air limbah di permukiman
 - d) Pemeliharaan/Perbaikan dan Pengelolaan IPAL di Provinsi DKI Jakarta
 - e) Penilaian Teknis Kelayakan Instalasi Pengolahan Air Limbah
 - f) Pemeliharaan Mekanikal Elektrikal Instalasi Pengolahan Limbah *Septic tank* Pulo Gebang dan Duri Kosambi
 - g) Pelayanan dan Pengoperasian Pengelolaan Limbah *Septic tank*

2.2.4. Urusan Perumahan Rakyat

Untuk urusan perumahan rakyat, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp3.347.554.408.362,00 dengan total penyerapan sebesar Rp1.991.869.723.424,00 atau 59,50%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Perumahan dan Permukiman**
 - a) Penyiapan Masyarakat Calon Penghuni Rusun
 - b) Penguatan Masyarakat Penghuni Rusun
 - c) Pemberdayaan Masyarakat Penghuni Rusun
 - d) Pengelolaan Perumahan dan Rumah Susun
 - e) Penyelenggaraan dan Partisipasi Event Perumahan
- b. Program Penyediaan Perumahan Rakyat**
 - a) Pembangunan Rumah Susun sebanyak 6 tower dan 18 blok dengan total volume 2.478 unit / struktur, yang terdiri dari Rusun KS Tubun 3 tower (524 unit), Rusun Semper 1 tower (270 unit), Rusun Cakung Barat 4 blok (300 unit), Rusun Rawa Bebek 4 blok (400 unit), Rusun Jatinegara Kaum 3 blok (300 unit), Rusun Jl. Bekasi Km.2 sebanyak 2 blok (200 unit), Rusun Pinus

- Elok 1 blok (100 unit) dan Rusun Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya 2 tower (384 unit).
- b) Perancangan Dasar Rusun sebanyak 14 tower dan 10 blok dengan total volume 3.323 unit/struktur, yang terdiri dari Rusun BLK Pasar Rebo 2 tower (336 unit), Rusun Daan Mogot 2 tower (460 unit), Rusun Lokasi Binaan Rawa Buaya 2 tower (384 unit), Rusun Lokbin Tegal Alur 1 tower (90 unit), Rusun Nagrak 10 blok (510 unit), Rusun Pengadegan 1 tower (188 unit), Rusun Penjaringan 2 tower (424 unit), Rusun Pulo Gebang 3 tower (676 unit) dan Rusun Rawa Bebek 1 tower (255 unit).
 - c) Perancangan Dasar Rumah Susun Kompleks Rusun Pondok Pinang Jakarta Selatan (Eks UPT Kayu) sebanyak 1 Tower (164 Unit / Struktur)
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat**
- a) Pembangunan dan Penyelesaian Masjid, Musholla dan Sarana Prasarana Penunjang di Rusun
 - b) Pematangan Tanah, Turap dan Pagar Lokasi Rumah Susun
 - c) Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Rusun
 - d) Pembangunan Sumur Air Tanah Dalam (deep well) di Rusun
 - e) Pemberdayaan Warga Rusunawa DKI Jakarta melalui pemberian keterampilan
 - f) Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah susun
- d. Program Penyiapan Masyarakat Calon Penghuni Rumah Susun**
- a) Penyiapan dan relokasi warga yang terkena program sarana dan prasarana kota
 - b) Pemberdayaan Warga Rusunawa DKI Jakarta melalui pelatihan keterampilan
- e. Program Penataan, Penertiban dan Pemeliharaan Rumah Susun**
Perbaikan Rumah Susun di Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Timur
- f. Program Koordinasi Serah Terima Rusun Yang dibangun Oleh APBN**
Pembangunan rumah susun yang dibiayai oleh APBN
- g. Program Pembangunan Gedung Pemda**
- a) Pembangunan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - b) Pembangunan Masjid Raya Jakarta dan Masjid di Lingkungan Kantor Pemda
 - c) Pembangunan sarana dan prasarana penunjang keamanan Ibukota
 - d) Pembangunan dan Penyelesaian 6 Gedung Kantor UPPD
- h. Program Pemeliharaan Gedung Pemda**
- a) Rehabilitasi Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - b) Rehabilitasi Gedung Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan
 - c) Rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang keamanan Ibukota
 - d) Rehabilitasi Gedung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Jakarta Selatan
 - e) Rehabilitasi 2 Gedung Komisi Pemilihan Umum Daerah tingkat kota
 - f) Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Pemda
- i. Program Penyediaan Informasi Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda**
Pembinaan dan Sosialisasi Perumahan dan Gedung Pemda melalui pendampingan kegiatan Adidaya Puritama

2.2.5. Urusan Penataan Ruang

Untuk urusan penataan ruang, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp245.409.889.829,00 dengan total penyerapan sebesar Rp220.774.143.828,00 atau 89,96%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Tata Ruang**
 - a) Penyempurnaan Masterplan KEK Marunda
 - b) Pengumpulan Data Pendukung RDTR dan Peraturan Zonasi
 - c) Panduan Rancang Kota Kawasan TOD Manggarai
 - d) Analisis Kebutuhan Ruang Tiap Zona Peruntukan Lahan Wilayah Utara dan Selatan
 - e) Pencetakan Peraturan Daerah RDTR dan Peraturan Zonasi dan Lampirannya
- b. Program Peningkatan Pelayanan Ketataruangan**
Penyusunan *Trace* Infrastruktur dan Utilitas
- c. Program Pengawasan dan Penertiban Bangunan**
 - a) Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Bangunan
 - b) Penegakan sanksi peraturan Dinas Penataan kota (Perda No 1 Tahun 2014 Tentang RDTR & PZ dan Perda No 7 Tahun Tentang Bangunan Gedung)
 - c) Pelaksanaan justisi dan operasi justisi bangunan
- d. Program peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang**
Pendataan Ruang Kota 3D Wilayah Utara dan Selatan
- e. Program Pemberdayaan komunitas penyelenggara bangunan gedung**
Pelaksanaan Sidang Konsultasi Bidang Perencanaan Bangunan Gedung Oleh Tim Ahli (TPAK, TPKB dan TPIB)
- f. Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang**
Penyusunan Profil Jakarta Membangun Tingkat Kecamatar
- g. Program Peningkatan sarana dan prasarana penataan ruang**
 - a) Pengadaan Peralatan Ukur
 - b) Pembuatan Peta *Bathymetri* Pulau Permukiman
 - c) Pemuktahiran Peta Dasar Pulau Permukiman di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- h. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Penataan Ruang**
Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pelatihan Arc GIS)
- i. Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Penataan Ruang**
 - a) Updating Peta Dasar
 - b) Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan

2.2.6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Untuk urusan perencanaan pembangunan, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp112.122.214.401,00 dengan total penyerapan sebesar Rp90.502.708.380,00 atau 80,72%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian**
 - a) Pelaksanaan Peningkatan Perencanaan dan Monev Pembangunan Bidang Perekonomian
 - b) Perencanaan Perekonomian Daerah
- b. Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat**

- Pelaksanaan Peningkatan Perencanaan dan Monev Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- c. **Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur**
Pelaksanaan Peningkatan Perencanaan dan Monev Pembangunan Bidang Pemerintahan
 - d. **Program Peningkatan Kapasitas Perencana dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah**
Diklat *Internship Intergrated Urban Water Management (sister city Jakarta - Rotterdam)*
 - e. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan**
 - a) Pelaksanaan Peningkatan Perencanaan dan Monev Pembangunan Bidang Keuangan
 - b) Pelaksanaan Evaluasi, Pengendalian dan Laporan Pembangunan
 - c) Penyusunan Dokumen Perencanaan
 - d) Penyelesaian Dokumen Lampiran RAPBD Tahun 2015
 - e) Penyusunan Dokumen RAPBD P 2015
 - f) Penyusunan Dokumen RAPBD 2016
 - g) Penyusunan Review Perda RPJMD DKI Jakarta
 - h) Penyelenggaraan Musrenbang
 - i) Penyiapan *Masterplan Smart City*
 - f. **Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup**
Pelaksanaan Koordinasi dan Monev Perencanaan Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup
 - g. **Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Perencanaan Pembangunan**
 - a) Pengembangan dan Penyediaan Dukungan Sistem Informasi Perencanaan
 - b) Penyediaan Dukungan Data dan Informasi (Open Data) Perencanaan Pembangunan

2.2.7. Urusan Perhubungan

Untuk urusan perhubungan, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp1.123.592.619.721,00 dengan total penyerapan sebesar Rp681.670.752.408,00 atau 60,67%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. **Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan**
 - a) Penyelesaian Revitalisasi Terminal Rawamangun;
 - b) Pemeliharaan Terminal berupa Pemeliharaan bangunan Terminal Kampung Melayu, Pulogadung, Tanjung Priok, Jakarta Kota, Manggarai, Grogol, dan Senen. Kegiatan pemeliharaan ini meliputi pemeliharaan bangunan terminal, emplasemen, rambu dan marka, serta saluran terminal;
 - c) Peningkatan Fasilitas Terminal Terpadu Pulo Gebang meliputi pembangunan Marka Jalan, Pembangunan Saluran Dalam Terminal, Pembangunan Taman Pot Terminal dan Pemeliharaan Pos Jaga;
 - d) Pengadaan Tanah Akses Terminal Terpadu Pulo Gebang meliputi Pengadaan Tanah Sarana Umum Terminal untuk fasilitas akses keluar-masuk Terminal sebanyak 1 Bidang Tanah seluas 678 m² dan Pembebasan Tanah

Frontage Tol Akses (jalan sejajar jalan tol) menuju Terminal Pulo Gebang sebanyak 3 bidang seluas 2.643 m².

- e) Pemeliharaan Bangunan Terowongan Penyeberangan Orang di Jakarta Kota untuk meningkatkan kenyamanan pada fasilitas pelayanan publik;
- f) Pengadaan 72 unit busway;
- g) Pengadaan Mobil Derek Dinas Perhubungan dan Transportasi sebanyak 32 unit;
- h) Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan UPT Terminal Terpadu Pulo Gebang meliputi Pengamanan Terminal Terpadu Pulo Gebang dalam rangka Angkutan Lebaran 2015, Natal dan Tahun Baru 2016, serta Pemandangan Angkutan Umum ke Terminal Terpadu Pulo Gebang. Hasil kegiatan tersebut berupa terwujudnya keamanan dan ketertiban Terminal Terpadu Pulo Gebang.
- i) Perencanaan Perhubungan di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang meliputi Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Jetty (dermaga) di Pelabuhan Muara Angke, DED Pembangunan Sheet pile dan Peningkatan Jalan Pelabuhan Muara Angke, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), dan Dermaga Kepulauan Seribu, Kajian Jaringan Lintas di Provinsi DKI Jakarta dan Kajian Perencanaan Bisnis Angkutan Perairan Kepulauan Seribu;
- j) Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPT Angkutan Sekolah meliputi Pengadaan Fasilitas Pendukung di Pool dan Bus Sekolah, Pengadaan GPS Bus Sekolah, Pembaruan GPRS serta Perawatan Halte Bus Sekolah;
- k) Perhitungan Rupiah/km, Validasi Rute Angkutan Sekolah, Evaluasi Pelayanan, Perencanaan Program UP. Angkutan Sekolah, termasuk evaluasi pelayanan angkutan bus sekolah. Hasil dari kegiatan tersebut dapat diketahui hal-hal yang belum optimal dalam pelaksanaan pelayanan Angkutan Sekolah di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk bahan evaluasi pelaksanaan pelayanan angkutan sekolah yang lebih optimal;
- l) Pembangunan sistem operasional dan maintenance (perawatan dan pemeliharaan) bus sekolah untuk mempermudah pengelolaan armada angkutan sekolah sehingga dapat diketahui record perawatan dan data mengenai seluruh armada.

b. Program Pengendalian Lalu lintas dan Angkutan

- a) Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b) Pengendalian Lalu Lintas Pada Kegiatan Car Free Day.
- c) Pengendalian Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
- d) Pengadaan Unit Lampu Lalu Lintas Jenis LED
- e) Pembayaran Biaya Listrik Lampu Lalu Lintas dan Perangkat Elektronik Lalu Lintas di Wilayah DKI Jakarta untuk 171 titik lampu lalu lintas, 41 CCTV dan 3 VMS (Variable Message Sign)
- f) Pemeliharaan Lampu Lalu Lintas di Wilayah DKI Jakarta
- g) Peningkatan Lampu Lintas Kebutuhan Emergency

c. Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan

- a) Pengadaan Mobil dan Sepeda Motor Patroli
- b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

- c) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Pada UP PKB Cilincing, Ujung Menteng dan Pulogadung
- d) Perawatan, Perbaikan, kalibrasi dan sertifikasi alat uji PKB Pada UP PKB Cilincing, Ujung Menteng dan Pulogadung.
- e) Penyediaan Spare Parts dan Penunjang Alat Uji PKB pada UP PKB Cilincing, Ujung Menteng dan Pulogadung
- d. Program Pembangunan Transportasi Ramah Lingkungan**
Pembangunan Jalur Sepeda di Jakarta Pusat
- e. Program Pembangunan Transportasi Perairan**
 - a) Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Laut/Air
 - b) Revitalisasi Kapal Ojeg Kepulauan Seribu
 - c) Penyediaan BBM, Docking dan Pelayanan Kapal Patroli 3
 - d) Pelayanan Perairan dan Pelabuhan
 - e) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepelabuhanan
 - f) Docking Kapal Catamaran 2 dan 3
 - g) Docking Kapal Patroli 1, 4 dan Kerapu 1
 - h) Perbaikan dan Peningkatan Fasilitas Dermaga
- f. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**
 - a) Pengadaan Sarana Prasarana Perhubungan
 - b) Pengadaan Mobil Panggung
 - c) Pengadaan Stok Material Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Pendukung
 - d) Penggantian dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas
 - e) Pembangunan Guard Rail di Wilayah DKI Jakarta
 - f) Pembangunan Pagar Penunjang Keselamatan di Koridor Busway dan Wilayah DKI Jakarta

2.2.8. Urusan Lingkungan Hidup

Untuk urusan lingkungan hidup, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp 6.188.035.122.779,00 dengan total penyerapan sebesar Rp3.850.713.472.340,00 atau 62,23%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**
 - a) Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Limbah B3
 - b) Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Pencemaran Udara dan Air
 - c) Pembinaan, Pengembangan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan
 - d) Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - e) Penaatan Hukum Lingkungan
 - f) Pengendalian Amdal, UKL-UPL dan SPPL
- b. Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam**
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lingkungan Hidup
- c. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**
 - a) Partisipasi Event Lingkungan Hidup
 - b) Penghargaan Lingkungan Hidup.
- d. Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pertanian dan Kehutanan**

- a) Pemeliharaan Hutan Kota dan Hutan Mangrove
- b) Pembebasan Lahan untuk Pengembangan Hutan Kota Interaktif di Jakarta Timur
- c) Pembebasan Lahan untuk Pengembangan Hutan Kota Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur
- d) Pembangunan Sarana dan Prasarana Hutan Kota dan Hutan Mangrove
- e) Peningkatan Penghijauan RTH dalam rangka Asean Games
- f) Pengadaan Lahan untuk Hutan Kota di Jakarta
- g) Perencanaan Penurapan dan Pengerukan Danau Hutan Kota Srengseng Jakarta Barat
- h) Perencanaan Perluasan Hutan Kota Rawa Buaya
- i) Perencanaan Pagar Pengamanan dan Gapura Hutan Kota Kel. Cipayang
- e. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim**
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
- f. Program Konservasi Flora dan Fauna**
Pembangunan Pengamanan Sampah di *Ecomarine*
- g. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Kelautan**
Rehabilitasi Ekosistem Laut
- h. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Hidup**
 - a) Pemeliharaan Kios dan Food Court Sentraflora Semanan
 - b) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana BPP Kembangan
 - c) Pengamanan dan Kebersihan Sentraflora Semanan
 - d) Pengadaan Sarana Prasarana Pemakaman Jakarta Pusat
- i. Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman**
 - a) Pembangunan Taman Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jl. Ujung Menteng RW 01, Cakung Jakarta Timur seluas 5.638 m²
 - b) Pembangunan Taman Jalur Hijau seluas 3.929,72 m² yang berlokasi di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan seluas 500 m² dan Jalan Tubagus Angke, Jakarta Utara seluas 3.429,72 m²
 - c) Pembebasan Lahan untuk RTH sebanyak 64 lokasi seluas 504.484 m² yang terdiri dari lahan PHU sebanyak 60 lokasi seluas 476.176 m² dan makam sebanyak 4 lokasi seluas 28.308 m².
- j. Program Pengelolaan RTH Pertamanan dan Pemakaman**
 - a) Pelaksanaan Penertiban Taman dan Makam
 - b) Pembangunan Taman Interaktif/Terpadu PKK 5 Wilayah Kota
 - c) Pemeliharaan/ Penataan Taman dan Jalur Hijau 5 Wilayah Kota
 - d) Penanganan Segera Pertamanan dan Pemakaman
 - e) Pembuatan Sertifikasi Tanah Aset Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 - f) Pelayanan Pemakaman
 - g) Pemeliharaan dan Penataan Pemakaman di 5 Wilayah Kota
- k. Program Pengelolaan Sarana Keindahan Kota**
 - a) Pembangunan dan Penataan Ornamen Keindahan Kota
 - b) Pemeliharaan Air Mancur dan Ornamen kota, jam kota dan lampu taman, sarana penyiraman
 - c) Pemeliharaan Tanaman Dekorasi, Tanaman pada Kerombong, Green Wall dan Green Column

- I. **Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman**
 - a) Lomba Taman dan Penghijauan Lingkungan RT Tahun 2015 di 5 wilayah kota Jakarta
 - b) Penyelenggaraan Pameran Flora dan Fauna (FLONA) tahun 2015
 - c) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Green School 2015 melalui Pembuatan Taman Percontohan di 3 lokasi. SMAN 25 Jakpus, SMKN 28 Jaksel dan SMAN 95 Jakbar
 - d) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penghijauan Lingkungan melalui pemberian bibit tanaman hias di 4 lokasi yaitu Taman Manggar, Pondok Kelapa (50 orang), Rusunawa Jatinegara (100 orang), RW. 01 Pela Mampang (50 orang) dan RW.02 Menteng (50 orang)
- m. **Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman**
Pengadaan Sarana Pemakaman Provinsi DKI Jakarta.

2.2.9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Untuk urusan kependudukan dan catatan sipil, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp237.020.533.698,00 dengan total penyerapan sebesar Rp214.020.642.128,00 atau 90,30%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. **Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
 - a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kependudukan dan Catatan Sipil
 - b) Sewa License Perangkat Lunak Anti Virus, Sistem Operasi dan Database Kependudukan
 - c) Sewa Jaringan dan DRC (Disaster Recovery Center) Colocation
 - d) Pelaksanaan Aplikasi Sistem Pelayanan Informatika Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. **Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
 - a) Perencanaan Kependudukan dan Catatan Sipil
 - b) Penyelenggaraan Koordinasi Tugas dan Fungsi Kependudukan dan Catatan Sipil
 - c) Koordinasi Data Perkawinan dan Perceraian dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama (PA) di 5 Wilayah Kota dan 1 Kabupaten Kep. Seribu
 - d) Pengelolaan dan Perawatan Arsip Register Akta Catatan Sipil di 5 Wilayah Kota dan 1 Kabupaten Kep. Seribu
- c. **Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat**
 - a) Partisipasi dan Penyelenggaraan Event Kependudukan dan Catatan Sipil
 - b) Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
- d. **Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**
Peningkatan Administrasi Perkantoran
- e. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**
Pembinaan dan Pengendalian Kependudukan dan Catatan Sipil

2.2.10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp29.445.382.769,00 dengan total penyerapan sebesar Rp5.647.154.844,00 atau 19,18%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. **Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**
Pembinaan dan Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
- b. **Program Penguatan Kelembagaan Perempuan dan Anak**
Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- c. **Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak, dan Perempuan**
 - a) Pembinaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
 - b) Pembangunan Rumah Aman, dan Gedung Women and Child Development Center
 - c) Dukungan pembentukan ruang publik terpadu rumah anak (RPTRA) di 6 wilayah Kota/Kabupaten
- d. **Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan**
Pembinaan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

2.2.11. **Urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)**

Untuk urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp23.418.773.511,00 dengan total penyerapan sebesar Rp17.043.911.633,00 atau 72,78%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. **Program Keluarga Berencana**
Pelayanan Keluarga Berencana
- b. **Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB dan Kependudukan**
Pembinaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana
- c. **Program Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi**
Penyelenggaraan dan Partisipasi Event Keluarga Berencana Kepulauan Seribu
- d. **Program Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga**
Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga

2.2.12. **Urusan Sosial**

Untuk urusan sosial, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp620.544.663.279,00 dengan total penyerapan sebesar Rp533.035.253.406,00 atau 85,90%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. **Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial**
 - a) Pelayanan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial PMKS Non Potensial
 - b) Pelayanan, Perlindungan dan Pengendalian Sosial PMKS Jalanan

- c) Kajian tentang Upaya Penanganan Masalah Sosial Secara Komprehensif dan Berkelanjutan
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial**
- a) Rehab 6 Tempat Pelatihan Loka Bina Karya (LBK), Rumah Perlindungan Bhakti Kasih Jakarta Utara, serta 12 Panti Sosial
- b) Perawatan Mekanikal Elektrikal Kantor Dinas Sosial dan Pemeliharaan gedung Dinas Sosial
- c. Program Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**
- a) Penyelenggaraan dan Partisipasi Event, dan Pengelolaan Sistem Informasi
- b) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Kemitraan Dunia Usaha dan Undian Gratis Berhadiah
- d. Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial**
- Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Penguatan Kemandirian PMKS Potensial.
- e. Program Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial**
- a) Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Peningkatan Penanggulangan Bencana Provinsi dan Kepulauan Seribu
- b) Pelayanan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Janda Pahlawan, Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan
- c) Pengelolaan Program Keluarga Harapan dan Asuransi Kesejahteraan Sosial
- d) Asistensi Orang Dengan HIV/AIDS dan Pelayanan Sosial Orang Terlantar

2.2.13. Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Untuk urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp370.492.462.364,00 dengan total penyerapan sebesar Rp282.845.990.445,00 atau 76,34%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja**
- a) Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- Pembinaan terhadap Pengelola Pusat Pelatihan Kerja (PPK) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 75 Lembaga yang terdiri dari 7 PPK Pemerintah Daerah dan 68 LPK Swasta
 - Fasilitasi Kegiatan Dewan Pengupahan dalam rangka penentuan Upah Minimum Provinsi
 - Penempatan Transmigran sebanyak 25 KK ke 5 lokasi transmigrasi (Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Nanggroe Aceh Darussalam)
 - Pelaksanaan Sertifikasi dan Uji Kompetensi Tenaga Kerja sebanyak 4.080 orang dari 7 PPK dan PPKD yang terdiri dari kejuruan Telematika, *Baby Sitter*, Garmen, Perhotelan, Rias Pengantin, SPA dan Tata Rias

- Pelatihan Asesor sebanyak 50 asesor yang terdiri dari Asesor Akreditasi sebanyak 25 asesor dan Asesor Kompetensi sebanyak 25 asesor
 - Pelatihan dan Pemagangan ke Seoul (*Sister City*) sebanyak 15 orang selama 9 bulan
 - Pelatihan dan Seleksi Magang International Manpower Development of Medium and Small Enterprises (IMM) ke Jepang sebanyak 56 orang selama 2 tahun
 - Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sebanyak 400 orang terdiri dari Pekerja Juru Ikat Crane (Rigger), Bekerja pada Ketinggian, Ruang Terbatas dan Teknisi Perancah
 - Penegakan Hukum (Law Enforcement) sebanyak 1.610 kasus di Perusahaan, terdiri dari perselisihan tentang Hak, Kepentingan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Serikat Pekerja (SP) / Serikat Buruh (SB) dalam satu perusahaan, dan Mogok Kerja / Unjuk Rasa
- b) Penyediaan Informasi Pasar Kerja off-line dan on-line berupa job-fair dengan melibatkan 195 perusahaan, 63.004 lowongan kerja dan menghasilkan 16.125 penempatan tenaga kerja.
- b. Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja**
- a) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - b) Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
 - c) Penempatan Tenaga Kerja di Perusahaan
 - d) Pelatihan keterampilan kerja & pemagangan bagi Pencari Kerja
 - e) Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja berkebutuhan khusus/ Penyandang Disabilitas Bidang Batik
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**
- a) Layanan Pengujian Higiene Perusahaan, Kesehatan & Keselamatan Kerja
 - b) Kalibrasi alat kesehatan dan alat laboratorium
- d. Program Penguatan Sistem dan Fasilitas Pendukung Pusat Pelatihan Kerja**
- Pengadaan Peralatan Pelatihan PPKD
- e. Program peningkatan sarana, prasarana ketenagakerjaan dan ketransmigrasian**
- Pengadaan alat praktik kerja

2.2.14. Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Untuk urusan koperasi dan usaha kecil menengah, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp266.786.117.450,00 dengan total penyerapan sebesar Rp181.348.811.842,00 atau 67,98%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Usaha Koperasi**
 - a) Keikutsertaan pada Kegiatan Pemerintah Pusat/Daerah/ Lembaga Lainnya
 - b) Partisipasi Lebaran Betawi
 - c) Penyelenggaraan Pekan Raya Koperasi dan Penilaian Koperasi, dan Temu Permodalan Koperasi
- b. Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi**
 - a) Partisipasi HARKOPNAS Expo 2015

- b) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
- c. **Program Pemberdayaan UMKM**
 - a) Penyelenggaraan Batu Mulia dan Jewelry Jakarta Expo
 - b) Penyelenggaraan Gelar Kuliner Khas Betawi
 - c) Pembuatan Peta Potensi PKL di DKI Jakarta
 - d) Penyelenggaraan Usaha Mikro Kecil Menengah Award
 - e) Promosi UKM di Cilandak Town Square untuk UKM
 - f) Partisipasi pada Jakarta Night Festival, HUT Jakarta, dan Event Tahun Baru, serta Event UMKM
 - g) Sertifikasi Ke halal an Produk dan Pendampingan Standar Mutu, Sistem HAKI, Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) bagi PKL/UKM Provinsi DKI Jakarta
 - h) Penataan dan Relokasi PKL di DKI Jakarta.
- d. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM**
 - a) Pengadaan Gerobak untuk Pedagang Kaki Lima sebanyak 100 unit yang diberikan kepada pedagang di Kawasan Kota Tua
 - b) Pengadaan sarana dan prasarana PKL di Jakarta Timur berupa penyediaan 80 etalase, 70 meja kursi kafe, 50 showcase cooler untuk PKL di 7 kecamatan Jakarta Timur.
 - c) Pengadaan sarana dan prasarana PKL di Jakarta Utara berupa rambu darat, tong sampah, papan himbauan dan pakaian kerja lapangan di 17 lokasi PKL
 - d) Rehab lokasi binaan Rorotan, Jakarta Utara dan Murjul, Jakarta Timur
 - e) Perawatan lokasi binaan Muria Dalam, Jakarta Selatan serta Jl Nusa 1 dan Cililitan, Jakarta Timur

2.2.15. Urusan Penanaman Modal

Untuk urusan penanaman modal, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp29.243.082.391,00 dengan total penyerapan sebesar Rp26.148.493.992,00 atau 89,42%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. **Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**
Pengadaan bahan, sarana dan Informasi Promosi berupa :
 - a) Pengadaan Alat Pendukung Promosi
 - b) Pengelolaan Data BUMD dan Penanaman Modal
 - c) Penyediaan Bahan Promosi
 - d) Penyempurnaan sistem aplikasi data Penanaman Modal
 - e) Penyusunan Profil Investasi
 - f) Sinkronisasi Data Investasi di Provinsi DKI Jakarta
- b. **Program Peningkatan Kinerja BUMD**
Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Penanaman Modal.
 - a) Evaluasi dan Rekrutmen Pengurus BUMD
 - b) Monitoring, Evaluasi, dan Business Forum BUMD
 - c) Pendirian PT Holding Company BUMD
 - d) Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

- e) Pengembangan Kerjasama Antar BUMD di Indonesia
- f) Pengukuran Penilaian Kinerja (Key Performance Indicator) Pengurus BUMD
- g) Penyusunan Faktor Rata-Rata Industri Untuk Mengukur Kinerja BUMD DKI Jakarta
- h) Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan BUMD
- i) Sosialisasi dan Workshop Kebijakan Penanaman Modal

c. Program Peningkatan Investasi

Business Forum dan Promosi Investasi pada tahun 2015 telah dilaksanakan dengan menyelenggarakan event serta partisipasi pada berbagai event yang diadakan baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk pelaksanaan di luar negeri telah diadakan kegiatan Update From The Region di Singapura bekerja sama dengan kedutaan besar RI di Singapura. Adapun untuk di dalam negeri telah diadakan Jakarta Business Forum serta berbagai promosi investasi ke berbagai kota seperti Lombok, Bandung, Medan dan Surabaya.

2.2.16. Urusan Kebudayaan

Untuk urusan kebudayaan, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp588.016.730.362,00 dengan total penyerapan sebesar Rp419.257.032.593,00 atau 71,30%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya

- a) Gebyar Museum Sejarah Jakarta
- b) Partisipasi Museum Kesenian Jakarta Dalam Daerah dan Luar Daerah
- c) Pekan Museum Joang 45 dan Pekan Museum M.H Thamrin
- d) Penanaman Nilai-Nilai Kejoangan dan Perjoangan Bagi Pelajar dan Generasi Muda
- e) Promosi Unit Pengelola Museum Joang 45 dalam kegiatan Kebudayaan

b. Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan

- a) Perlindungan dan pengembangan kebudayaan Betawi diantaranya melalui Ekperimentasi Seni Budaya Betawi dan Kajian Akademis tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA)
- b) Pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 wilayah dan kepulauan seribu pada 21 lokasi Pusat Kebudayaan diantaranya : Pusat Kesenian Jakarta – Taman Ismail Marzuki (PKJ-TIM), Gedung Kesenian Jakarta, Gedung Miss Tjitjih, Gedung Wayang Orang Bharata, Perkampungan Budaya Betawi (PBB) di Setu Babakan, Pusat Pelatihan Seni Budaya di 5 Wilayah, Gedung Anjungan Provinsi DKI Jakarta TMII, Rumah Si Pitung Jakarta Utara, dan Kawasan Kota Tua.

c. Program Peningkatan Pelaku dan Kelembagaan Kebudayaan

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata dan Budaya, melalui Pelatihan Seni Rupa, Pelatihan Seni Musik, Pelatihan Seni Tari, Pelatihan Seni Teater, dan Pelatihan Kesenian bagi Guru.

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

- a) Pengadaan tanah di Zona A beserta area pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan betawi di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi seluas 5.299 .

- b) Konservasi Museum Joang '45 serta pembuatan tanggul pengaman pantai di Pulau Onrus, Pulau Kelor dan Pulau Cipir.
- e. **Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan**
 Penyelenggaraan/keikutsertaan event promosi kebudayaan tingkat Nasional di Jakarta, antara lain Festival Kuliner Betawi, Festival Teater, Pemilihan Abang-None Jakarta, Lomba Karya Cipta Tari Betawi, Partisipasi Festival Reog, Apresiasi dan kompetisi seni bagi pelajar provinsi DKI Jakarta, Lebaran Betawi, Jakarta Bienalle 2015, Jakarta Carnaval (Jakarnaval), Festival Ramadhan, Festival Kota Tua dan Batavia art festival

2.2.17. Urusan Pemuda dan Olahraga

Untuk urusan pemuda dan olahraga, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp408.273.110.817,00 dengan total penyerapan sebesar Rp301.246.593.748,00 atau 73,79%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

- a) Kegiatan Penyelenggaraan dan Partisipasi Event Kepemudaan, yang terdiri dari:
- *Jakarta Youth Festival*
 - Keikutsertaan Dinas Olahraga dan Pemuda pada Pameran HUT DKI Jakarta
 - Partisipasi pada JAKARNAVAL
- b) Kegiatan Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan, yang terdiri dari :
- Pendampingan Peserta Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3) Penempatan Provinsi DKI Jakarta
 - Seleksi Calon PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta
 - Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor ke Tingkat Nasional dan Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN)
 - Seleksi Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)
- c) Kegiatan Penyelenggaraan Event Kepemudaan, yang terdiri dari :
- Jambore Pemuda Daerah (JPD) Provinsi DKI Jakarta
 - Pameran Produk Kreativitas Pemuda Jakarta dan Pendampingan Kontingen pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tahun 2015
- d) Kegiatan Penyelenggaraan Event PMR, yang terdiri dari:
- Orientasi Kepalangmerahan Provinsi DKI Jakarta
 - Panca Lomba PMR Provinsi DKI Jakarta
- e) Kegiatan Penyelenggaraan Event Kepramukaan, yang terdiri dari :
- Karya Bakti Pramuka Peduli Lebaran
 - Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Lanjutan (KPL) dan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML)
 - Lomba Gudep Tergiat dan Regu Prestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta
 - Perkemahan Minat Saka Pramuka
 - Kegiatan Pembinaan Paskibraka, yang terdiri dari :
 - Lomba Formasi Tata Upacara Bendera (TUB) Tingkat Provinsi DKI Jakarta
 - TC, Pengukuhan dan Pengiriman PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta

b. Program Pembinaan Olahraga Prestasi

a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi, yang terdiri dari :

- Dukungan dan Asistensi Persiapan Pelaksanaan ASIAN Games 2018
- Monitoring, evaluasi dan pemantauan kontingen POPNAS XIII dan XIV tahun 2015 Provinsi DKI Jakarta
- Pembinaan dan Pengiriman Atlet Pelajar Provinsi DKI Jakarta pada POPNAS XIII/2015 di Provinsi Jawa Barat
- Pembinaan dan Pengiriman Kontingen Provinsi DKI Jakarta pada POMNAS XIV/2015 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussa am
- Pembinaan dan Pengiriman Tim Sepakbola Pelajar Usia 14 Tahun menuju Tokyo International Football
- Pembinaan Olahraga Bagi Penyandang Disabilitas dan olahraga prestasi melalui pembinaan PPLP Provinsi DKI Jakarta
- Penyediaan Piala Gubernur dan Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Persiapan Penyelenggaraan 6 th World Sport For All Games 2016 di Jakarta

b) Kegiatan Penyelenggaraan Invitasi Olahraga, yang terdiri dari :

- Invitasi Cabang Olahraga Atletik Jakarta Open, Sepatu Roda, Renang dan Squash Pelajar Provinsi DKI Jakarta
- Invitasi Cabang Olahraga Gulat, Kempo, Taekwondo, Judo, Karate dan Pencak Silat Provinsi DKI Jakarta
- Invitasi Cabang Olahraga Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta
- Invitasi Cabang Olahraga Pelajar SD, SMP dan SMA/TK Provinsi DKI Jakarta
- Invitasi Cabang Olahraga Senam
- Invitasi Olahraga Bola Voli Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Invitasi Sepakbola Antar Klub Usia 13 Tahun Provinsi DKI Jakarta

c) Kegiatan Penyelenggaraan Turnamen Olahraga, yang terdiri dari :

- *Enjoy Jakarta Anniversary Volleyball Tournament*
- *Enjoy Jakarta World Junior Golf Tournament*
- *Jakarta Marathon III/2015*
- Lomba Lari Jakarta Internasional 10 K
- Sirkuit Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Angkat Besi dan Panahan Provinsi DKI Jakarta
- Turnamen Bowling, Squash, dan Tennis Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015
- Turnamen Polo Air Betawi Cup dan Invitasi Cabang Olahraga Aquatic (Renang Indah dan Loncat Indah)
- Turnamen Tennis Junior Internasional Piala Thamrin

d) Kegiatan Penyelenggaraan Liga Olahraga Pelajar dan Mahasiswa, yang terdiri dari :

- Liga Olahraga Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015
- Liga Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Sepaktakraw dan Tenis Meja Provinsi DKI Jakarta
- Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Provinsi DKI Jakarta

e) Kegiatan Pelatihan, Pembinaan dan Seleksi Atlet, yang terdiri dari :

- Pelatihan Pembina Olahraga Pelajar dan Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta
 - Permakanan Atlet PPLP Provinsi DKI Jakarta
 - Seleksi Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi DKI Jakarta
 - Seleksi dan Pembinaan Olahraga Pondok Pesantren Provinsi DKI Jakarta
- f) Kegiatan Pemberian Penghargaan Atlet Berprestasi, yang terdiri dari :
- Pemberian penghargaan Kontingen POMNAS XIII dan XIV tahun 2015 Provinsi DKI Jakarta
 - Penghargaan Bagi Atlet Berprestasi Berkebutuhan Khusus DKI Jakarta
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda**
- a) Pembangunan Fasilitas Olahraga Jalan Alamanda Kelurahan Sunter Jaya
 - b) Pembangunan Ramp, Ruang Multifungsi dan fasilitas Luar Gelanggang Remaja Kecamatan Ciracas
 - c) Pembangunan Fasilitas Luar dan Pengadaan Genset Gelanggang Remaja Kecamatan Tanah Abang
 - d) Pengadaan Peralatan Olahraga Permainan
 - e) Pengadaan Perlengkapan Kontingen dan Peralatan Olahraga PON XIX/2016 di Jawa Barat
 - f) Pengadaan Perlengkapan Kontingen POPNAS dan POMNAS
 - g) Pembangunan Fasilitas Luar Ruang Gelanggang Remaja Kecamatan Tambora
 - h) Pembangunan Fasilitas Luar Ruang dan pengadaan meubelair, peralatan kantor dan *interior* Gelanggang Remaja Kecamatan Koja
 - i) Pembangunan Fasilitas Luar Ruang Gelanggang Remaja Kecamatan Koja
 - j) Rehabilitasi Pagar Keliling UPT Cendrawasih
 - k) Pemagaran Taman BMW
- d. Program Pengembangan Olahraga**
- a) Kegiatan Partisipasi Kejuaraan Olahraga, yang terdiri dari :
- Monitoring, evaluasi dan pemantauan kontingen Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARNAS) DKI Jakarta tahun 2015
 - Pekan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta
 - Pembinaan dan Pengiriman Atlet Tunarungu Provinsi DKI Jakarta pada 8th Asia Pacific Deaf Games
 - Pembinaan dan Pengiriman Kontingen Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPENAS) DKI Jakarta Tahun 2015
 - Pembinaan dan Pengiriman Kontingen Tunagrahita Provinsi DKI Jakarta pada Special Olympic World Summer Games th 2015
 - Pengiriman Atlet Bulutangkis dan Tenis Meja Pelajar menuju Asia Junior Sports Exchange
 - Pengiriman Atlet Sepakbola Pelajar Provinsi DKI Jakarta menuju Beijing Cup Football Tournament
 - Pengiriman Atlet Tunadaksa Provinsi DKI Jakarta pada table tennis Paragames
 - Pengiriman Kontingen Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta menuju Kejuaraan Nasional Mahasiswa

- b) Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Pelajar, yang terdiri dari:
- Kejuaraan Atletik, Catur, Renang, dan Panahan Pelajar Provinsi DKI Jakarta
 - Kejuaraan Bulutangkis, Bola Voli, Futsal Tunarungu Provinsi DKI Jakarta
 - Kejuaraan Cabang Olahraga Bocce, Atletik, dan Sepakbola Tunagrahita Provinsi DKI Jakarta
 - Kejuaraan Catur dan Tenis Meja Tunanetra Provinsi DKI Jakarta
 - Kejuaraan Olahraga Antar Binaan Gelanggang Remaja Provinsi DKI Jakarta Tahun
 - Kejuaraan Olahraga Beladiri Pelajar DKI Jakarta (Pencak Silat, Judo, Kempo, Tinju dan Gulat)
 - Kejuaraan Olahraga Tradisional Provinsi DKI Jakarta
 - Kejuaraan Renang Berkebutuhan Khusus Provinsi DKI Jakarta
 - Kejuaraan Sepakbola Usia 15 Tahun Provinsi DKI Jakarta
 - Kejuaraan Tenis Lapangan Kursi Roda Tunadaksa Provinsi DKI Jakarta
 - Pekan Paralimpik Provinsi DKI Jakarta 2015
- c) Kegiatan Penyelenggaraan Event Olahraga Non Prestasi, yang terdiri dari :
- Festival Olahraga Taman Kanak-Kanak Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015
 - Gebyar Olahraga Rekreasi dan Festival Pencak Silat Betawi
 - Gerak Jalan Sehat Provinsi DKI Jakarta, Gerak Jalan Tradisional Bogor - Jakarta, dan Gerak Jalan Proklamasi
 - Lomba SKJ, Line Dance, Senam Lansia, Senam Kreasi Jakarta Provinsi DKI Jakarta
 - POR Organisasi Wanita DKI Jakarta
 - Senam Kesegaran Jasmani Pegawai Pemda DKI Jakarta
 - Tes Kesegaran Jasmani Karyawan dan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

2.2.18. **Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Untuk urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp74.399.210.947,00 dengan total penyerapan sebesar Rp62.356.897.364,00 atau 83,81%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

a. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**

Peningkatan Pemahaman Pengembangan Wawasan Kebangsaan, melalui

- a) Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
- b) Fasilitasi Forum Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (FPPWK)
- c) Pelatihan Pelopor Wawasan Kebangsaan dan Pelopor Pembauran Kebangsaan dan Penggerak Pembauran Bangsa
- d) Pemahaman Tentang Komponen Cadangan Dalam Upaya Bela Negara
- e) Penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan
- f) Peningkatan Pemahaman Pancasila Bagi Generasi Muda

b. **Program Pendidikan Politik Masyarakat**

a) Pendidikan Politik Masyarakat, melalui :

- Dialog Interaktif Dalam Rangka Pengembangan Demokrasi
- Fasilitasi Pokja Indeks Demokrasi Indonesia
- Jurnal Demokrasi
- Pemantapan dan Implementasi Budaya Politik dan Pemahaman Hak Sipil dan Politik

- Peningkatan Kapasitas Perempuan di Lembaga Politik Dalam Rangka Kesetaraan Gender
 - Peningkatan Kemitraan dengan Partai Politik
 - Peran Parpol Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia
 - Sosialisasi pentingnya fungsi kemitraan eksekutif dan legislatif dengan masyarakat
- b) Pengembangan Budaya Demokrasi
- c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik**
- a) Pencegahan dan Penanggulangan Konflik, melalui
- Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan
 - Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
 - Pelaksanaan Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing
 - Pemantauan Ipoleksosbud
 - Peningkatan Kapasitas Pemantauan Situasi dan Kondisi Daerah
 - Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Terorisme dan Gerakan Radikalisme
 - Peningkatan Pemahaman Sistem Deteksi Dini
 - Penyempurnaan Peta Kawasan Rawan Konflik
 - Penyusunan Strategi Penurunan Daerah Rawan Konflik Lokasi Matraman dan Menteng Tenggulun
 - Sarasehan Isu Politik Yang Berdampak Terhadap Konflik Horizontal
 - Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial Bagi Masyarakat
- b) Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial
- d. Program Penguatan Hubungan Kelembagaan**
- Penguatan hubungan Kelembagaan, melalui :
- a) Fasilitasi Pemuda Dalam Rangka Peningkatan Seni dan Budaya Lokal di Provinsi DKI Jakarta
 - b) Forum Silaturahmi Orsospol
 - c) Membangun Toleransi Pendirian Rumah Ibadah di Daerah Rawan Konflik
 - d) Pendataan Ulang dan Verifikasi Ormas dan LSM
 - e) Peningkatan Kemampuan Kemandirian Ormas dan LSM
 - f) Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Antar Kelompok Suku/Etnis
 - g) Peningkatan Penanganan Kesenjangan Ferekonomian di Provinsi DKI Jakarta
 - h) Rakor Kerukunan Menjelang Natal dan Tahun Baru

2.2.19. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Untuk urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp15.308.510.588.909,00 dengan total penyerapan sebesar Rp12.132.283.548.417,00 atau 79,25%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

a. Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

- a) Evaluasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

- b) Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda tentang Perdagangan dan Ranperda tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- b. Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian**
 - a) Koordinasi dan Monev Bagian Kelautan, Pertanian dan Pangan (Muara Angke, Agrowisata, Raskin, Pangan Strategis, dll)
 - b) Koordinasi dan Monev Bagian Koperasi dan UMKM, Industri, Energi dan Perdagangan (Industri Kreatif, PKL, Night Market, Energi, dll)
 - c) Koordinasi dan Monev Bagian Penanaman Modal, Promosi dan BUMD (KEK dan lain-lain)
 - d) Koordinasi dan Monev Bagian Perhubungan, Pariwisata dan Naker (LRT, Monorel, MRT, ERP)
 - e) Koordinasi dan Monev Sektor Badan Usaha Daerah
 - f) Koordinasi dan Monev Sektor Ekonomi Daerah
 - g) Koordinasi dan Monev Sektor Perdagangan dan Perpasaran
 - h) Koordinasi Pengembangan perekonomian dan ketenagakerjaan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015
 - i) Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah
 - j) Monitoring Pelaksanaan perizinan/non perizinan bidang perekonomian pada PTSP di DKI Jakarta
 - k) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perekonomian
- c. Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah**
 - a) Penyempurnaan Naskah Akademis dan Draft RUU Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007
 - b) Peningkatan peran dan kapasitas Camat dan Lurah
- d. Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia**
 - a) Pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) Biro Hukum
 - b) Pengurusan Perkara di Pengadilan serta Sengketa Pertanahan
- e. Program Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial**
 - a) Evaluasi Kinerja Program Usaha Kesehatan Sekolah
 - b) Koordinasi Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Pasca Banjir
 - c) Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kawasan Dilarang Merokok (KDM)
 - d) Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Klinik di Pasar atau Rumah Susun
 - e) Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Provinsi DKI Jakarta
 - f) Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penyakit Menular
 - g) Monitoring dan Evaluasi Program RW Siaga
 - h) Pembinaan dan Verifikasi Kota Sehat Tingkat Provinsi dan Nasional
 - i) Penyusunan Kebijakan Pelayanan Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta
 - j) Penyusunan Kebijakan Pengendalian Masalah Kesehatan
 - k) Penyusunan Kebijakan Tenaga Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta
 - l) Penyusunan Kebijakan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - m) Perumusan Kebijakan Sistem Informasi Kesehatan
 - n) Rapat Kerja Daerah Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah
 - o) Rapat Koordinasi Sistem Rujukan Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta
 - p) Koordinasi TKPK Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga (Klaster I)

- q) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
- r) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- s) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Penyusunan Kebijakan KB
- t) Koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan penyusunan kebijakan bantuan dan pemberdayaan sosial
- u) Koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan penyusunan kebijakan pelayanan dan fasilitas sosial
- v) Survey, Koordinasi dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
- f. Program Peningkatan Kerjasama Antardaerah dan Luar Negeri**
 - a) Sosialisasi, dialog dan lokakarya bidang kerjasama
 - b) Penguatan tugas dan fungsi Bidang Kerjasama Luar Negeri/ Internasional
- g. Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan dan Olahraga serta Pembinaan Mental Spiritual**
 - a) Koordinasi, Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Bidang Pendidikan serta Penyusunan Kebijakan Kependidikan Keperpustakaan dan Kearsipan
 - b) Koordinasi, Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Penyusunan Kebijakan dan Fasilitas Kegiatan Mental Spiritual dan Penyelenggaraan Haji Daerah
 - c) Koordinasi, Pembinaan, Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Kebijakan Keolahragaan dan Kepemudaan
- h. Program Koordinasi Kebijakan Prasarana dan Sarana Kota**
 - a) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Struktur Ruang Kota, melalui:
 - Koordinasi Pengembangan Sistem Prasarana Jalan
 - Koordinasi Sistem dan Jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara
 - Koordinasi Sistem dan Jaringan Transportasi Perkeretaapian
 - Koordinasi Sistem dan Jaringan Utilitas Perkotaan
 - Koordinasi Sistem Prasarana Sumber Daya Air
 - b) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pola Ruang Kota, melalui :
 - Koordinasi Sistem Prasarana Sumber Daya Air
 - Fasilitas Implementasi Pengembangan Kawasan
 - Fasilitas Penyelenggaraan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta
 - Koordinasi Pembangunan Kawasan Pemukiman
 - Koordinasi Pemenuhan Kewajiban Membangun Fisik Rumah Susun Murah / Sederhana
 - Pendalaman Substansi Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) dengan Para Pemegang SIPPT
 - Penyusunan SK Gubernur Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
 - Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
 - c) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau, melalui:
 - Evaluasi Pencapaian Program MDGs Pokja IV Kelestarian Lingkungan dan Kemiskinan
 - Peningkatan Fasilitas Strategi Mitigasi
 - Peningkatan Fasilitas Strategi Pengembangan RTH-

- d) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sanitasi dan Pencemaran, melalui:
 - Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Air Limbah
 - Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Kebersihan
- e) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kota, melalui :
 - Fasilitas Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bangunan di Provinsi DKI Jakarta
 - Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan IUJK di 5 Wilayah Provinsi DKI Jakarta
 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di 9 SKPD di Bawah Koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
 - Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Fasos Fasum Para Pemegang SIPPT
 - Pengendalian Penyelesaian Sanksi SP3L
 - Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Masyarakat Penyelenggara Jasa Konstruksi di Wilayah Provinsi DKI Jakarta
- i. Program Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Daerah**
 - a) Peningkatan administrasi Kantor Biro Umum
 - b) Pendayagunaan Pekerja Harian Lepas (PHL) Biro Umum
 - c) Biaya Makan dan Minum Petugas Pengamanan pada Aksi Unjuk Rasa
 - d) Penilaian dan Transfer Arsip ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
 - e) Pengadaan data base pengendalian pelaksanaan kegiatan
 - f) Pembinaan dan Pengendalian
 - g) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung
 - h) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung
 - i) Implementasi Sistem Administrasi Surat-Menyurat di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - j) Pekerjaan Instalasi baru panel listrik Gedung Blok H
- j. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur**
 - a) Sosialisasi kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - b) Penyusunan kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- k. Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah**
 - a) Peningkatan pelayanan keprotokolan dan tamu Pimpinan daerah
 - b) Pengadaan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dan pelayanan pimpinan daerah
- l. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**
 - a) Pelayanan tugas dan fungsi penyusunan produk bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - b) Pelayanan tugas dan fungsi komisi dan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- m. Program Koordinasi Perekonomian Kota/Kabupaten**
 - a) Partisipasi dan Penyelenggaraan Event Perekonomian di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur
 - b) Koordinasi Pembangunan Perekonomian di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur
 - c) Pengendalian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Jakarta Selatan

- n. Program Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten**
 - a) Koordinasi Pembangunan Pemerintahan di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan Kab. Adm. Kepulauan Seribu
 - b) Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Jakarta Pusat
 - c) Pengadaan Lahan Kantor Lurah Galur Jakarta Pusat dan Kantor Lurah Rawasari Jakarta Pusat
- o. Program Peningkatan Bantuan dan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota/Kabupaten**
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum di 5 wilayah Kota Administrasi.
- p. Program Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota/Kabupaten**
Koordinasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan
- q. Program Koordinasi Pendidikan dan Mental Spiritual Kota/Kabupaten**
 - a) Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Mental Spiritual di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat
 - b) Pembinaan Peserta MTQ Tingkat Kota Jakarta Pusat
 - c) Pelaksanaan MTQ berjenjang tingkat Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat
 - d) Koordinasi Pembangunan Pendidikan dan Mental Spiritual di Jakarta Selatan dan Kab. Adm. Kepulauan Seribu
- r. Program Koordinasi Prasarana dan Sarana Kota/Kabupaten**
 - a) Koordinasi Pembangunan Sarana Prasarana Kota di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan
 - b) Pembangunan kantor lurah dan camping Ground di Kab. Adm. Kepulauan Seribu
- s. Program Koordinasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten**
 - a) Koordinasi Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan
 - b) Koordinasi Penataan Kota dan Lingkungan Hidup di Jakarta Timur
- t. Program Administrasi Umum dan Keprotokolan Kota/Kabupaten**
 - a) Pemeliharaan Gedung, Fasilitas, dan Rumah dinas Walikota Jakarta Pusat
 - b) Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara
 - c) Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
 - d) Penyelenggaraan Kegiatan Bagian Keuangan
- u. Program Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan**
 - a) Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor Lurah
 - b) Pembangunan Kantor Lurah
 - c) Rehab Gedung Kantor Lurah dan Camat
- v. Program Peningkatan Kapasitas KORPRI**
Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota KOPRI Provinsi, 5 wilayah Kota dan Kab. Adm. Kepulauan Seribu
- w. Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**
 - a) Penyelenggaraan Koordinasi Tugas dan Fungsi Pengawasan

- b) Pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kas Akhir Tahun
- c) Reviu dan Evaluasi Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- x. **Program Percepatan Penyelesaian Tindak lanjut hasil pengawasan / Pemeriksaan**
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Tahun 2014 dan Tahun sebelumnya
- y. **Program Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
 - a) Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah Tahun 2015
 - b) Pembinaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
 - c) Pembinaan dan pengelolaan keuangan BLUD
- z. **Program Pengelolaan dan Penataan Aset Daerah**
 - a) Pengasuransian Aset Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - b) Evaluasi Lanjutan Hasil Sensus Barang Milik Daerah
 - c) Pengamanan secara Fisik/Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Utara dan Jakarta Barat
 - d) Pengamanan Aset secara Fisik/Pemasangan Papan Nama Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di 5 wilayah Kota Administrasi
- aa. **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
 - a) Penyediaan Tenaga Ahli/Nara Sumber untuk pengadaan barang/Jasa yang bersifat Khusus serta pre-audit proses pengadaan
 - b) Sosialisasi Peraturan Terkait Pengadaan Barang dan Jasa SKPD/UKPD
- bb. **Program Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah**
 - a) Pelaksanaan Perencanaan Potensi Penerimaan dan Pengembangan Pajak Daerah
 - b) Pelaksanaan Sensus Pajak Daerah
 - c) Pelaksanaan Jakarta *Reward*
- cc. **Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah**
Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Pajak
- dd. **Program Penyusunan Regulasi, Penyuluhan dan Sengketa Hukum Pajak Daerah**
Penyusunan Regulasi, Sosialisasi dan Sengketa Hukum Pajak Daerah
- ee. **Program Pelayanan Pajak Daerah**
 - a) Pelaksanaan Pelayanan Pajak
 - b) Pelaksanaan Penagihan Piutang Pajak Daerah
- ff. **Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur**
 - a) Koordinasi Penyelenggaraan Perencanaan dan Perdayagunaan Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - b) Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Informasi dan Statistik Kepegawaian
- gg. **Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai**
Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- hh. **Program Pendidikan dan Pelatihan**
 - a) Penyelenggaraan Fungsi Diklat
 - b) Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Kediklatan

- c) Partisipasi Penyelenggaraan Kerjasama Kediklatan dan Penjaminan Mutu
- ii. **Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat**
 - a) Penyelenggaraan Diklat Peningkatan Kapasitas Penjenjangan Dasar, Menengah dan Lanjutan
 - b) Penyelenggaraan Diklat Pengembangan Kapasitas Fungsional dan Teknis
 - c) Pengembangan Penyelenggaraan Uji Kompetensi dan Sertifikasi
- jj. **Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur DKI**
Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan Disiplin dan Kinerja Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- kk. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur DKI**
 - a) Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Karier Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 - b) Pengembangan dan Pengelolaan Kompetensi Manajerial Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- ll. **Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**
Pembinaan dan Pengembangan SDM Inspektorat
- mm. **Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana**
Pembinaan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
- nn. **Program Pengelolaan Sarana Informatika, Data dan Informasi Pelaporan Bencana**
 - a) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
 - b) Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah
- oo. **Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran**
 - a) Kajian Daerah Rawan Kebakaran
 - b) Pembangunan tandon air
 - c) Pembinaan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
 - d) Pengadaan dan Pengisian APAR dan kelengkapannya
 - e) Pembinaan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
- pp. **Program Penanggulangan Kebakaran**
 - a) Penyediaan Jasa Sewa Jaringan Komunikasi Data
 - b) Antisipasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan TA. 2015
 - c) Pengelolaan Dokumentasi Kebakaran
- qq. **Program Peningkatan Sarana, Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan**
 - a) Pengadaan Mobil Pompa 10.000 Liter (*High Pressure*)
 - b) Pengadaan Mobil Pompa 4.000 Liter (*Medium Pressure*)
 - c) Pengadaan Mobil Pompa dan Kelengkapannya untuk kawasan rawan kebakaran
 - d) Pengadaan sarana UPT Bengkel Induk
 - e) Pengelolaan dan perawatan Sistem *Command Centre*
- rr. **Program Penyelamatan**
Pendidikan dan Pelatihan Petugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
- ss. **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**
 - a) Koordinasi penyusunan kebijakan dan standarisasi pelayanan publik
 - b) Monitoring dan evaluasi bidang pembinaan
 - c) Bimbingan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan
 - d) Pengelolaan pengaduan/keluhan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan

- e) Koordinasi penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan perizinan dan non perizinan
- f) Pengendalian dan Evaluasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan/keluhan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
- g) Koordinasi pelaksanaan dan peningkatan pelayanan Administrasi perizinan dan non perizinan
- h) Penyediaan Jasa dan peralatan pendukung penelitian teknis
- i) Pengelolaan dan pengembangan sistem teknologi informasi pelayanan publik
- j) Pengelolaan dan pengembangan sistem teknologi informasi pelayanan publik
- k) Monitoring dan evaluasi operasional sistem teknologi Informasi penyelenggaraan PTSP
- l) Sosialisasi dan Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- m) Peningkatan kompetensi pegawai dalam penerapan sistem teknologi informasi
- n) Digitalisasi Arsip Perizinan dan Non Perizinan
- o) Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- tt. Program Peningkatan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**
 - a) Penyelenggaraan dan Partisipasi Event Satpol PP
 - b) Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP
- uu. Program Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Menegakkan Peraturan**
Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Satpol PP
- vv. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat**
Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Daerah

2.2.20. Urusan Ketahanan Pangan

Untuk urusan Ketahanan Pangan, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp77.914.380.097,00 dengan total penyerapan sebesar Rp48.980.367.559,00 atau 62,86%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Program Pengamanan Ketersediaan Pangan, Pengendalian Akses, Harga, Promosi dan Distribusi/Pemasaran**
Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Ketahanan Pangan
 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian tingkat provinsi dalam rangka mendukung Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
 - Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan produk Pertanian dalam rangka mendukung Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
 - Pengembangan Sistem Distribusi
 - Penyelenggaraan dan Partisipasi Pameran dalam rangka mendukung Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
 - Penyelenggaraan Pasar Murah Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional

b. Program Peningkatan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Pertanian, melalui:

- Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Pertanian
- Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Jakarta Barat
- Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Pusat Pengembangan Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Kehutanan
- Pembuatan Instalasi Penyiraman di Kebun Bibit Cibubur, Kelapa Dua Wetan dan Sumur Dalam di Kebun Bibit Cilangkap
- Pemeliharaan Alat Mesin Pertanian dan Laboratorium
- Pemeliharaan Bibit dan Pohon Induk

c. Program Peningkatan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Perikanan

- a) Penanganan Jaminan Pengujian Mutu
- b) Pengadaan Sarana Prasarana

d. Program Peningkatan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hewan (kesmavet)

Penjaminan Produk Hewan ASUH dan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Hewan dan pada Hari Besar Keagamaan

2.2.21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp282.369.665.858,00 dengan total penyerapan sebesar Rp250.980.500.518,00 atau 88,88%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

- a) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- b) Peningkatan sanitasi masyarakat melalui Program Sanimas IDB

b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui :

- Fasilitasi Kemitraan Usaha Masyarakat dengan sektor industri/BUMN/BUMD/Bank/CSR
- Gelar, Kemitraan dan Partisipasi Pameran TTG Tingkat Provinsi DKI Jakarta dan Nasional
- Pelatihan Kewirausahaan bagi kelompok usaha Wartek
- Pemanfaatan sumber daya alam melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
- Penyusunan Profil TTG Provinsi DKI Jakarta
- Rakortek dalam rangka Pengembangan Sumber Daya dan Usaha Masyarakat
- Rakortek Perencanaan Bidang Teknologi Tepat Guna dan Jaringan Informasi
- TOT TTG bagi Kader Posyantek dan Wartek

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat

- a) Pengadaan Sarana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
- b) Penyempurnaan Pembangunan Kantor

2.2.22. Urusan Statistik

Untuk urusan statistik, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp449.076.666,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp136.351.388,00 atau 30,36%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

a. Program Statistik Daerah

- a) Penyusunan Kajian *Technopark* Jakarta
- b) Penyelenggaraan Pengembangan Perencanaan dan Inovasi Daerah

2.2.23. Urusan Kearsipan

Untuk urusan kearsipan, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp49.534.963.578,00 dengan total penyerapan sebesar Rp5.772.370.417,00 atau 11,65%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

a. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

- a) Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan
 - Penyusunan Master Plan Pengembangan Kearsipan
 - Optimalisasi Sistem Informasi dan Database Kearsipan
 - Pengadaan lemari simpan arsip
- b) Pembinaan, pelestarian dan penyelamatan arsip daerah
 - Penelusuran arsip tempo dulu
 - Pengadaan boks dan map arsip
 - Pengembangan alih media arsip
 - Perekaman peristiwa/fenomena di Jakarta

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kearsipan meliputi :

- Pengadaan Sarana Prasarana Kearsipan Dinamis
- Rehab Gedung Depo Arsip Pulomas Blok B dan D

c. Program Pengembangan Kapasitas Penyimpanan Arsip Daerah

Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor BPAD Pulo Mas.

d. Program Peningkatan Pelayanan Arsip

Pembinaan dan Penyelenggaraan Layanan Kearsipan meliputi :

- Akuisisi kearsipan
- Asistensi kearsipan
- Penataan dan Penyusutan Arsip Daerah
- Penyusunan dan Revisi Peraturan Bidang Kearsipan

2.2.24. Urusan Komunikasi dan Informatika

Untuk urusan komunikasi dan informatika, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp308.868.013.136,00 dengan total penyerapan sebesar Rp215.356.028.450,00 atau 69,72%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

a. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

- a) Pemeliharaan Pusat Data dan Perangkat Teknologi Informasi
- b) Penataan, Pengembangan dan Dukungan Teknis Pengelolaan Sistem Aplikasi
- c) Pengadaan Software Interkoneksi Pemprov DKI Jakarta

- d) Implementasi Pergub No.39 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
- e) Pelaksanaan Rekomendasi kegiatan berbasis TIK di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

b. Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik

- a) Pembinaan dan Penyelenggaraan Kerjasama Kehumasan
- b) Penyiapan Materi dan Dokumentasi Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
- c) Pengelolaan Informasi Publik serta Penerbitan dan Media Luar Ruang
- d) Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Publik
- e) Penyelenggaraan Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) dan Komisi Informasi Provinsi (KIP) DKI Jakarta
- f) Pengelolaan Jakarta *Smart City*
- g) Pengelolaan Perangkat Monitoring dan Analisis Berita di Media Massa dan Media Sosial
- h) Pembuatan SOP Jakarta *Smart City*
- i) Pengadaan Mebeulair Jakarta *Smart City*

c. Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

- a) Penyediaan Sarana Telekomunikasi Data dan Lisensi Perangkat Lunak
- b) Pengelolaan Perangkat Teknologi Informasi, Data Center dan DRC
- c) *Tuning Relation database management system (RDBMS)*
- d) Pengembangan dan pengelolaan Teknologi dan Pengamanan Jaringan Komunikasi Data

d. Program Peningkatan Pelayanan dan Jasa Pos serta Telekomunikasi

- a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi
- b) Pemeliharaan / Perawatan / Penggantian Suku Cadang Sarana dan Prasarana Telekomunikasi
- c) Pengelolaan BTS *Trunking* (BHP Frekuensi, Listrik, dan Sewa Lokasi)

e. Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) serta Pelaksanaan *e-Procurement* Sistem Nasional dan Aplikasi Lainnya

2.2.25. Urusan Perpustakaan

Untuk urusan perpustakaan, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp177.880.478.636,00 dengan total penyerapan sebesar Rp111.340.191.527,00 atau 62,59%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

a. Program pengembangan Budaya Baca

- a) Penyelenggaraan dan Partisipasi Event Perpustakaan dan Arsip antara lain :
 - Hari Anak Jakarta Membaca (HANJABA)
 - Pemilihan Abang dan None Buku (ABNONKU) serta Pemberdayaan Ikatan Abang dan None Buku (IKANOBU)
- b) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) berupa karpet, kipas angin, dan buku umum

b. Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan

Pembinaan dan Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan antara lain :

- Pengadaan koleksi perpustakaan dan pengelolaan Karya Cipta Karya Rekam (KCKR)
- Penyediaan layanan perpustakaan pada hari Sabtu dan Minggu
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan**
 - a) Pengembangan layanan Perpustakaan Kecamatan dan Kelurahan dan KPAK Kepulauan Seribu
 - b) Pengadaan buku elektronik

2.2.26. Urusan Pertanian

Untuk urusan pertanian, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp61.551.964.696,00 dengan total penyerapan sebesar Rp38.911.412.531,00 atau 63,22%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura**
 - a) Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Proteksi Tanaman
 - b) Pelayanan Promosi dan Pemasaran Hortikultura
 - c) Promosi/publikasi Layanan Laboratorium
 - d) Partisipasi Pameran dalam rangka menunjang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
 - e) Penyelenggaraan dan partisipasi event Peternakar, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan
 - f) Monitoring Ketersediaan Pangan dan Harga
- b. Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hewan**
 - a) Pemeliharaan dan Perawatan Ternak Unggas, Ruminansia dan Ternak Harapan
 - b) Pengadaan Pakan Ternak Percontohan di 4 Taman Ternak
 - c) Pembinaan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan
 - d) Peningkatan Kesehatan Petugas/Penguji
 - e) Pelayanan Pengujian Laboratorium Kesmavet
 - f) Pelayanan Pos Kesehatan Hewan
 - g) Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan, Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
- c. Program Peningkatan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Zoonosis**
 - a) Pencegahan dan Penanganan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis
 - b) Pengendalian penyakit hewan menular strategis, zoonosis (Rabies, AI, Anthrax, Brucellosis)
 - c) Pemeliharaan dan Perawatan Alat-alat Produksi dan Cold Storage Rumah Potong Hewan (RPH)
 - d) Pengadaan Sarana Prasarana RPH dan Pengendalian Zoonosis dalam rangka mendukung Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
 - e) Pelayanan kesehatan hewan pada hari besar keagamaan
- d. Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura**
 - a) Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Promosi dan Pemasaran Hortikultura

- b) Penyelenggaraan dan Partisipasi Event Promosi dan Pemasaran Hortikultura melalui Festival Buah dan Anggrek, Gebyar Bunga, Flona, Jakarta Karnaval dan PF2N
- c) Pelaksanaan Penyesuaian Dokumen Sistem Mutu, Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman
- d) Pembinaan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan dan hortikultura
- e) Pembinaan mutu dan keamanan pangan hasil peternakan
- f) Pembinaan pasar bebas formalin ayam pedaging
- g) Pembinaan penganeekaragaman konsumsi pangan
- h) Pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan
- i) Pengembangan Pertanian Perkotaan

2.2.27. Urusan Kehutanan

Untuk urusan kehutanan pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp6.807.091.176,00 dengan total penyerapan sebesar Rp5.422.269.183,00 atau 79,66%. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

Program Pengolahan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan

- 1) Pengawasan Hutan Kota dan Peredaran Hasil Hutan
- 2) Pemeliharaan Tanaman Buah
- 3) Pemeliharaan Hutan Kota

2.2.28. Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral

Untuk urusan energi dan sumber daya mineral, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp26.827.821.723,00 dengan total penyerapan sebesar Rp9.144.250.472,00 atau 34,08%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

a. Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

- a) Perbaikan dan Pemeliharaan *Reserve Osmosis* (RO)
- b) Pelaksanaan Piket Posko dan survei malam hari
- c) Pembangunan Implementasi Penggunaan *Solar Cell* untuk Penerangan Jalan dan atau Tempat Umum di Wilayah Jakarta Barat
- d) Rekomendasi sistem laik operasi instalasi PJU *existing*
- e) Penatachayaan Event di 5 Wilayah Kota
- f) Pemberdayaan Petugas Kelistrikan dan Air Bersih
- g) Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Perindustrian dan Energi

b. Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Pencahayaan Kota

- a) Pembangunan / Peningkatan Kualitas Penerangan Jalan Umum pada Jalan Lokal/MHT di 16 Kecamatan
- b) Pembangunan Sistem Monitoring PJU Berbasis IT
- c) Pembangunan Lampu PJU LED Jalan Inspeksi (Sejajar Kali)
- d) Penataan/Relokasi Sarana dan Prasarana PJU Akibat Kegiatan Instansi Terkait dan Lainnya
- e) Pemeliharaan/Perawatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di 31 Kecamatan
- f) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum Jaringan PJU
- g) Piket posko dan survey malam hari

- h) Pengadaan Komponen Lepas Cover Atlas D.60, Cover Ampora, Armatur HPS 70 dan 150 Watt (Lampu, *Ballast* dan *Capasitor*), MC dan HPIT serta Armatur MC 250 Watt (Lampu, *Ballast* dan *Cafasitor*),
- i) Pengadaan Armature Lengkap HPS 70 Watt dan HPS 150 Watt, LED 40 watt, 90 watt, 120-130 watt, dan 200 watt
- j) Pengadaan Armatur Lengkap LED Jalan Lingkungan, MHT, Arteri, dan Kolektor serta Lampu LED Indoor
- k) Penatacahayaan Event di 5 Wilayah Kota
- l) Pembangunan/Peningkatan Kualitas Penerangan Jalan MHT/Lingkungan di 5 wilayah kota
- m) Pemeliharaan/Perawatan Pencahayaan di 5 wilayah kota
- n) Pengadaan Mobil Tangga serta Mobil Pengendalian dan Pengawasan
- o) Pekerjaan Kabel NYFGBY dan *twisted* dalam Penyeimbangan Daya Fasa R, S, T di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur
- p) Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota Sepanjang Jalan Perbatasan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur

2.2.29. Urusan Pariwisata

Untuk urusan pariwisata, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp216.374.183.364,00 dengan total penyerapan sebesar Rp161.506.205.484 atau 74,64%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

- a) Partisipasi Event Pariwisata Dalam Negeri dan Jakarta Marathon
- b) Penyelenggaraan Event Musik, Film, Teater, Seni, Budaya, Museum, Heritage, Festival Internasional dan Pariwisata Dalam Negeri

b. Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata

- a) Penyelenggaraan Badan Promosi Pariwisata Jakarta dan Jakarta *Convention and Exhibition Bureau* (JCNEB)
- b) Promosi Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta
- c) Pembuatan *Calender of Event*
- d) Partisipasi Pada Kegiatan Hello Indonesia 2015 di London Inggris, Otdykh Leisure di Moskow Rusia, Indonesia Culture Week di Roma, World Expo di Milan Italia dan Festival Indonesia di Jepang

c. Program Peningkatan Industri Kepariwisata

Pembinaan dan Pengendalian Kepariwisata

d. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata

- a) Rehab Berat Gedung Anjungan TMII dan Gedung Sangkrini TMII
- b) Rehab Gedung Graha Wisata Ragunan
- c) Perencanaan Pariwisata Dan Kebudayaan

2.2.30. Urusan Kelautan Dan Perikanan

Untuk urusan kelautan dan perikanan, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp608.781.073.254,00 dengan total penyerapan sebesar Rp459.109.716.421,00 atau 75,41%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a. **Program Peningkatan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Berkelanjutan**
Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kelautan dan Perikanan meliputi
 - a) Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
 - b) Pengembangan Perikanan Budidaya
- b. **Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap**
 - a) Pendataan dan Penandaan Kapal perikanan
 - b) Pengadaan Sarana Penunjang Dermaga P. Tidung Kecil
 - c) Pengembangan Sarana Prasarana Dermaga Tipe T Muara Angke
 - d) Penyelesaian pembuatan *sheet pile*
 - e) Rehab Bangunan Eks Pasar Pelelangan Ikan di Pasar Ikan (Cagar Budaya)
 - f) *Updating* Sistem Informasi Perikanan
 - g) Revitalisasi Kios Pedagang Ikan di TPI Kamal Muara dan Alat Penangkap Ikan
- c. **Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**
 - a) Pembinaan dan Pengembangan Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan
 - b) Promosi Pusat Budidaya Perikanan
 - c) Rehab sarana pemasaran hasil perikanan

2.2.31. Urusan Perdagangan

Untuk urusan perdagangan, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp29.029.169.199,00 dengan total penyerapan sebesar Rp10.537.312.815,00 atau 36,29%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. **Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan Dalam Negeri**
 - a) Pelayanan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
 - b) Forum Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah (PEPIDA) Tahun 2015.
- b. **Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri**
Partisipasi Promosi dan Eksportir Pada Event Dalam Negeri Bertaraf Nasional/Internasional
- c. **Program Perlindungan Konsumen, Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan**
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan berupa Pengawasan dan penegakan hukum Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
- d. **Program Peningkatan Pelayanan Kemetrolgian**
 - a) Peningkatan Administrasi Perkantoran UPT Balai Metrologi
 - b) Penyediaan Media Uji dan Pemeliharaan Alat-alat Berat/Genset
 - c) Partisi Interior Ruang Rapat dan Ruang Kepala Balai Metrologi
 - d) Partisipasi Pertemuan Teknis Kemetrolgian dan Peningkatan Sarana Pelayanan Kemetrolgian
 - e) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kemetrolgian

2.2.32. Urusan Perindustrian

Untuk urusan perindustrian, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp1.355.978.865.405,00 dengan total penyerapan sebesar Rp1.077.536.180.067,00 atau 79,47%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

a. Program Pengembangan dan Pengendalian Industri

Penyelenggaraan dan Partisipasi Event Perindustrian meliputi Gelar Produk Unggulan IKM pada Pameran di Dalam Daerah dan di Jakarta

b. Program Peningkatan Kualitas Produk Industri

Pengembangan dan Peningkatan Laboratorium meliputi Akreditasi Laboratorium Kalibrasi, Jasa Kalibrasi Peralatan Laboratorium UIB2T, Jasa Konsultansi Penerapan ISO 17025, Jasa Konsultansi Penerapan ISO 17067 : 2013 serta Pengadaan Alat Lab dan Alat Bengkel

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri

Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Frasarana Laboratorium

2.3. Evaluasi APBD 2016 Sampai Dengan Triwulan II tahun 2016

Pada prinsipnya, Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah. Jadi APBD menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan baik yang meliputi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Berkaitan dengan hal ini, maka pada Bab ini akan diuraikan secara terinci tentang evaluasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan daerah.

2.3.1 Pendapatan Daerah

Pada APBD tahun 2016, ditetapkan pendapatan daerah sebesar Rp.59.004.784.464.142,- yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Lebih rinci, berikut adalah uraian realisasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok jenis pendapatan daerah sampai dengan tanggal 30 Juni 2016:

Tabel 2.4. Realisasi Pendapatan sampai dengan 30 Juni 2016

No.	Uraian	2016		%
		APBD 2016	Realisasi s.d. 30 Juni 2016	
	PENDAPATAN DAERAH			
A.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	39.322.613.624.142	14.692.970.449.305	37,37
1.	Pajak Daerah	32.010.000.000.000	12.614.410.961.999	39,41
a.	Pajak Kendaraan Bermotor	7.050.000.000.000	3.692.016.749.862	52,37
b.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.800.000.000.000	2.495.030.357.500	51,98
c.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.300.000.000.000	556.094.499.686	42,78
d.	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah	100.000.000.000	49.630.426.416	49,63
e.	Pajak Hotel	1.600.000.000.000	721.915.798.696	45,12
f.	Pajak Restoran	2.550.000.000.000	1.130.573.233.039	44,34

No.	Uraian	2016		%
		APBD 2016	Realisasi s.d 30 Juni 2016	
g.	Pajak Hiburan	700.000.000.000	352.893.376.803	50,41
h.	Pajak Reklame	1.150.000.000.000	372.814.044.032	32,42
i.	Pajak Penerangan Jalan	760.000.000.000	360.230.350.928	47,40
j.	Pajak Parkir	500.000.000.000	232.322.763.789	46,46
k.	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	4.600.000.000.000	1.235.607.804.371	26,86
l.	Pajak rokok	500.000.000.000	171.433.714.008	34,29
m.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.400.000.000.000	1.243.847.842.869	19,44
n.	Pajak air Permukaan	0	0	0
2.	Retribusi Daerah	800.000.000.000	292.864.344.039	36,61
a.	Retribusi Jasa Umum	300.350.000.000	32.137.945.865	10,70
b.	Retribusi Jasa Usaha	100.000.000.000	49.334.135.008	49,33
c.	Retribusi Perizinan Tertentu	399.650.000.000	211.392.263.166	52,89
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	790.000.000.000	100.098.717.458	12,67
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	5.722.613.624.142	1.685.596.425.809	29,46
B.	Dana Perimbangan	13.867.897.878.000	6.969.420.127.619	50,22
1.	Dana Bagi Hasil	13.867.897.878.000	6.960.683.712.619	50,26
a.	Dana Bagi Hasil Pajak	13.819.992.249.000	6.902.621.020.606	49,95
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak	47.905.629.000	58.062.692.013	121,20
2.	Dana Alokasi Khusus	-	8.736.415.000	-
C.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.814.272.962.000	1.402.354.134.000	39,38
1.	Pendapatan Hibah	2.244.419.882.000	5.548.800.000	0,25
2.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	3.569.853.080.000	1.396.805.334.000	39,13
PENDAPATAN DAERAH (A+B+C)		59.004.784.464.142	23.064.744.710.924	39,09

Sumber : BPKAD Provinsi DKI Jakarta, 2016

A. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang potensial dan strategis. Dimana pendapatan dari pajak daerah merupakan salah satu sumber utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya Provinsi DKI Jakarta. Pada APBD tahun 2016, sebesar 54,25 persen dari pendapatan daerah direncanakan akan diperoleh dari pajak daerah. Adapun realisasi pajak daerah sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp12.614.410.961.999,- atau sebesar 39,41% dibandingkan dengan rencana pendapatan pajak daerah. Sementara realisasi pajak daerah tercapai sebesar 54,69 persen dari realisasi pendapatan daerah, atau sebesar Rp12.614.410.961.999,-.

Dari hasil evaluasi sampai dengan akhir bulan Juni 2016, masih diperlukan kebijakan yang komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah. Beberapa rencana umum kebijakan yang perlu diperhatikan dalam rangka optimalisasi pajak di Jakarta terutama untuk diterapkan pada Semester II tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Rencana perubahan tarif Pajak Parkir yang sebelumnya 20 persen menjadi 30 persen.
- Rencana pengurangan BPHTB terhadap transaksi yang dilakukan oleh Dana Investasi Real Estate (DIRE) dan rencana perubahan PPJB menjadi salah satu dasar pengenaan BPHTB.
- Rencana perubahan tarif PBB-P2 yang sebelumnya 0,01 persen; 0,1 persen; 0,2 persen dan 0,3 persen menjadi 0 persen; 0,1 persen dan 0,3 persen.

Selanjutnya penjelasan perubahan kebijakan pajak daerah berdasarkan masing-masing jenis pajak secara terperinci yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sejalan dengan pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor baru di Provinsi DKI Jakarta, akan tetapi sejak ditetapkannya tarif progresif baru per Mei 2015, jumlah kendaraan bermotor yang melakukan mutasi keluar daerah meningkat secara signifikan. Oleh karena itu diperlukannya upaya-upaya yang lebih komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Salah satunya melalui kebijakan atas penghapusan sanksi administrasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, yang diharapkan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor dapat sesuai dengan potensi yang ada.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan data penjualan pada semester I tahun 2016 terjadi peningkatan penjualan kendaraan bermotor yang tidak terlalu signifikan, namun demikian terjadi penurunan pada nilai transaksi atas penjualan jika dibandingkan data penjualan kendaraan bermotor pada tahun 2015 yang disebabkan oleh adanya penurunan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016. Selain itu, terjadinya penurunan diduga disebabkan oleh masih belum membaiknya kondisi perekonomian yang berimplikasi pada penurunan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor baru. Untuk itu diperlukan kebijakan law enforcement, kecermatan dan ketelitian pada proses perencanaan dan pemungutan pajak pada jenis pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor guna mengoptimalkan penerimaan pajak.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada semester I tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan realisasi pada semester I tahun 2015. Hal tersebut disebabkan adanya penurunan harga minyak dunia yang

berdampak pada penurunan harga bahan bakar minyak per liter yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2016.

d. Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran diperlukan kebijakan yang proaktif sehingga pada semester II tahun 2016 akan tercapai target yang telah ditetapkan. Beberapa upaya yang akan dilakukan antara lain:

- 1) Pemeriksaan pajak yang termasuk dalam kelompok Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
- 2) Pencairan piutang pajak;
- 3) Pendataan Wajib Pajak baru;
- 4) Peningkatan optimalisasi pemasangan *online system*;
- 5) Penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa, sita, dan lelang (penagihan aktif);
- 6) Monitoring pelaksanaan pembayaran Setoran Masa minimal; dan
- 7) Pemasangan stiker terhadap objek pajak yang tidak melakukan pembayaran.

e. Pajak Hiburan

Dalam rangka pencapaian penerimaan Pajak Hiburan pada Semester II tahun 2016 diperlukan upaya-upaya komprehensif. Upaya tersebut antara lain:

- 1) Pengukuhan menjadi Objek Pajak Hiburan terhadap Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran yang menjalankan aktifitas hiburan sebagai core businessnya;
- 2) Reklasifikasi jenis hiburan tempat wisata/rekreasi menjadi objek pajak hiburan;
- 3) Pemeriksaan pajak;
- 4) Pencairan piutang pajak;
- 5) Pendataan Wajib Pajak baru;
- 6) Peningkatan optimalisasi pemasangan online system;
- 7) Penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa, sita, dan lelang (penagihan aktif);
- 8) Monitoring pelaksanaan pembayaran Setoran Masa minimal;
- 9) Pemasangan stiker terhadap objek pajak yang tidak melakukan pembayaran; dan
- 10) Optimalisasi pengawasan hiburan insidental.

f. Pajak Parkir

Dalam rangka pencapaian penerimaan Pajak Parkir pada Semester II tahun 2016, upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Pemerintah Prov. DKI Jakarta atas perubahan tarif Pajak Parkir yang sebelumnya 20 persen menjadi 30 persen;
- 2) Pemeriksaan pajak;
- 3) Pencairan piutang pajak;
- 4) Pendataan Wajib Pajak baru;
- 5) Peningkatan optimalisasi pemasangan online system;

- 6) Penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa, sita, dan lelang (penagihan aktif);
- 7) Monitoring pelaksanaan pembayaran Setoran Masa minimal; dan
- 8) Pemasangan stiker terhadap objek pajak yang tidak melakukan pembayaran.

g. Pajak Reklame

Dalam rangka pencapaian penerimaan Pajak Reklame pada Semester II tahun 2016, upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian klasifikasi kelas jalan dan tarif kelas jalan sebagai dasar pengenaan pajak reklame;
- 2) Penyesuaian Nilai Sewa Reklame (NSR);
- 3) Pemeriksaan pajak dan pendataan Wajib Pajak baru;
- 4) Pencairan tunggakan dan penagihan terhadap reklame yang belum melakukan daftar ulang; dan
- 5) Sosialisasi kepada penyelenggara reklame untuk menggunakan reklame LED.

h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Dalam rangka pencapaian penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Semester II tahun 2016, upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai berikut :

- 1) Adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat dalam melonggarkan aturan rasio pinjaman terhadap aset (Loan to Value) atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang semula 30% menjadi minimal 10% serta diikuti dengan penurunan suku bunga pinjaman;
- 2) MoU antara Pemprov DKI Jakarta, BPN, PPAT dan Bank dalam pemungutan BPHTB;
- 3) Kebijakan Pengenaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai objek BPHTB dan kebijakan mendorong percepatan PPJB menjadi Akta Jual Beli (AJB) terhadap Objek Apartement dan Strata Title lainnya;
- 4) Pencairan piutang pajak; dan
- 5) Penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa, sita, dan lelang (penagihan aktif).

i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dalam rangka pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Semester II tahun 2016, upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai berikut:

- 1) Penagihan pajak dengan surat paksa sita dan lelang (penagihan aktif) terhadap tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 2) Kebijakan Pemerintah Prov. DKI Jakarta atas perubahan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- 3) Kebijakan Pemerintah Prov. DKI Jakarta dalam penundaan dan penghapusan sanksi administrasi pembayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 4) Pemasangan plang penunggak PBB-P2.

B. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi diperlukan beberapa kebijakan yaitu Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah, Peningkatan Law Enforcement, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah.

Beberapa kebijakan yang diperlukan untuk Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah adalah :

- 1) Penerapan e-Retribusi dalam pemungutan Retribusi Daerah;
- 2) Menerapkan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi;
- 3) Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, sebagian pelayanan Retribusi Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan melalui Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP); dan
- 4) Menerapkan sistem *e - ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.

Kebijakan dalam hal Peningkatan *Law Enforcement* telah dilakukan secara sistematis. Namun untuk semester II tahun 2016, peningkatan *law enforcement* masih perlu dilakukan. *Law enforcement* yang akan dilakukan antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah; dan
- 2) Melakukan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Bank dalam rangka pembayaran retribusi Daerah.

Intensifikasi dan ekstensifikasi perlu dilakukan secara komprehensif guna optimalisasi penerimaan retribusi. Dalam hal Intensifikasi dan ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah dilakukan beberapa kebijakan antara lain :

- 1) Melakukan penyesuaian tarif secara komprehensif untuk beberapa jenis retribusi Daerah; dan
- 2) Melakukan pembaharuan sistem pelayanan dan pembayaran Retribusi UKM.

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, perusahaan daerah, dividen dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan kinerja kedua komponen pendapatan ini di daerah, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
- 2) Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
- 3) Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD; dan
- 4) Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dll.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerima daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain:

- 1) Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga;
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- 3) Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui Debt Management; dan
- 4) Mengoptimalkan pendapatan BLUD dengan penambahan dari 15 Rumah Sakit tingkat Kecamatan menjadi 19 Rumah Sakit tingkat Kecamatan.

D. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Untuk meningkatkan kinerja dana perimbangan, diperlukan suatu kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) dengan melakukan kegiatan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

E. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh hibah dari pemerintah pusat atas proyek MRT Jakarta sesuai dengan perjanjian hibah daerah beserta amandemen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang didalam penarikan hibah tersebut pencairannya sesuai dengan persentase pekerjaan proyek MRT Jakarta, Hibah PT. Jasa Raharja (Persero), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Tunjangan Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi.

2.3.2 Belanja Daerah

Belanja daerah pada APBD tahun 2016 direncanakan sebesar Rp59.945.522.786.232,- yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp34.382.577.360.479 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp25.562.945.425.753,-. Realisasi belanja daerah sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 telah tercapai sebesar 29,05 persen atau sebesar Rp17.414.045.046.769,-. Dari sejumlah tersebut, sebanyak Rp6.124.311.042.783,- merupakan realisasi Belanja Langsung dan sebesar Rp11.289.734.003.986,- merupakan realisasi Belanja Tidak Langsung. Berikut adalah rincian realisasi belanja tahun 2016.

Tabel 2.5. Realisasi Belanja Daerah sampai 30 Juni 2016

No.	Uraian	2016		%
		APBD	Realisasi s.d. 30 Juni 2016	
II	BELANJA DAERAH			
A.	Belanja Tidak Langsung	25.562.945.425.753	11.289.734.003.986	44,16
1.	Belanja Pegawai	18.715.193.047.771	8.852.664.085.320	47,30
2.	Belanja Bunga	30.000.000.000	4.383.126.884	14,61
3.	Belanja Subsidi	1.612.726.275.800	-	-
4.	Belanja Hibah	2.550.498.855.395	1.369.217.858.762	53,68
5.	Belanja Bantuan Sosial	2.524.193.425.000	1.062.902.140.000	42,11
6.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	1.818.003.960	566.793.020	31,18
7.	Belanja Tidak Terduga	128.515.817.827	-	-
B.	Belanja Langsung	34.382.577.360.479	6.124.311.042.783	17,81
1.	Belanja Pegawai	1.575.091.993.662	467.336.293.542	29,67
2.	Belanja Barang Dan Jasa	16.624.523.868.403	4.674.021.218.468	28,12
3.	Belanja Modal	16.182.961.498.414	982.953.530.773	6,07
JUMLAH BELANJA (A + B)		59.945.522.786.232	17.414.045.046.769	29,05

Sumber : BPKAD Provinsi DKI Jakarta, 2016

Berdasarkan Tabel 2.5 di atas, diperoleh data bahwa total belanja pada APBD penetapan tahun 2016 adalah Rp.59.945.522.786.232,-. Belanja ini terdiri dari belanja Langsung sebesar Rp.34.382.577.360.479,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp.25.562.945.425.753,-.

Sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2016 untuk Belanja Tidak Langsung telah terealisasi 44,16 persen sedangkan Belanja Langsung sebesar 17,81 persen. Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi,

Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Untuk Belanja Tidak Langsung ini, pos belanja dengan tingkat realisasi yang paling besar adalah Belanja Hibah yaitu sebesar 53,68 persen.

Sedangkan untuk Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal dengan proporsi paling besar pada Belanja Barang dan Jasa. Sampai tanggal 30 juni tahun 2016, realisasi belanja yang paling besar terjadi pada Belanja Pegawai sebesar 29,67 persen. Sementara itu di sisi lain Belanja Modal baru hanya terealisasi sebesar 6,07 persen. Selanjutnya, data total belanja telah terealisasi sebesar 29,04 persen.

Realisasi belanja yang relatif masih kecil ini disebabkan oleh berbagai faktor. Untuk itu faktor-faktor ini perlu dilakukan identifikasi dan dicarikan solusinya agar realisasi belanja dapat lebih meningkat dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta secara keseluruhan.

Beberapa kebijakan perubahan belanja daerah untuk Perubahan RKPD 2016 antara lain :

A. Penambahan Anggaran Belanja pada Kegiatan yang Sudah Ada dalam APBD 2016

Penyesuaian anggaran termasuk penambahan anggaran belanja dimaksudkan agar pada pelaksanaan APBD perubahan 2016 dapat lebih efisien dan efektif serta bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Dalam hal ini kriteria dalam perencanaan penambahan anggaran belanja pada kegiatan yang sudah ada dalam APBD penetapan 2016 antara lain sebagai berikut:

- 1) Kenaikan gaji dan tunjangan;
- 2) Kekurangan belanja jasa telepon, air, listrik, dan internet (TALI);
- 3) Penambahan operasional BLUD, menyesuaikan dengan kenaikan pendapatan;
- 4) Peningkatan pelayanan langsung kepada masyarakat (PTSP, obat-obatan, makanan, BOP, KJP, BPJS Kesehatan, BPS, BOK, penunjang pendidikan warga binaan sosial, peningkatan mutu pendudukan bagi penerima KJP yang lolos seleksi PTN);
- 5) Arahan tertulis gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah dengan mempertimbangkan waktu dan ketersediaan anggaran;
- 6) Pemenuhan kebijakan pemerintah pusat; dan
- 7) Penambahan gaji non PNS sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk untuk penambahan BPJS Kesehatan;
- 8) Kegiatan yang memfokuskan untuk memenuhi target RPJMD 2013-2017.

B. Pengalokasian Anggaran untuk Kegiatan Baru

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan baru pada APBD perubahan 2016 dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga menjadi lebih efisien dan efektif serta bermanfaat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Selain itu, juga untuk mendukung perencanaan pembangunan ke depan. Dalam hal ini kriteria dalam pengalokasian rencana kegiatan baru pada APBD perubahan 2016 adalah antara lain sebagai berikut :

- 1) Kegiatan yang berkaitan dengan pembebasan lahan untuk mendukung kegiatan pada tahun 2017;
- 2) Kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan perencanaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung Tahun 2017;
- 3) Kegiatan yang berkaitan dengan penerapan swakelola TPST bantargebang;
- 4) Kegiatan yang pemenuhan operasional dan TAL;
- 5) Kegiatan yang berhubungan pembayaran hutang;
- 6) Kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dokumen perencanaan daerah;
- 7) Kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan alat kebersihan dan pemadam kebakaran;
- 8) Kegiatan yang memfokuskan untuk memenuhi target RPJMD 2013-2017.

C. Pengurangan Anggaran Belanja

Penyesuaian anggaran berupa pengurangan anggaran belanja pada APBD perubahan 2016 dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 menjadi lebih efektif, efisien dan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat meningkat tingkat kesejahteraannya. Dalam hal ini kriteria dalam rencana pengurangan anggaran belanja pada kegiatan yang sudah ada dalam APBD penetapan 2016 antara lain sebagai berikut :

- 1) Penyesuaian volume dan anggaran;
- 2) Penyesuaian komponen belanja;

D. Mematikan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan

Sejalan dengan perubahan situasi dan keadaan serta kebijakan baik di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka diperlukan penyesuaian kegiatan dan program yang telah disusun sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut maka beberapa kriteria yang dijadikan dasar dalam rencana mematikan kegiatan adalah antara lain sebagai berikut:

- 1) Kegiatan duplikasi;
- 2) Tidak sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD/UKPD;
- 3) Kegiatan sudah dan akan dibiayai oleh pihak swasta;
- 4) Kegiatan yang diprediksi tidak dapat dilaksanakan karena alasan administrasi dan waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi;
- 5) Arahan tertulis Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan
- 6) Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintahan Pusat.

2.3.3 Pembiayaan Daerah

Pada APBD tahun 2016, pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp940.738.322.090,- yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp8.163.357.322.090,- dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp7.222.619.000.000,-. Adapun realisasi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6. Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta APBD Tahun 2016

No.	Uraian	2016		%
		APBD	Realisasi s.d. 30 Juni 2016	
III	PEMBIAYAAN DAERAH			
1.	Penerimaan Pembiayaan	8.163.357.322.090	4.933.519.451.750	60,43
2.	Pengeluaran Pembiayaan	7.222.619.000.000	-	-
	PEMBIAYAAN NETO III=(1-2)	940.738.322.090	4.933.519.451.750	

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan, yaitu:

- a. Silpa tahun sebelumnya
- b. Pencairan Dana Cadangan
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Penerimaan Pinjaman
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan, yaitu:

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Penyertaan Modal Daerah
- c. Pembayaran Pokok Utang
- d. Pemberian Pinjaman

A. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah untuk Tahun Anggaran 2016 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2015, Penerimaan Penerusan Pinjaman Pemerintah Pusat atas Proyek JEDI dan Penerimaan atas Pengembalian Investasi Dana bergulir. Berdasarkan Laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah diaudit oleh BPK RI ditetapkan untuk SILPA Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 4.933.519.451.750. Sementara untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah yang berasal dari Penerimaan Penerusan Pinjaman Pemerintah Pusat untuk Proyek JEDI pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2016 dialokasikan sebesar Rp 229.931.508.600 dan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 terjadi peningkatan menjadi sebesar Rp 379.902.397.884, hal ini dikarenakan adanya peningkatan pekerjaan proyek JEDI yang akan diselesaikan pada Tahun Anggaran 2016. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2016 bertambah dari Pengembalian Investasi Dana Bergulir sebesar Rp 435.368.000.000 berdasarkan LHP BPK RI Tahun Anggaran 2015.

B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada BUMD/PT Patungan, pada penetapan APBD Tahun

Anggaran 2016 dialokasikan sebesar Rp 7.222.619.000.000 dan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 menjadi sebesar Rp 8.396.998.000.000. Kebijakan Penyertaan Modal Daerah (PMD) Tahun Anggaran 2016 adalah untuk mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

- a. Dukungan pelaksanaan Asian Games tahun 2018.
- b. Peningkatan pembangunan transportasi massal.
- c. Peningkatan ketahanan pangan.
- d. Memajukan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi dengan memberikan Jaminan Kredit pada usaha tersebut.
- e. Peningkatan Pendapatan BUMD/PT Patungan yang berimplikasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Deviden dari BUMD/PT patungan.
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta.

2.4. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKP Tahun 2016

2.4.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Evaluasi hasil pelaksanaan Program dan kegiatan hingga triwulan II tahun 2016 ini merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun dan yang telah dilaksanakan. Proses ini sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar - benar akuntabel dan berkualitas. Nantinya hasil evaluasi pencapaian pelaksanaan kegiatan hingga triwulan II 2016 akan dijadikan acuan dan masukan dalam merumuskan kebijakan perubahan kegiatan dan anggaran yang meliputi penambahan anggaran, pengalokasian kegiatan baru, pengurangan anggaran, dan mematkan anggaran pada APBD Perubahan tahun 2016.

Berikut disajikan hasil pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Urusan pada Belanja Langsung pada triwulan II tahun 2016 yaitu antara lain :

- Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp. 3.499.256.665.453,- dengan realisasi sebesar 29,92 persen;
- Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp. 19.430.566.659,- dengan realisasi sebesar 26,70 persen;
- Urusan Statistik dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp. 345.215.500,- dengan realisasi sebesar 0,47 persen;
- Urusan Perencanaan Pembangunan dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp 18.561.685.838,- dengan realisasi sebesar 20,25 persen;
- Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp. 79.803.530.305,- dengan realisasi sebesar 52,13 persen;
- Urusan Komunikasi dan Informatika dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp. 166.731.145.177,- dengan realisasi sebesar 18,53 persen;

- Urusan Penanaman Modal Daerah dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp. 10.276.703.518,- dengan realisasi sebesar 11,91 persen;
- Urusan Ketahanan Pangan dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp. 85.407.558.587,- dengan realisasi sebesar 13,14 persen;
- Urusan Pertanian dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp. 51.358.868.306,- dengan realisasi sebesar 20,19 persen;
- Urusan Kehutanan dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp. 626.513.189,- dengan realisasi sebesar 20,38 persen;
- Urusan Kelautan dan Perikanan dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp.146.776.277.564,- dengan realisasi sebesar 13,79 persen;
- Urusan Lingkungan Hidup dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp. 2.047.814.554.995,- dengan realisasi sebesar 8,96 persen;
- Urusan Perdagangan dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp. 8.614.295.058,- dengan realisasi sebesar 13,88 persen;
- Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp. 50.977.383.418,- dengan realisasi sebesar 26,29 persen;
- Urusan Pariwisata dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp. 83.897.749.868,- dengan realisasi sebesar 10,79 persen;
- Urusan Kebudayaan dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp. 378.454.664.692,- dengan realisasi sebesar 15,66 persen;
- Urusan Perhubungan dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp. 580.626.769.178,- dengan realisasi sebesar 15,86 persen;
- Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp. 1.248.146.499.261,- dengan realisasi sebesar 49,62 persen;
- Urusan Industri dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp. 18.659.265.219,- dengan realisasi sebesar 21,56 persen;
- Urusan Tenaga Kerja dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp. 75.078.196.502,- dengan realisasi sebesar 26,12 persen;
- Urusan Pekerjaan Umum dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp. 10.562.610.362.175,- dengan realisasi sebesar 15,36 persen;
- Urusan Penataan Ruang dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp. 39.154.056.504,- dengan realisasi sebesar 19,59 persen;
- Urusan Perumahan Rakyat dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp. 4.552.380.993.583,- dengan realisasi sebesar 1,35 persen;
- Urusan Kesehatan dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp. 6.347.391.224.469,- dengan realisasi sebesar 23,28 persen;
- Urusan Pemuda dan Olah Raga dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp. 313.754.224.783,- dengan realisasi sebesar 14,87 persen;
- Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp. 32.874.369.193,- dengan realisasi sebesar 26,77 persen;
- Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp. 18.200.320.412,- dengan realisasi sebesar 27,24 persen;

- Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp. 23.037.605.813,- dengan realisasi sebesar 34,83 persen;
- Urusan Kearsipan dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp. 3.698.138.775,- dengan realisasi sebesar 0,73 persen;
- Urusan Perpustakaan dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp. 37.298.499.509,- dengan realisasi sebesar 26,82 persen;
- Urusan Pendidikan dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp. 3.614.234.408.635,- dengan realisasi sebesar 15,73 persen;
- Urusan Sosial dialokasikan pada APBD penetapan 2016 sebesar Rp. 267.099.048.341,- dengan realisasi sebesar 31,70 persen.

2.4.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Tingkat Wilayah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada belanja langsung pada triwulan II tahun 2016 pada tingkat wilayah dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Untuk tingkat Provinsi, total belanja langsung pada APBD Penetapan 2016 dialokasikan sebesar Rp. 24.158.818.439.907,- dengan realisasi sebesar 16,66 persen;
- Untuk wilayah Jakarta Pusat, total belanja langsung pada APBD Penetapan 2016 dialokasikan sebesar Rp. 1.483.043.654.001,- dengan realisasi sebesar 18,06 persen;
- Untuk wilayah Jakarta Utara, total belanja langsung pada APBD Penetapan 2016 dialokasikan sebesar Rp. 1.819.514.702.982,- dengan realisasi sebesar 19,32 persen;
- Untuk wilayah Jakarta Barat, total belanja langsung pada APBD Penetapan 2016 dialokasikan sebesar Rp. 2.151.157.908.854,- dengan realisasi sebesar 22,56 persen;
- Untuk wilayah Jakarta Selatan, total belanja langsung pada APBD Penetapan 2016 dialokasikan sebesar Rp. 2.183.479.511.543,- dengan realisasi sebesar 21,01 persen;
- Untuk wilayah Jakarta Timur, total belanja langsung pada APBD Penetapan 2016 dialokasikan sebesar Rp. 2.229.780.765.508,- dengan realisasi sebesar 19,95 persen;
- Untuk wilayah Kepulauan Seribu, total belanja langsung pada APBD Penetapan 2016 dialokasikan sebesar Rp.356.782.377.684,- dengan realisasi sebesar 11,36 persen;

Berdasarkan data di atas, baik secara sektoral maupun spasial dapat diperoleh informasi bahwa penyerapan pada Belanja Langsung masih relatif rendah. Untuk itu diperlukan usaha yang komprehensif guna mendorong peningkatan realisasi. Namun perlu diidentifikasi penyebab dari rendahnya realisasi tersebut agar memudahkan dalam penyusunan kebijakan guna peningkatan realisasi Belanja Langsung pada akhir tahun. Selanjutnya, penjabaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan beberapa Urusan dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Rekap Realisasi Belanja Langsung per Urusan sampai Triwulan II Tahun 2016

Kode Urusan	Nama Urusan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Persen Realisasi Keuangan
1.2	Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian	3,499,256,665,453	1,046,850,018,613	29.92%
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	19,430,566,659	5,188,397,246	26.70%
1.23	Statistik	345,215,500	1,627,500	0.47%
1.06	Perencanaan Pembangunan	18,561,685,838	3,758,647,341	20.25%
1.1	Kependudukan dan Catatan Sipil	79,803,530,305	41,602,892,919	52.13%
1.25	Komunikasi dan Informatika	166,731,145,177	30,890,858,473	18.53%
1.16	Penanaman Modal Daerah	10,276,703,518	1,224,142,390	11.91%
1.21	Ketahanan Pangan	85,407,558,587	11,225,988,350	13.14%
2.01	Pertanian	51,358,868,306	10,368,994,478	20.19%
2.02	Kehutanan	626,513,189	127,657,200	20.38%
2.05	Kelautan dan Perikanan	146,776,277,564	20,245,181,046	13.79%
1.08	Lingkungan Hidup	2,047,814,554,995	183,435,259,954	8.96%
2.06	Perdagangan	8,614,295,058	1,195,507,070	13.88%
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	50,977,383,418	13,400,584,783	26.29%
2.04	Pariwisata	83,897,749,868	9,055,055,541	10.79%
1.17	Kebudayaan	378,454,664,692	59,284,424,621	15.66%
1.07	Perhubungan	580,626,769,178	92,059,471,816	15.86%
2.03	Energi dan Sumberdaya Mineral	1,248,146,499,261	619,273,484,653	49.62%
2.07	Industri	18,659,265,219	4,023,192,577	21.56%
1.14	Tenaga Kerja	75,078,196,502	19,609,721,567	26.12%
1.03	Pekerjaan Umum	10,562,610,362,175	1,622,892,523,242	15.36%

Kode Urusan	Nama Urusan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Persen Realisasi Keuangan
1.05	Penataan Ruang	39,154,056,504	7,669,822,456	19.59%
1.04	Perumahan Rakyat	4,552,380,993,583	61,491,285,366	1.35%
1.02	Kesehatan	6,347,391,224,469	1,477,877,910,451	23.28%
1.18	Pemuda dan Olah Raga	313,754,224,783	46,669,945,435	14.87%
1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	32,874,369,193	8,799,333,247	26.77%
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18,200,320,412	4,957,139,403	27.24%
1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	23,037,605,813	8,024,703,710	34.83%
1.24	Kearsipan	3,698,138,775	26,875,900	0.73%
1.26	Perpustakaan	37,298,499,509	10,002,705,181	26.82%
1.01	Pendidikan	3,614,234,408,635	568,596,835,193	15.73%
1.13	Sosial	267,099,048,341	84,663,307,194	31.70%

Sumber : Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Sedangkan penjabaran rekap realisasi belanja langsung untuk tingkat Provinsi dan 6 (enam) wilayah sampai triwulan II dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.8. Rekap Realisasi Belanja Langsung per Wilayah sampai Triwulan II Tahun 2015

Wilayah	Anggaran	Realisasi Keuangan	Persen Realisasi Keuangan
Provinsi	24,158,818,439,907	4,025,912,385,578	16.66%
Jakarta Pusat	1,483,043,654,001	267,828,337,498	18.06%
Jakarta Utara	1,819,514,702,982	351,449,185,108	19.32%
Jakarta Barat	2,151,157,908,854	435,287,956,731	22.56%
Jakarta Selatan	2,183,479,511,543	458,647,537,580	21.01%
Jakarta Timur	2,229,780,765,508	444,821,221,997	19.95%
Kep. Seribu	356,782,377,684	40,546,870,424	11.36%
Jumlah	34,382,577,360,479	6,074,493,494,916	17.67%

Sumber : Bappeda Provinsi DKI Jakarta

2.5. Permasalahan dan Tantangan Tahun 2016

Kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta dijabarkan melalui RKPD tahun 2016. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, dihadapkan berbagai permasalahan sehingga diperlukan penyesuaian untuk menjaga agar prioritas pembangunan dapat tercapai, diantaranya yaitu:

A. Pendapatan

Selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan daerah, pendapatan daerah juga diarahkan untuk memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pendapatan daerah meliputi: kebijakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah dan Dana Perimbangan, serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Dalam hal pendapatan daerah, beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain yaitu:

- a. Tarif retribusi yang relatif rendah dan tidak sesuai dengan biaya operasional sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif.
- b. Mekanisme pemungutan retribusi pengangkutan sampah toko dan sejenisnya yang belum seragam.
- c. Banyak objek retribusi pelayanan tera / tera ulang yang meteran kWh-nya 80% berada di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga menjadi potensi retribusi daerah lain.
- d. Retribusi pemakaian alat besar dan penunjang (Excavator) tidak boleh dilakukan pemungutan dan sudah dihibahkan untuk operasional Dinas Kebersihan.
- e. Retribusi pemakaian tempat pelelangan yang sudah tidak dipungut retribusi lagi.
- f. Sarana dan peralatan uji sudah tidak layak pakai sehingga mengurangi kualitas layanan.
- g. Sesuai dengan Surat dari BLUD UPT Jalan Berbayar Elektronik Nomor 293/-1.713 pada tanggal 27 Oktober 2015, ERP baru dapat dilaksanakan pada pertengahan tahun 2017 sehingga tidak ada realisasi pada tahun 2016.

B. Belanja

Pada sisi belanja, permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan RKPD tahun 2015 sehingga perlu dilakukan penyesuaian diantaranya yaitu:

- a. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat maupun perubahan kebijakan internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- b. Perubahan tugas pokok dan fungsi beberapa SKPD/UKPD yang mengharuskan pergeseran anggaran
- c. Pelaksanaan kegiatan telah dibiayai melalui Corporate Social Responsibility (CSR), sedangkan kegiatan tersebut dianggarkan dalam APBD tahun 2016
- d. Ketidaksihinggaan antara spesifikasi dan harga satuan komponen belanja barang dan jasa dengan kondisi pada saat pelaksanaan pengadaan
- e. Ketidakiengkapan syarat administratif dalam proses pengadaan barang dan jasa
- f. Proses administrasi penghapusan aset memerlukan waktu lama sehingga pelaksanaan pembangunan atau rehab gedung tertunda
- g. Masih ditemukan beberapa kegiatan yang terindikasi duplikasi
- h. Masih ditemukan kegiatan yang kode rekeningnya belum sesuai.

C. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Beberapa masalah dalam penerimaan pembiayaan daerah yang perlu mendapat perhatian, diantaranya adalah penyerapan JEDC berdasarkan progres pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor, kemudian ditagihkan ke Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta melalui BPKAD Provinsi DKI Jakarta dan diteruskan ke KPPN Khusus Investasi Kementerian Keuangan RI.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Beberapa masalah dalam pengeluaran pembiayaan daerah yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut :

- a. Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) belum dapat dicairkan ke masing-masing BUMD/PT Patungan karena saat ini masih dalam tahap koordinasi pencairan secara bertahap untuk menjaga likuiditas arus kas daerah.
- b. Khusus PMP dari hibah Pemerintah Pusat , diakui berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan kontraktor, dimana nilai tagihan kontraktor per 30 Juni 2016 sebesar ¥ 2.783.833.035 dan Rp 479.425.500.274.
- c. Pencatatan Pengakuan Nilai PMP berdasarkan SP3 yang dikeluarkan Oleh Kementerian Keuangan RI. Sampai dengan saat ini SP3 yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI senilai Rp116.741.080.404 dan untuk tagihan yang belum dikeluarkan SP3 sebesar (JPY2.625.192.217 dan Rp381.530.044.792 dengan asumsi Kurs @ Rp120) sehingga sampai dengan 30 Juni 2016 diperkirakan penarikan dana hibah dari Pemerintah Pusat atas Proyek MRT Jakarta yang dijadikan Nilai PMP kepada PT MRT Jakarta sebesar Rp813.294.191.236.

2.5.1. Tantangan

Dalam memecahkan permasalahan yang telah disebutkan dalam subbab sebelumnya, kedepannya Provinsi DKI Jakarta juga perlu mengantisipasi tantangan baik dari internal maupun eksternal. Dalam dua tahun terakhir, kinerja perekonomian nasional masih dihadapkan pada tantangan eksternal yaitu belum stabilnya perekonomian dunia.

Selain tantangan dari sisi eksternal, juga terdapat tantangan dari internal yang dihadapi, diantaranya adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan

Sehubungan dengan kebijakan pendapatan daerah, tantangan yang dihadapi yaitu terkait dengan upaya intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui revisi kebijakan baru diantaranya yaitu:

- Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir yang memuat perubahan tarif Pajak Parkir yang diharapkan efektif berlaku sejak Agustus 2016;
- Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang memuat perubahan atas Saat Teutang Pajak yang diharapkan efektif berlaku sejak Agustus 2016;
- Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang memuat perubahan tariff Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diharapkan efektif berlaku sejak Agustus 2016 berikut dengan kebijakan-kebijakan yang melekat pada pemungutan PBB-P2;

- Tarif retribusi dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang relatif rendah bila dibandingkan dengan biaya operasional pelayanan pemungutan retribusi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tariff. Tantangan yang dihadapi kedepannya adalah pelaksanaan law enforcement yang lebih intensif sehingga pemungutan retribusi daerah yang didasarkan pada kebijakan di atas dapat mencapai target sesuai dengan rencana. Selain dalam hal peraturan, sejak awal 2016 juga telah dilakukan peningkatan kualitas pelayanan pemungutan retribusi daerah yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). Dengan demikian diharapkan penerimaan retribusi dapat lebih optimal; dan
- Tantangan lain dalam penerapan kebijakan pendapatan daerah adalah penambahan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) baru, diantaranya yaitu 19 Rumah Sakit tingkat Kecamatan sehingga kedepannya perlu dioptimalkan penerimaannya.

B. Belanja

Dalam pelaksanaan belanja daerah maka tantangannya antara lain adalah manajemen waktu bagi SKPD/UKPD dalam pelaksanaan kegiatan khususnya kegiatan pembangunan berskala besar.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan percepatan pencapaian rencana dan target pembangunan di tahun ketiga RPJMD tahun 2013-2017. Dalam hal teknis pelaksanaan kegiatan, perlu diperhatikan harga satuan pada proses pengadaan barang dan jasa terutama untuk barang dan jasa yang dinilai dengan mata uang asing.

C. Pembiayaan

Salah satu tantangan pelaksanaan kebijakan pembiayaan daerah adalah peningkatan kualitas pembiayaan daerah dalam hal Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pembiayaan tersebut terutama akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan Asian Games tahun 2018, percepatan peningkatan pembangunan transportasi massal, serta beberapa proyek potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat DKI Jakarta dan dapat meningkatkan pendapatan BUMD secara profesional.

2.6. Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2016

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD 2016 sampai dengan Triwulan II dan perubahan kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, dapat dijabarkan Ringkasan Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2016 sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.9. Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2016

No.	Uraian	2016		Selisih (%)
		Penetapan	Rencana Perubahan	
I.	PENDAPATAN DAERAH	59.004.784.464.142	61.573.437.026.925	4,35%
A.	Pendapatan Asli Daerah	39.322.613.624.142	38.284.914.241.905	-2,64%
1.	Pajak Daerah	32.010.000.000.000	32.867.000.000.000	2,68%
2.	Retribusi Daerah	800.000.000.000	649.175.000.000	-18,85%
a.	Retribusi Jasa Umum	300.350.000.000	100.000.000.000	-66,71%
b.	Retribusi Jasa Usaha	100.000.000.000	149.525.000.000	49,53%
c.	Retribusi Perizinan Tertentu	399.650.000.000	399.650.000.000	0,00%
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	790.000.000.000	407.868.532.719	-48,37%
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	5.722.613.624.142	4.360.870.709.186	-23,80%
B.	Dana Perimbangan	13.867.897.878.000	20.619.427.185.020	48,68%
1.	Dana Bagi Hasil	13.867.897.878.000	16.970.468.445.000	22,37%
a.	Dana Bagi Hasil Pajak	13.819.992.249.000	16.927.325.782.000	22,48%
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak	47.905.629.000	43.142.663.000	-9,94%
2.	Dana Alokasi Khusus	-	3.648.958.740.020	-
C.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.814.272.962.000	2.669.095.600.000	-54,09%
1.	Pendapatan Hibah	2.244.419.882.000	2.669.095.600.000	18,92%
2.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	3.569.853.080.000	-	-
II.	BELANJA DAERAH	59.945.522.786.232	58.925.228.876.559	-1,70%
A.	Belanja Tidak Langsung	25.562.945.425.753	26.590.180.433.385	4,02%
1.	Belanja Pegawai	18.715.193.047.771	19.909.463.427.404	6,38%
2.	Belanja Bunga	30.000.000.000	30.000.000.000	0,00%
3.	Belanja Subsidi	1.612.726.275.800	1.612.725.275.800	0,00%
4.	Belanja Hibah	2.550.498.855.395	2.256.223.066.332	-11,54%
5.	Belanja Bantuan Sosial	2.524.193.425.000	2.524.993.425.000	0,03%
6.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	1.818.003.960	215.759.514.710	11767,93%
7.	Belanja Tidak Terduga	128.515.817.827	41.014.724.139	-68,09%
B.	Belanja Langsung	34.382.577.360.479	32.335.048.443.174	-5,96%
III.	PEMBIAYAAN DAERAH	940.738.322.090	(2.648.208.150.366)	-381,50%
A.	Penerimaan Pembiayaan	8.163.357.322.090	5.748.789.849.634	-29,58%
1.	SiLPA	7.933.425.813.490	4.933.519.451.750	-37,81%
2.	Pinjaman JEDI	229.931.508.600	379.902.397.884	65,22%
3.	Pengembalian Investasi Dana Bergulir	-	435.368.000.000	-

No.	Uraian	2016		Selisih (%)
		Penetapan	Rencana Perubahan	
B.	Pengeluaran Pembiayaan	7.222.619.000.000	8.396.998.000.000	16,26%
1.	Penyertaan Modal Pemerintah	7.222.619.000.000	8.396.998.000.000	16,26%
TOTAL PENDAPATAN + PENERIMAAN PEMBIAYAAN (A)		67.168.141.786.232	67.322.226.876.559	0,23%
TOTAL BELANJA + PENGELUARAN PEMBIAYAAN (B)		67.168.141.786.232	67.322.226.876.559	0,23%

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa target Pendapatan Daerah ditingkatkan 4,35 persen dari Rp.59,00 Triliun menjadi Rp.61,57 Triliun, sedangkan target Belanja Daerah diturunkan 1,70 persen dari Rp.59,94 Triliun menjadi Rp.58,92 Triliun. Pada Penerimaan Pembiayaan terlihat juga koreksi target SiLPA dari Rp.7,93 Triliun menjadi Rp.4,93 Triliun, sedangkan pada Pengeluaran Pembiayaan alokasi Penyertaan Modal Pemerintah kepada BUMD dinaikkan 16,26 persen dari Rp.7,22 Triliun menjadi Rp.8,39 Triliun.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RKPD 2016

Evaluasi pelaksanaan APBD 2016 sebagaimana disampaikan dalam Bab II berdampak pada penyesuaian pada kegiatan-kegiatan dalam Belanja Langsung. Kategori penyesuaian adalah kegiatan yang mengalami penambahan anggaran, kegiatan baru, kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran, dan kegiatan yang dimatikan. Selanjutnya, penyesuaian kegiatan-kegiatan tersebut akan menjadi bahan utama pada penyusunan APBD Perubahan Tahun 2015 . Kegiatan yang tidak terlampir dan tidak mengalami perubahan pada lampiran ini masih dianggap sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kegiatan yang mengalami penyesuaian baik penambahan, kegiatan baru, pengurangan dan kegiatan dimatikan.

3.1. Kegiatan yang Mengalami Penambahan Anggaran

Penambahan anggaran merupakan suatu keniscayaan sebagai akibat dari perkembangan kebutuhan masyarakat. Yang dimaksud dengan penambahan anggaran kegiatan adalah kegiatan tersebut sudah ada dalam APBD penetapan 2015 dengan alokasi anggaran tertentu, namun karena perubahan situasi dan kondisi baik fisik maupun non fisik maka diperlukan penambahan anggaran.

3.2. Kegiatan Baru

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan baru yang sebelumnya belum ada pada APBD penetapan Tahun 2015 dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan baru tersebut dapat lebih memfasilitasi berbagai kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain Penambahan anggaran untuk kegiatan yang sudah ada pada APBD penetapan tahun 2015, diperlukan juga pengalokasian kegiatan baru. Yang dimaksud dengan kegiatan baru adalah kegiatan tersebut belum ada dalam APBD Penetapan Tahun 2015, namun karena perubahan situasi dan kondisi baik fisik maupun non - fisik serta adanya kebijakan baru maka perlu disusun kegiatan baru.

3.3. Kegiatan yang Mengalami Pengurangan Anggaran

Perubahan kebijakan belanja selain penambahan anggaran kegiatan dan pengalokasian kegiatan baru, juga meliputi pengurangan anggaran kegiatan dalam rancangan APBD Perubahan Tahun 2015. Yang dimaksud dengan pengurangan anggaran kegiatan adalah kegiatan tersebut sudah ada dalam APBD penetapan 2015 dengan alokasi anggaran tertentu, namun karena perubahan situasi dan kondisi baik kegiatan fisik maupun non fisik serta kebijakan, maka anggaran pada kegiatan tersebut perlu dikurangi nilainya.

Pengurangan anggaran belanja dilakukan jika kegiatan tersebut setelah dilakukan evaluasi ternyata perlu penyesuaian anggaran. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2015 menjadi lebih efisien, efektif dan optimal dan tepat sasaran dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.

3.4. Kegiatan yang Dimatikan

Kegiatan yang dimatikan adalah kegiatan yang jika diimplementasikan secara teknis dan administratif tidak dapat dilaksanakan sehingga kegiatan tersebut menjadi subyek untuk dimatikan. Aspek teknis dan administratif tersebut antara lain keterbatasan waktu, perubahan kondisi fisik lapangan seperti kepemilikan dan kelengkapan dokumen serta keterbatasan regulasi dan kesiapan sumber daya manusia. Semua ini dimaksudkan agar alokasi anggarannya dapat digunakan dan dialihkan untuk pos kegiatan yang lain. Dengan demikian maka pos kegiatan lain yang dialokasikan tersebut dapat lebih efektif dan efisien serta hasilnya dapat lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jakarta secara keseluruhan.

Rencana kegiatan yang mengalami penyesuaian seperti penambahan anggaran, pengurangan anggaran, rencana kegiatan baru, dan kegiatan yang dimatikan pada tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran I. Sedangkan seluruh rencana program dan kegiatan perubahan RKPD Tahun 2016 baik yang mengalami penyesuaian maupun tidak mengalami penyesuaian dijabarkan pada Lampiran II.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD 2016 diharapkan akan tersusun kegiatan yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat DKI Jakarta. Selanjutnya perubahan RKPD ini yang merupakan hasil proses sinkronisasi dari penjaringan dari para pemangku kepentingan, proses teknokratis, *top-down* dan *bottom-up* diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat DKI Jakarta yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.

Salah satu tujuan dari penyusunan ini adalah menyelaraskan program dan prioritas pembangunan provinsi DKI Jakarta dengan kondisi dan dinamika saat ini. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan penyusunan Perubahan RKPD 2016, pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran - sasaran pembangunan menjadi lebih baik dan sesuai dengan target yang tercantum dalam RPJMD 2013 – 2017.

Dalam pelaksanaannya, RKPD 2016 yang telah dirubah ini memerlukan kaidah pelaksanaan yang menjadi komitmen bagi seluruh *stakeholder* yang berperan dalam pembangunan, yaitu:

1. Dukungan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta dalam pembangunan secara proporsional, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan untuk kepentingan masyarakat luas.
2. Pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik - baiknya.
3. Sesuai ketentuan bahwa RKPD Perubahan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P). Selanjutnya KUPA dan PPAS - P tersebut akan dijabarkan dalam Perubahan RKA SKPD sebagai lampiran Raperda Perubahan APBD untuk dilakukan pembahasan bersama Kementerian Dalam Negeri.
4. Sesuai ketentuan bahwa perlu dilakukan sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN dan sumber lainnya, yang dituangkan pada Rencana Kerja (RENJA) yang disesuaikan dengan perkembangan terkini.
5. Setiap Kepala SKPD dan UKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda, untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.
6. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.

7. Pada akhir tahun anggaran 2016, setiap Kepala SKPD wajib melakukan evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2016, berdasarkan perubahan RKPD.
8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari para Kepala SKPD. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tahun berikutnya.

Dengan kaidah dan prinsip seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Dengan demikian diharapkan juga tujuan inti pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Jakarta secara keseluruhan baik lahir maupun batin dapat terwujud secara efisien dan efektif.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

ttd.

Basuki T. Purnama